

LAPORAN TAHUNAN 2020



KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**



KATA PENGANTAR

Dengan izin Allah Yang Maha Esa, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Badan Litbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelesaikan program kerja tahun 2020 yang terangkum dalam Laporan Tahunan 2020. Kami berharap, Laporan ini dapat menggambarkan kinerja yang dicapai sepanjang 2020 dan menggambarkan sinergi antara kekuatan pemerintah, kekuatan komunitas/masyarakat, kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media yang biasa disebut *penta helix* dalam rangka pengembangan SDM TIK untuk menuju transformasi digital.

Peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan produktivitas bangsa menjadi dasar bagi Badan Litbang SDM dalam mengupayakan peningkatan kompetensi SDM Nasional, khususnya angkatan kerja di sektor TIK, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap TIK secara inklusif yang berperan besar dalam peningkatan produktivitas. Dinamika industri TIK dan revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan signifikan pada lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyebabkan banyaknya pekerjaan berangsur menghilang seiring perkembangan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia. Peningkatan kompetensi SDM menjadi prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Badan Litbang SDM) pada khususnya.

Pembangunan berbasis riset sangat penting dimana kebijakan berbasis riset memiliki fondasi kontekstual kuat sehingga dapat menjadi acuan arah pembangunan nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha menumbuhkembangkan iklim dan budaya penelitian dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis riset. Hal tersebut menjadi dasar Badan Litbang SDM melaksanakan program kerja 2020 secara terfokus, terarah, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program kerja 2020 yang menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki di tahun-tahun mendatang. Besar harapan kami agar melalui Laporan Tahunan ini, masyarakat dan *stakeholders* dapat memberikan umpan balik dan masukan bagi Badan Litbang SDM untuk memberikan kinerja yang lebih maksimal di tahun mendatang. Atas dukungan, kerja sama dan kinerja seluruh jajaran karyawan Badan Litbang SDM 2020, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2021
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA

HARY BUDIARTO

Dr. Hary Budiarto, M.Kom

DAFTAR ISI



ii KATA PENGANTAR

iii DAFTAR ISI

v DAFTAR TABEL

vii DAFTAR GRAFIK

viii DAFTAR GAMBAR

1 PROFIL

- 2 Tugas dan Fungsi
- 3 Struktur Organisasi
- 9 Sumber Daya Manusia
- 15 Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja
- 20 Kinerja Keuangan
- 28 Sarana Prasarana
- 31 Akreditasi Kelembagaan

34 PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 59 *Policy Brief*
- 60 Jurnal Ilmiah dan Publikasi

62 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 63 Digital Talent Scholarship
- 73 Pelatihan dan Sertifikasi SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika
- 76 Pelatihan *Global System for Mobile Communications Association (GSMA)*
- 78 Penyelenggaraan Beasiswa Bidang Kominfo
- 86 Penerimaan Beasiswa
- 90 Tingkat Kelulusan
- 92 Peserta Pendidikan Diploma IV, Strata I dan Pendidikan Pelatihan Teknis di STMM Yogyakarta
- 97 Pelatihan dan Sertifikasi Aparatur Bidang Kominfo
- 99 Pengenalan TIK Bagi Masyarakat (Wanita, Anak-anak, dan Disabilitas)
- 101 Peningkatan Kapasitas Pegawai Sesuai dengan Standar Kompetensi

DAFTAR ISI



104 KILAS BALIK 2020

- 105 Diseminasi Informasi Beasiswa S2 Dalam Negeri Kemenkominfo
- 107 Kerja Sama Badan Litbang SDM
- 113 Re-Launching SIMONAS: Platform Rekrutmen Talenta Digital
- 115 Pelantikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM

DAFTAR TABEL

- 12 Tabel 1 Pemetaan Jabatan Fungsional Tertentu setiap Satuan Kerja
- 18 Tabel 2 Perjanjian dan Capaian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020
- 20 Tabel 3 Alokasi Anggaran Badan Litbang SDM di Akhir TA 2020
- 21 Tabel 4 Pembagian Porsi Belanja Berdasarkan Sumber Dana (RM atau PNBPN)
- 24 Tabel 5 Capaian Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2020
- 28 Tabel 6 Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM dari Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2020
- 30 Tabel 7 Distribusi Kendaraan Dinas Badan Litbang SDM
- 32 Tabel 8 Rincian Akreditasi Kelembagaan Satker/UPT di Lingkungan Badan Litbang SDM
- 36 Tabel 9 Penelitian Aspirasi Daerah
- 37 Tabel 10 Feedback Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2020
- 45 Tabel 11 Konsensus Pengaturan Umum
- 46 Tabel 12 Konsensus Pengaturan LCN
- 46 Tabel 13 Konsensus *Receiver Behaviour*
- 49 Tabel 14 *Survey Online Focus Group Discussion* Selama Bulan Juni 2020
- 50 Tabel 15 Survei Analisis Media Online Kominfo
- 60 Tabel 16 Daftar Jurnal yang Terbit Tahun 2020 Pada Satker/UPT di Lingkungan Badan Litbang SDM
- 71 Tabel 17 Rincian Peserta DTS dari Setiap Akademi
- 75 Tabel 18 Capaian Pengembangan SDM Yang Profesional di Bidang Komunikasi dan Informatika Melalui Pelatihan dan Sertifikasi
- 77 Tabel 19 Detail Peserta dan Tema Pelatihan
- 79 Tabel 20 Program Beasiswa Magister Dalam Negeri
- 87 Tabel 21 Penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri Reguler Tahun 2020
- 89 Tabel 22 Rekap Penerima Beasiswa Internal Tahun 2020
- 89 Tabel 23 Rekap Penerima Beasiswa Internal Tahun 2020 (2)
- 95 Tabel 24 Peserta Pendidikan Diploma- IV, Strata I dan Pendidikan Pelatihan Teknis Tahun 2015-2020
- 96 Tabel 25 Rasio Jumlah Mahasiswa, Pengajar, dan Kelulusan Rata-rata per Tahun
- 100 Tabel 26 Rekap Realisasi Pengenalan TIK bagi Masyarakat Tahun 2020 per UPT
- 101 Tabel 27 Rekap Kategori Peserta Pengenalan TIK bagi Masyarakat Tahun 2020 (per Triwulan)



DAFTAR TABEL

- 102 Tabel 28 Persentase Kelulusan Diklat Manajerial
- 102 Tabel 29 Persentase Kelulusan Diklat Teknis
- 103 Tabel 30 Persentase Kelulusan Diklat Fungsional
- 108 Tabel 31 Kerja Sama Badan Litbang SDM dengan 21 Mitra Dalam Negeri
- 112 Tabel 32 Kerja Sama Badan Litbang SDM dengan 3 Mitra Luar Negeri



DAFTAR GRAFIK

- 10 Grafik 1 Rekap JFT Per Satker/UPT
- 11 Grafik 2 Sebaran JFT di Lingkungan Badan Litbang SDM
- 14 Grafik 3 Jumlah Pegawai Aktif Berdasarkan Satuan Kerja Per-Desember 2020
- 15 Grafik 4 Jumlah PPNPN di Lingkungan Badan Litbang SDM
- 86 Grafik 5 Beasiswa Bidang Kominfo
- 88 Grafik 6 Penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri Tahun 2021
- 92 Grafik 7 Tingkat Penerima Kelulusan Beasiswa (Lulus Tahun 2020)
- 103 Grafik 8 Tingkat Kelulusan Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis



DAFTAR GAMBAR

- 2 Gambar 1 Fungsi Badan Litbang SDM
- 3 Gambar 2 Struktur Organisasi Badan Litbang SDM Pusat Berdasarkan Permen Kominfo No 6 Tahun 2018
- 7 Gambar 3 Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo
- 8 Gambar 4 Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo
- 9 Gambar 5 Ilustrasi Sumber Daya Manusia
- 15 Gambar 6 Ilustrasi Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja
- 16 Gambar 7 Indikator Kinerja Menteri 3.1 dan 3.2
- 17 Gambar 8 3 (tiga) Sasaran Progam Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020
- 20 Gambar 9 Ilustrasi Kinerja Keuangan
- 26 Gambar 10 MP dari Satker Penghasil Ditjen SDPPI Untuk Dukungan Anggaran Sumber PNBPN di Kegiatan DTS
- 28 Gambar 11 Ilustrasi Sarana Prasarana
- 31 Gambar 12 Ilustrasi Akreditasi Kelembagaan
- 35 Gambar 13 Judul Penelitian yang Dilaksanakan oleh Badan Litbang SDM pada Tahun 2020
- 38 Gambar 14 Kebermanfaatan Hasil 6 Penelitian Tahun 2020
- 42 Gambar 15 Hambatan Pemenuhan Kewajiban dan Komitmen Penyelenggara Pos
- 48 Gambar 16 Data Survei Persepsi Netizen
- 54 Gambar 17 10 K/L yang Memiliki Nilai Sudah Siap
- 59 Gambar 18 Ilustrasi *Policy Brief*
- 59 Gambar 19 Badan Litbang SDM Melaporkan 8 (Delapan) Judul *Policy Brief* Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika
- 60 Gambar 20 Ilustrasi Jurnal Ilmiah dan Publikasi
- 63 Gambar 21 Logo *Digital Talent Scholarship*
- 63 Gambar 22 Pelaksanaan DTS Daring
- 64 Gambar 23 Kebutuhan Tenaga Terampil Bidang Digital di Indonesia
- 67 Gambar 24 Pelatihan *Vocational School Graduate Academy (VSGA)*
- 68 Gambar 25 Program Pelatihan *Thematic Academy (TA)*
- 70 Gambar 26 Program Pasca Pelatihan
- 73 Gambar 27 Ilustrasi Pelatihan dan Sertifikasi SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika



DAFTAR GAMBAR

- 74 Gambar 28 Tema – Tema Pelatihan SKKNI Tahun 2020
- 76 Gambar 29 Ilustrasi Pelatihan Global System For Mobile Communications Association (GSMA)
- 78 Gambar 30 Logo Beasiswa Kominfo
- 80 Gambar 31 Universitas Gadjah Mada
- 81 Gambar 32 Institut Teknologi Bandung
- 82 Gambar 33 Institut Teknologi Sepuluh November
- 82 Gambar 34 Universitas Indonesia
- 83 Gambar 35 Universitas Andalas
- 84 Gambar 36 Universitas Airlangga
- 84 Gambar 37 Universitas Sebelas Maret
- 85 Gambar 38 Universitas Hasanuddin
- 85 Gambar 39 Universitas Sumatera Utara
- 86 Gambar 40 Penerimaan Beasiswa
- 90 Gambar 41 Tingkat Kelulusan
- 90 Gambar 42 Tingkat Kelulusan Beasiswa Tepat Waktu
- 92 Gambar 43 STMM Yogyakarta
- 93 Gambar 44 Kegiatan di STMM Yogyakarta
- 93 Gambar 45 Penyelenggaraan Pendidikan Pada STMM Yogyakarta
- 94 Gambar 46 Program Studi Penyiaran, Animasi dan Desain, Serta Komunikasi Informasi Publik di STMM Yogyakarta
- 94 Gambar 47 Program Pendidikan Diploma IV dan Strata di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta
- 97 Gambar 48 Pelatihan dan Sertifikasi Aparatur Bidang Kominfo
- 98 Gambar 49 Pelatihan Aparatur di BPPTIK Cikarang (Luring)
- 98 Gambar 50 Pelatihan Aparatur di BPPTIK Cikarang (Daring)
- 99 Gambar 51 Ilustrasi Pengenalan TIK
- 99 Gambar 52 Pengenalan TIK Bagi Masyarakat (Wanita, Anak-anak, dan Disabilitas)
- 101 Gambar 53 Ilustrasi Peningkatan Kapasitas Pegawai
- 105 Gambar 54 Sosialisasi di Padang
- 105 Gambar 55 Sosialisasi Program Beasiswa S2 di Padang
- 106 Gambar 56 Sosialisasi di Kupang
- 106 Gambar 57 Iklan Program Beasiswa



DAFTAR GAMBAR

- 106 Gambar 58 Sosialisasi Program Beasiswa S2 di Kupang
- 107 Gambar 59 Ilustrasi Kerja Sama
- 113 Gambar 60 Re-Launching SIMONAS
- 115 Gambar 61 Pelantikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
- 116 Gambar 62 Menteri Komunikasi dan Informatika
- 118 Gambar 63 Apresiasi Pejabat Sebelumnya





Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Badan Litbang SDM) merupakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memiliki 2 (dua) peran yaitu sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika dan pelaksana pengembangan SDM bidang komunikasi dan Informatika. Peran tersebut dilaksanakan dalam rangka memberikan rekomendasi kepada seluruh *stakeholders* Badan Litbang SDM baik internal maupun eksternal Kementerian Kominfo terkait dengan perumusan kebijakan/regulasi maupun dalam evaluasi implementasi kebijakan/regulasi di bidang komunikasi dan informatika. Di lain sisi, Badan Litbang SDM juga menjalankan peran pengembangan SDM yang dilaksanakan melalui pelatihan dan pendidikan dibidang komunikasi dan informatika, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pemanfaatan TIK dalam keseharian dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia di bidang komunikasi dan informatika.

Di era digital, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak pengaruh dan perubahan di berbagai aspek kehidupan. Perkembangan infrastruktur telekomunikasi saat ini mendorong pesatnya laju penetrasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh masyarakat. Pembangunan infrastruktur memang erat kaitannya dengan jumlah pengguna layanan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan hal tersebut, masyarakat kini mulai menjadikan informasi sebagai suatu komoditi yang berharga. Bagaimanapun juga disadari atau tidak masyarakat informasi yang tengah digadang-gadang saat ini tidak dapat lepas dari komponen dinamika teknologi informasi. Teknologi informasi memang telah terbukti berpengaruh terhadap perubahan masyarakat di era ini. Perkembangannya yang pesat saat ini telah mendorong peran strategis informasi sebagai sebuah modal dasar pembangunan. Inilah yang menjadi salah satu kunci bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Suatu upaya untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan tersebut dapat mensejajarkan bangsa Indonesia menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang telah maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negaranya masing-masing.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah yang diberi tugas dalam perumusan dan pengkoordinasian kebijakan pembangunan komunikasi, informasi dan media massa, termasuk telematika dan penyiaran dalam hal ini mendukung upaya pemerintah terhadap terwujudnya masyarakat informasi berbasis ilmu pengetahuan atau dikenal sebagai *Knowledge Base Society*. Pada pelaksanaannya sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program dan kegiatan terkait dengan satuan kerja yang dinaunginya.

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM sebagai salah satu satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan unsur penunjang dengan perannya sebagai pelaksana penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika, serta sebagai pelaksana pengembangan SDM pada bidang yang sama. Melalui peran inilah, usulan terkait kebijakan maupun regulasi hingga pada evaluasi atas implementasi dari kebijakan tersebut dapat direkomendasikan pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menjalankan peran lainnya, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM juga melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan memfasilitasi proses sertifikasi kompetensi untuk bidang komunikasi dan informatika. Sebagaimana peran yang dimaksud berupaya untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta pemahaman masyarakat khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika. Peningkatan literasi, pengetahuan, dan kompetensi masyarakat terkait bidang komunikasi dan informatika bagaimanapun sejalan dengan arah perkembangan masyarakat dalam era informasi saat ini.

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Badan Litbang SDM sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Litbang SDM menyelenggarakan fungsi :

Gambar 1
Fungsi Badan Litbang SDM



| | |
|--|---|
| | Perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika |
| | Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; |
| | Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika, serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika; |
| | Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan |
| | Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. |

Gambar 2
 Struktur Organisasi Badan Litbang
 SDM Pusat Berdasarkan Permen
 Kominfo No 6 Tahun 2018

STRUKTUR ORGANISASI

**BADAN PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA**

**SEKRETARIAT
 BADAN**

BAGIAN
 PERENCANAAN PROGRAM
 DAN PELAPORAN

BAGIAN
 KEPEGAWAIAN
 DAN ORGANISASI

BAGIAN
 KEUANGAN

BAGIAN
 UMUM

**PUSAT PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA,
 PERANGKAT, DAN
 PENYELENGGARAAN
 POS DAN INFORMATIKA**

**PUSAT PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN
 APLIKASI INFORMATIKA
 DAN INFORMASI
 DAN KOMUNIKASI
 PUBLIK**

**PUSAT
 PENGEMBANGAN
 SERTIFIKASI
 DAN
 PROFESI**

**PUSAT
 PENDIDIKAN
 DAN
 PELATIHAN**

SUBBAGIAN
 TATA USAHA

SUBBAGIAN
 TATA USAHA

SUBBAGIAN
 TATA USAHA

SUBBAGIAN
 TATA USAHA

BIDANG
 PENYELENGGARAAN
 PENELITIAN

BIDANG
 PENYELENGGARAAN
 PENELITIAN

BIDANG
 STANDARISASI
 KOMPETENSI

BIDANG
 PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN

BIDANG
 PENJAMIN MUTU
 DAN
 PENDAYAGUNAAN

BIDANG
 PENJAMIN MUTU
 DAN
 PENDAYAGUNAAN

BIDANG
 PENGEMBANGAN
 PROFESI

BIDANG
 PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN

BIDANG
 PENGEMBANGAN
 SERTIFIKASI

BIDANG
 PENYELENGGARAAN
 PENDIDIKAN
 DAN PELATIHAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Badan Litbang SDM dikepalai oleh seorang Kepala setingkat eselon I dan dibantu lima satuan kerja setingkat Eselon II yaitu:

1. *Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*

Mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi, dan pelaporan, pengendalian program dan anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan sistem informasi serta hubungan masyarakat di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan hukum dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia, komunikasi, dan informatika;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan, serta dokumentasi, publikasi dan perpustakaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

2. *Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika*

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat, dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik;
- b. penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan, penjaminan mutu, serta pendayagunaan hasil di bidang aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

4. Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi

Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan evaluasi, dan pelaporan pengembangan profesi dan sertifikasi bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sistem sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika.;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan standardisasi kompetensi, pengembangan profesi, dan pengembangan sertifikasi, serta akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan teknis di bidang komunikasi dan informatika; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan dan pelatihan manajerial, teknis, dan fungsional; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Selain unit kerja tersebut di atas, Badan Litbang SDM memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang ditetapkan melalui beberapa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu:

Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon II

➤ Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (STMM). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014,

tentang Organisasi dan Tata Kerja STMM yang dipimpin oleh Ketua STMM (setingkat Eselon II) dan memiliki tugas menyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi di bidang komunikasi dan informatika dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan organisasi STMM terdiri dari: Ketua, Pembantu Ketua, Senat, Dewan Penyantun, Satuan Pengawas Internal, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Bagian Administrasi Umum, Jurusan, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penunjang Akademik dan Kelompok Jabatan fungsional.

➤ *Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo)*

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BBPSDMP dan BPSDMP.

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo) Medan dan Makassar yang dipimpin oleh Kepala BBPSDMP kominfo, memiliki tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika di wilayah kerja dan daerah perbatasan. Susunan organisasi BBPSDMP Kominfo Medan terdiri dari : Bagian Tata Usaha, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika, Bidang Penelitian Komunikasi dan Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BBPSDMP kominfo) terdapat di Medan dan Makassar dengan wilayah kerja sebagai berikut:

Gambar 3
Wilayah Kerja BBPSDMP Kominfo

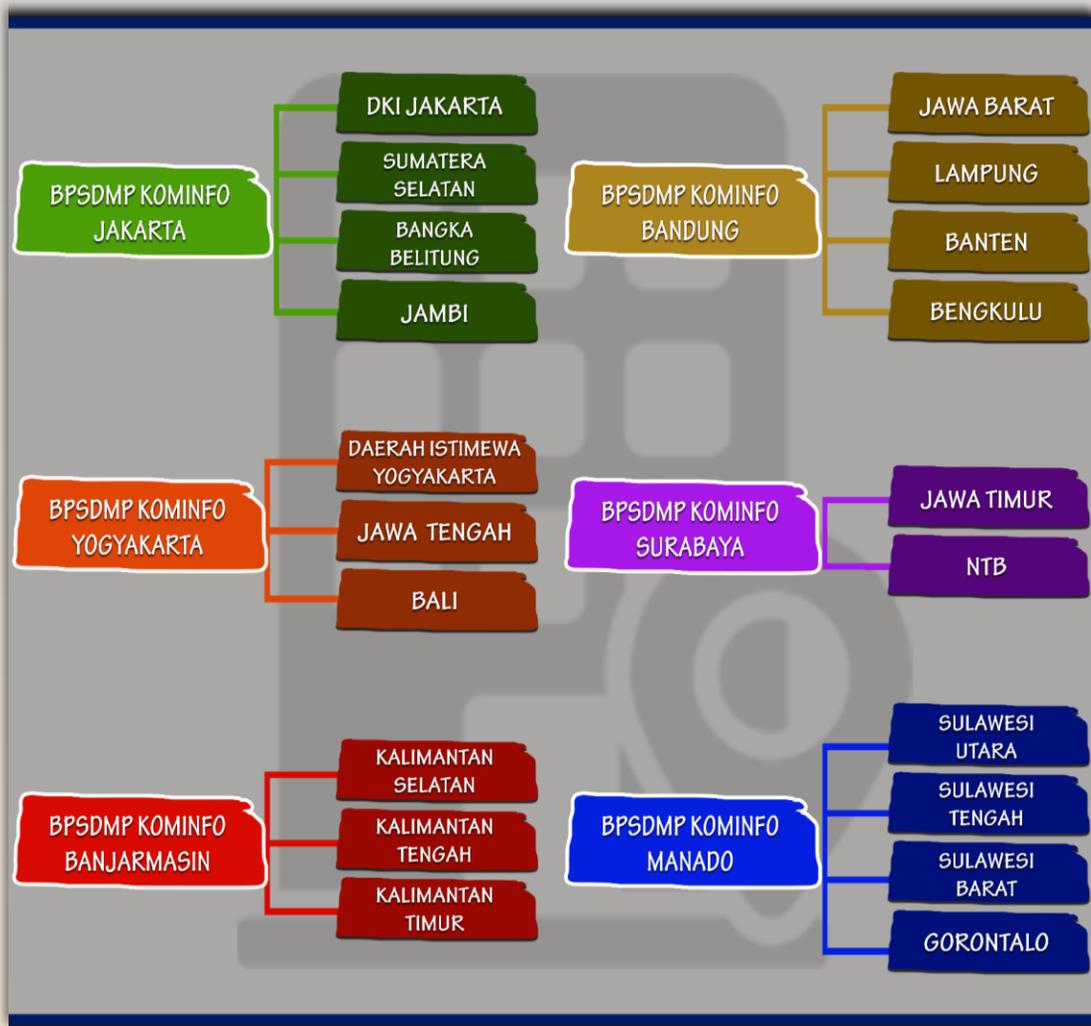


Unit Pelaksana Teknis setingkat Eselon III

➤ Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP kominfo)

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BBPSDMP dan BPSDMP. Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika (BPSDMP kominfo) terdapat di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banjarmasin, dan Manado dengan wilayah kerja sebagai berikut:

Gambar 4
Wilayah Kerja BPSDMP Kominfo



➤ Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) Cikarang

Dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK).

Berdasarkan Permenkominfo nomor 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT BPPTIK, sebagai salah satu UPT di lingkungan Badan Litbang SDM yang dipimpin oleh Kepala BPPTIK, memiliki tugas melaksanakan pelatihan, uji kompetensi, sertifikasi dan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah, serta pelayanan produk jasa di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BPPTIK juga memiliki tugas melaksanakan pelatihan (*vocational training*), uji kompetensi dan sertifikasi serta pelayanan produk jasa di bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 2668/M.PAN/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009 dan menyelenggarakan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis Bidang TIK. Susunan organisasi BPPTIK terdiri dari: Subbagian Tata Usaha, Sesi Program dan Pelaporan, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Umum, Seksi Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Kelompok Jabatan Fungsional.

SUMBER DAYA MANUSIA

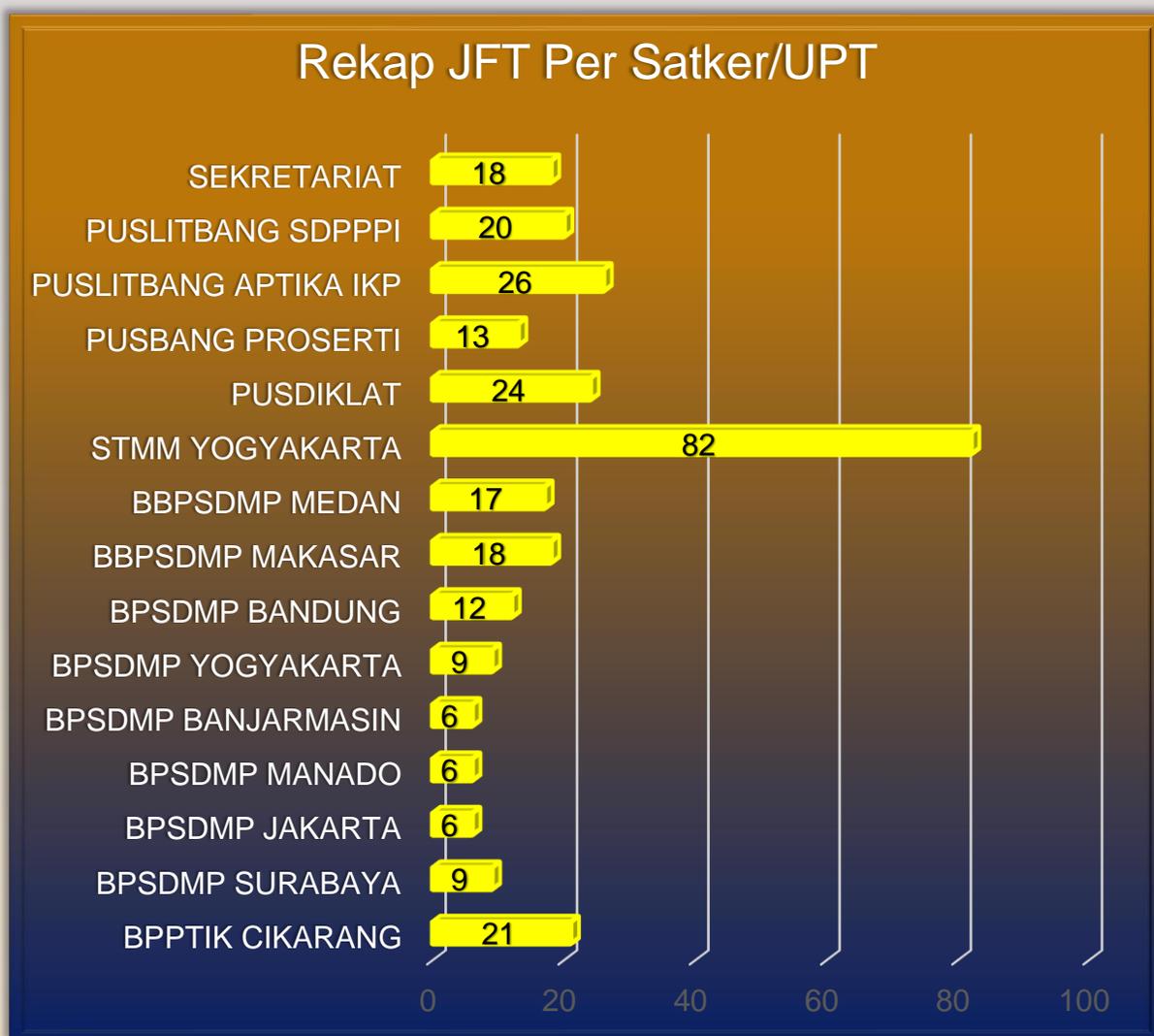


Gambar 5
Ilustrasi Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Litbang SDM didukung oleh 546 pegawai dari 15 (lima belas) Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik di lingkungan Pusat maupun daerah. Sebanyak 21 (dua puluh satu) pegawai memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada tahun 2020.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang SDM didukung oleh 523 pegawai ASN dan 207 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dari 15 (lima belas) Satuan Kerja dan Unit Pelaksana Teknis baik di lingkungan Pusat maupun daerah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mulai melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon 3 dan 4 selain Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Tercatat pelantikan pejabat structural menjadi pejabat fungsional tertentu melalui proses *inpassing* dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada Juni, Agustus, dan Oktober bagi 92 pejabat bersamaan dengan unit kerja lain. Saat ini, total Pejabat Fungsional Tertentu adalah 287 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Grafik 1
Rekap JFT Per Satker/UPT



Grafik 2
Sebaran JFT di Lingkungan Badan Litbang SDM

Sebaran JFT di Lingkungan Badan Litbang SDM



Tabel 1
Pemetaan Jabatan Fungsional Tertentu setiap Satuan Kerja

| NO | SATUAN KERJA | JENIS JFT | JUMLAH (ORANG) | TOTAL |
|----|-------------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 1 | Sekretariat | 1. Analis Anggaran | 4 | 18 Orang |
| | | 2. Analis Kebijakan | 2 | |
| | | 3. Analis PK APBN | 3 | |
| | | 4. Analis SDM Aparatur | 4 | |
| | | 5. Arsiparis | 1 | |
| | | 6. Pengelola Barjas | 1 | |
| | | 7. Pranata Humas | 1 | |
| | | 8. Pustakawan | 2 | |
| 2 | Puslibang SDPPPI | 1. Analis Kebijakan | 5 | 20 Orang |
| | | 2. Analis SDM Aparatur | 1 | |
| | | 3. Peneliti | 14 | |
| 3 | Puslitbang APTIKA | 1. Analis Anggaran | 1 | 26 Orang |
| | | 2. Analis Kebijakan | 2 | |
| | | 3. Analis PK APBN | 1 | |
| | | 4. Peneliti | 21 | |
| | | 5. Perencana | 1 | |
| 4 | Pusbang Proserti | 1. Analis Kebijakan | 4 | 13 Orang |
| | | 2. Arsiparis | 1 | |
| | | 3. Peneliti | 4 | |
| | | 4. Pengembang Teknologi Pembelajaran | 2 | |
| | | 5. Asessor | 1 | |
| | | 6. Penerjemah | 1 | |
| 5 | Pusdiklat | 1. Analis Anggaran | 1 | 24 Orang |
| | | 2. Analis PK APBN | 1 | |
| | | 3. Arsiparis | 1 | |
| | | 4. Peneliti | 1 | |
| | | 5. Pengembang Teknologi Pembelajaran | 4 | |
| | | 6. Pustakawan | 2 | |
| | | 7. Perencana | 1 | |
| | | 8. Widyaiswara | 13 | |

| NO | SATUAN KERJA | JENIS JFT | JUMLAH (ORANG) | TOTAL |
|----|--------------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| 6 | STMM | 1. Analis Anggaran | 1 | 82 Orang |
| | | 2. Analis Kebijakan | 2 | |
| | | 3. Analis SDM Aparatur | 2 | |
| | | 4. Arsiparis | 1 | |
| | | 5. Pengelola Barjas | 3 | |
| | | 6. Pranata Humas | 1 | |
| | | 7. Penganmbang Teknologi Pembelajaran | 1 | |
| | | 8. Pustakawan | 5 | |
| | | 9. Perencana | 1 | |
| | | 10. Pranata Humas | 1 | |
| | | 11. Penerjemah | 1 | |
| | | 12. Dosen | 56 | |
| | | 13. Pranata Komputer | 3 | |
| | | 14. Pranata Lab. Pendidikan | 4 | |
| | | 15. Stasisi | 1 | |
| 7 | BBPSDMP Medan | 1. Analis Kebijakan | 1 | 17 Orang |
| | | 2. Analis SDM Aparatur | 2 | |
| | | 3. Analis PK APBN | 1 | |
| | | 4. Peneliti | 13 | |
| 8 | BBPSDMP Makassar | 1. Analis SDM Aparatur | 2 | 18 Orang |
| | | 2. Peneliti | 14 | |
| | | 3. Perencana | 2 | |
| 9 | BPSDMP Bandung | 1. Analis Kebijakan | 2 | 12 Orang |
| | | 2. Analis SDM Aparatur | 2 | |
| | | 3. Peneliti | 8 | |
| 10 | BPSDMP Yogya | 1. Pranata Humas | 1 | 9 Orang |
| | | 2. Peneliti | 8 | |
| 11 | BPSDMP Banjarnasin | 1. Analis PK APBN | 1 | 6 Orang |
| | | 2. Peneliti | 5 | |

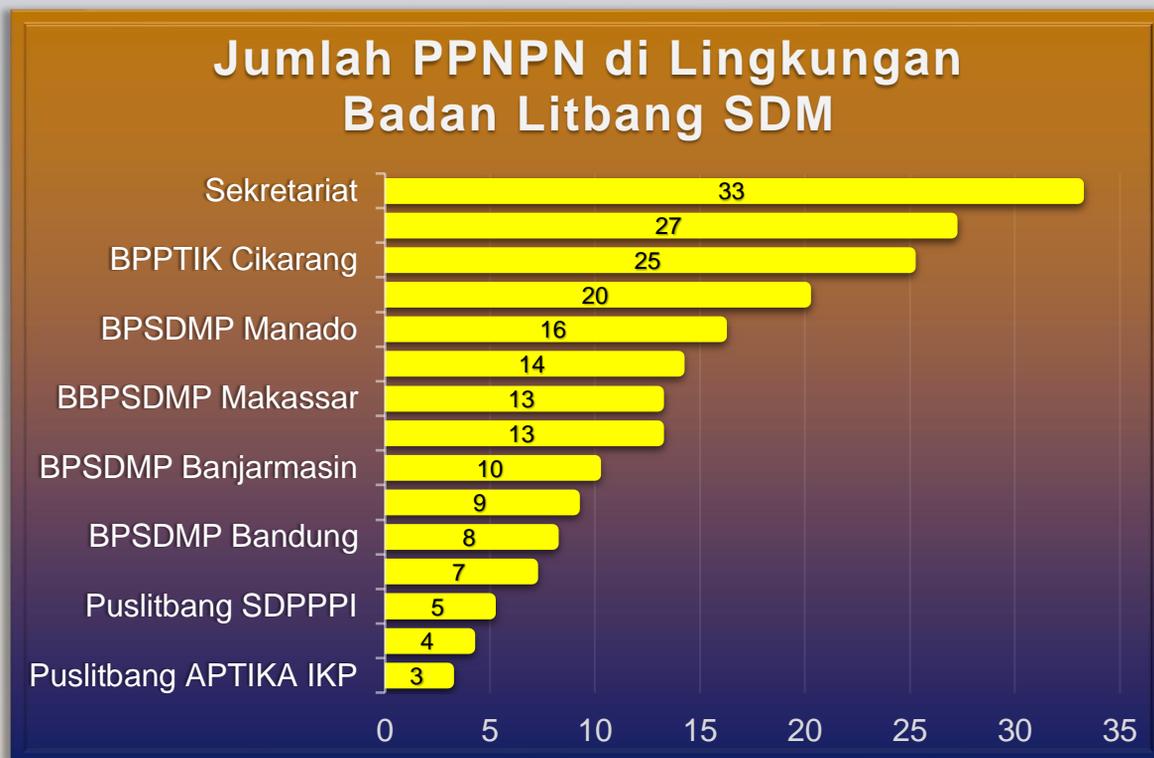
| NO | SATUAN KERJA | JENIS JFT | JUMLAH (ORANG) | TOTAL |
|----|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------|
| 12 | BPSDMP Manado | 1. Analis Kebijakan | 1 | 6 Orang |
| | | 2. Analis PK APBN | 1 | |
| | | 3. Pengelola Barjas | 1 | |
| | | 4. Peneliti | 3 | |
| 13 | BPSDMP Jakarta | 1. Analis Kebijakan | 1 | 6 Orang |
| | | 2. Peneliti | 5 | |
| 14 | BPSDMP Surabaya | 1. Analis SDM Aparatur | 1 | 9 Orang |
| | | 2. Peneliti | 8 | |
| 15 | BPPTIK Cikarang | 1. Analis PK APBN | 1 | 21 Orang |
| | | 2. Peneliti | 2 | |
| | | 3. Pengembang Teknologi Pembelajaran | 1 | |
| | | 4. Perencana | 1 | |
| | | 5. Instruktur | 16 | |

Grafik 3
Jumlah Pegawai Aktif Berdasarkan Satuan Kerja
Per-Desember 2020

Jumlah Pegawai Aktif Berdasarkan Satuan Kerja Per-Desember 2020



Grafik 4
Jumlah PPNPN di Lingkungan Badan Litbang SDM



PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA



Gambar 6
Ilustrasi Perjanjian Kinerja dan Capaian Kinerja

Untuk menjalankan Rencana Strategis, Kementerian menyusun Perjanjian Kinerja yang bersifat tahunan untuk mendukung pencapaian Rencana Strategis 5 Tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan kesepakatan kinerja yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab.

Apabila diturunkan dari Perjanjian Kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika, maka Badan Litbang SDM mendukung Sasaran Strategis 3, “Peningkatan Ketersediaan SDM Talenta Digital dalam Rangka Transformasi Digital” dengan Indikator Kinerja Menteri 3.1 dan 3.2.

Gambar 7
Indikator Kinerja Menteri 3.1 dan 3.2



Dari Renstra Kementerian tersebut, dilakukan *cascading* menjadi Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM.

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020 merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji kinerja Badan Litbang SDM yang jelas dan terukur selama tahun 2020 dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020 merupakan implementasi dari Sasaran Program dan Indikator Kinerja dari Kementerian.

Tujuan perjanjian kinerja ini adalah untuk menjadi tolak ukur kinerja Badan Litbang SDM sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan dasar pemberian *reward* atau penghargaan serta sanksi atau *punishment*.

Perjanjian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020 memiliki 3 (tiga) Sasaran Program dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja dengan Perjanjian dan Capaian Kinerja yang dapat dilihat pada matriks sebagai berikut:

Gambar 8
3 (tiga) Sasaran Program Perjanjian Kinerja
Badan Litbang SDM Tahun 2020



Tabel 2
Perjanjian dan Capaian Kinerja Badan Litbang SDM Tahun 2020
 (uraian dan deskripsi Perjanjian dan Capaian Kinerja lebih lengkap dapat dilihat pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan/LAKIP Badan Litbang SDM Tahun Anggaran 2020)

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM | TARGET 2020 | CAPAIAN 2020 | % |
|-----|---|---|-------------|--------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dimanfaatkannya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika | Persentase (%) Hasil Penelitian untuk Mendukung Kebijakan dan Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika. | 60% | 100% | 166,67% |
| 2 | Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika | 1. Jumlah Peserta yang Ditingkatkan Kompetensinya Melalui Pelatihan Dan/Atau Sertifikasi Dalam Program <i>Digital Talent Scholarship</i> (DTS) | 45.000 | 58.116 | 129,15% |
| | | 2. Persentase (%) Peserta <i>Digital Talent Scholarship</i> dari Kategori <i>Fresh Graduate Academy & Vocational School Graduate Academy</i> yang Tersertifikasi Difasilitasi agar Dapat Diserap Industri | 20% | 33,7% | 168,5% |
| | | 3. Persentase (%) Tingkat Kelulusan ASN yang Mengikuti Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis | 90% | 95,5% | 106,11% |

| NO | SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM | TARGET 2020 | CAPAIAN 2020 | % |
|-----|---|--|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 3 | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Badan Litbang SDM. | 1. Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Badan Litbang SDM | 76,5 | 91,71 | 120,67% |
| | | 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Badan Litbang SDM | 67 | 67,20 | 100,3% |
| | | 3. Persentase (%) Batas Tertinggi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Litbang SDM Tahun 2019 Dibandingkan Total Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2019 | 1% | 0.013 | 100% |
| | | 4. Persentase (%) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK di Badan Litbang SDM Berdasarkan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Oleh BPK dan ITJEN | a. Tahun berjalan: 70% a. Tahun sebelumnya: 30% | a. Tahun berjalan: 100% a. Tahun sebelumnya: 30% | 100% |
| | | 5. Nilai Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM | 86 | 92,75 | 107,85% |

KINERJA KEUANGAN



Gambar 9
Ilustrasi Kinerja Keuangan

Alokasi anggaran awal Badan Litbang SDM tahun 2020 sebesar Rp 522.287.750.000,-. Dalam perjalanan selama Tahun Anggaran 2020, telah diproses 5 (lima) kali proses revisi tingkat DJA baik itu penambahan maupun pemotongan, sehingga alokasi anggaran Badan Litbang SDM di akhir TA 2020 adalah menjadi Rp 304.801.530.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Alokasi Anggaran Badan Litbang SDM di Akhir TA 2020

| No | Satuan Kerja | Pagu Per Jenis Belanja | | | | | Total Pagu |
|----|--|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | 51 Belanja Pegawai | 51 Belanja Barang | | 53 Belanja Modal | 57 Belanja Bantuan Sosial | |
| | | | OPS | Non OPS | | | |
| 1 | Badan Litbang SDM: • Set BLSDM • Puslitbang SDPPPI • Puslitbang APTIKA IKP • Pusbang Proserti • Pusklat | 30.636.904.000 | 18.956.959.000 | 108.898.548.000 | 15.067.477.000 | - | 173.559.888.000 |
| 2 | STMM Yogyakarta | 26.288.255.000 | 7.187.205.000 | 12.011.437.000 | 13.002.524.000 | - | 58.489.421.000 |
| 3 | BBPSDMP Medan | 5.429.987.000 | 1.907.732.000 | 2.595.201.000 | 728.636.000 | - | 10.661.556.000 |

| No | Satuan Kerja | Pagu Per Jenis Belanja | | | | | Total Pagu |
|--------|--------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | 51 Belanja Pegawai | 51 Belanja Barang | | 53 Belanja Modal | 57 Belanja Bantuan Sosial | |
| | | | OPS | Non OPS | | | |
| 4 | BBPSDMP Makassar | 6.377.401.000 | 2.462.590.000 | 2.130.588.000 | 324.327.000 | - | 11.294.906.000 |
| 5 | BPSDMP Jakarta | 2.414.070.000 | 1.244.599.000 | 1.338.233.000 | 76.852.000 | - | 5.073.754.000 |
| 6 | BPSDMP Bandung | 4.294.314.000 | 993.190.000 | 1.264.186.000 | 373.875.000 | - | 6.925.565.000 |
| 7 | BPSDMP Yogyakarta | 4.138.927.000 | 823.517.000 | 1.037.430.000 | 428.269.000 | - | 6.428.143.000 |
| 8 | BPSDMP Surabaya | 3.577.058.000 | 1.296.953.000 | 1.744.764.000 | 368.606.000 | - | 6.987.381.000 |
| 9 | BPSDMP Banjarmasin | 2.254.361.000 | 923.928.000 | 978.276.000 | 149.140.000 | - | 4.305.705.000 |
| 10 | BPSDMP Manado | 2.644.835.000 | 1.778.312.000 | 670.754.000 | 618.213.000 | - | 5.712.114.000 |
| 11 | BPPTIK | 3.781.693.000 | 5.936.983.000 | 2.651.336.000 | 2.993.085.000 | - | 15.363.097.000 |
| JUMLAH | | 91.837.805.000 | 43.511.968.000 | 135.320.753.000 | 34.131.004.000 | - | 304.801.530.000 |

Berikut pembagian porsi belanja berdasarkan sumber dana (RM atau PNBP):

Tabel 4
Pembagian Porsi Belanja Berdasarkan Sumber
Dana (RM atau PNBP)

| No | SATKER | Belanja Pegawai | Belanja Operasional | Belanja Non Operasional (PNBP) | Belanja Non Operasional RM | Total Keseluruhan |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1 | Set. Badan Litbang SDM | 30.636.904.000 | 18.556.919.000 | - | 24.962.182.000 | 74.156.005.000 |
| 2 | Puslitbang Aptika dan IKP | - | - | - | 1.786.044.000 | 1.786.044.000 |
| 3 | Puslitbang SDPPPI | - | - | - | 1.943.852.000 | 1.943.852.000 |
| 4 | Pusbang Profesi dan Sertifikasi | - | - | 71.264.000.000 | 15.271.348.000 | 86.535.348.000 |
| 5 | Pusdiklat | - | - | 1.456.768.000 | 7.681.871.000 | 9.138.639.000 |

| No | SATKER | Belanja Pegawai | Belanja Operasional | Belanja Non Operasional (PNBP) | Belanja Non Operasional RM | Total Keseluruhan |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 6 | STMM | 26.288.255.000 | 7.187.205.000 | 16.178.900.000 | 8.835.061.000 | 58.489.421.000 |
| 7 | BBPSDMP Medan | 5.429.987.000 | 1.907.732.000 | - | 3.323.837.000 | 10.661.556.000 |
| 8 | BBPSDMP Makassar | 6.377.401.000 | 2.462.590.000 | - | 2.454.915.000 | 11.294.906.000 |
| 9 | BPSDMP Jakarta | 2.414.070.000 | 1.244.599.000 | - | 1.415.085.000 | 5.073.754.000 |
| 10 | BPSDMP Bandung | 4.294.314.000 | 993.190.000 | - | 1.638.061.000 | 6.925.565.000 |
| 11 | BPSDMP Yogyakarta | 4.138.927.000 | 823.517.000 | - | 1.465.699.000 | 6.428.143.000 |
| 12 | BPSDMP Surabaya | 3.577.058.000 | 1.296.953.000 | - | 2.113.370.000 | 6.987.381.000 |
| 13 | BPSDMP Banjarmasin | 2.254.361.000 | 923.928.000 | - | 1.127.416.000 | 4.305.705.000 |
| 14 | BPSDMP Manado | 2.644.835.000 | 1.778.312.000 | - | 1.288.967.000 | 5.712.114.000 |
| 15 | BPPTIK Cikarang | 3.781.693.000 | 5.936.983.000 | 305.922.000 | 5.338.499.000 | 15.363.097.000 |
| Total | | 91.837.805.000 | 43.111.928.000 | 89.205.590.000 | 80.646.207.000 | 304.801.530.000 |

Adapun proses revisi yang terjadi di tingkat Eselon 1 BLSDM secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kominfo tanggal 14 April 2020 Nomor:520/SJ.1/PR.01.01/04/2020 perihal Penyesuaian Postur Anggaran, maka dilakukan **pemotongan anggaran** untuk program terkait penanganan Covid-19, sejumlah Rp 150.454.274.000,-. Revisi tahap pertama ini juga termasuk proses penggunaan akun covid.
2. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BLSDM tanggal 26 Mei 2020 Nomor:B-414/BLSDM.1/KU.01.02/05/2020 perihal Usulan Revisi Anggaran, maka dilakukan **pemotongan anggaran** alokasi pagu sumber PNBPN (yang berasal dari satker penghasil Ditjen SDPPI) sebesar Rp30.000.000.000,- dari Pusbang Proserti BLSDM ke Ditjen Aptika.



3. Revisi pada bulan Agustus 2020 atas **penambahan pagu** anggaran Belanja Pegawai atas kenaikan nilai Tunjangan Kinerja 80% berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 22 Januari 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemkominfo, yang diajukan permohonannya ke Kementerian Keuangan atas Nodin Menteri Kominfo Nomor: B-263/M.KOMINFO/KU.01.02/04/2020 perihal Permohonan untuk Memenuhi Kekurangan Belanja Pegawai Kemkominfo TA 2020, untuk lingkup E1 BLSDM menerima tambahan senilai Rp13.269.669.000,-

Proses revisi pada aplikasi SAKTI ke SatuDJA pada periode ini juga sekaligus proses pengalihan pagu dari anggaran belanja barang menjadi pagu belanja modal senilai Rp1.791.961.000,-

4. Pada bulan September 2020 terjadi revisi **pemotongan anggaran** sebesar Rp52.401.700.000,- dengan dasar Nota Dinas Kepala Badan Litbang SDM Nomor: 80/BLSDM/PR.01.01/8/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Sisa Anggaran Program Digital Talent Scholarship Tahun 2020 yang bersumber dari PNBP, untuk keperluan alokasi anggaran unit Eselon 1 lainnya menyesuaikan prioritas kebutuhan yang diatur oleh Sekretariat Jenderal.

Proses revisi pada aplikasi SAKTI ke SatuDJA pada periode ini juga sekaligus proses pengalihan pagu dari anggaran belanja barang menjadi pagu belanja modal senilai Rp200.000.000,-

5. Pada bulan Oktober 2020 terjadi revisi anggaran **penambahan pagu** sebesar Rp2.100.085.000,- yang didasarkan atas Nota Dinas Sekretaris BLSDM Nomor : B-1106A/BLSDM/KU.01.02/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal Usulan Revisi Anggaran Badan Litbang SDM, dengan adanya pengesahan penerimaan hibah luar negeri dalam bentuk uang dari KOICA ke satker BPPTIK Cikarang.

Hibah untuk nama project "IT Management Support for ICT Training and Development Centre dengan nomor register 2TLBX4QA.

Nilai hibah yang diperoleh pada TA 2020 dari KOICA terbagi senilai Rp100.000.000,- untuk Belanja Barang, dan untuk Belanja Modal adalah senilai Proses revisi pada aplikasi SAKTI ke SatuDJA pada periode ini juga sekaligus proses pengalihan pagu dari anggaran belanja barang menjadi pagu belanja modal senilai Rp200.000.000,-



Dari pagu akhir TA 2020 sebesar Rp 304.801.530.000,- realisasi anggaran Badan Litbang SDM adalah sebesar Rp 271.407.492.196,- sehingga persentase capaian realisasi anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2020 adalah sekitar 89,04% dengan rincian realisasi berikut:

Tabel 5
Capaian Realisasi Anggaran Badan Litbang SDM Tahun 2020

| No | Jenis Belanja | Pagu | Realisasi | % |
|---------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Pegawai (51) | 91.837.805.000 | 87.790.302.998 | 95,59% |
| 2 | Barang (52) | 178.832.866.000 | 149.748.811.863 | 83,74% |
| 3 | Modal (53) | 34.130.859.000 | 33.868.377.335 | 99,23% |
| Jumlah | | 304.801.530.000 | 271.407.492.196 | 89,04% |

Adapun rincian realisasi pada tiap satker/UPT dapat dilihat pada Lampiran 2: Kinerja Realisasi Satuan Kerja/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM TA 2020. Realisasi penggunaan anggaran di Badan Litbang SDM di TA 2020 tidak optimal dikarenakan beberapa hal diantaranya :

1. Realisasi belanja pegawai di satker Instansi Pusat Badan Litbang SDM hanya mencapai 92,80% dari pagu bahkan setelah penambahan dari BA BUN Kementerian Keuangan atas dasar Perpres Nomor 3 tahun 2020 tentang Kenaikan Tunjangan Kinerja Kementerian Kominfo 80%. Kekurangcermatan dalam proses penghitungan kebutuhan anggaran belanja pegawai yang dipersiapkan, terkait adanya beberapa posisi jabatan struktural yang masih kosong (dirangkap) serta tidak tepatnya perhitungan dalam persiapan besarnya nilai fungsional atas beberapa proses perpindahan Pejabat struktural ke jabatan fungsional (Widyaiswara Utama).

2. Realisasi belanja barang di Pusdiklat hanya mencapai 68,93% dari pagu, terutama dari sumber anggaran PNBPN. Dengan alasan situasi kondisi Pandemi Covid-19 pelatihan Tatap Muka tidak dapat dilakukan sehingga harus dilaksanakan secara Online, Pusdiklat belum dapat menyelenggarakan pelatihan Pranata Humas secara Online dikarenakan belum ada kurikulum dan modul untuk pelatihan berbasis online. Sesuai arahan Permenkominfo tentang JFT Pranata Humas, kewenangan kurikulum dan modul ada di IKP, selama belum ada versi online pusdiklat tidak dapat menyelenggarakan (khusus pelatihan pranata humas saja), sementara untuk pelatihan lain di PP PNBPN belum dapat dijalankan karena pola tarif yang belum sesuai (sudah diusulkan di PP PNBPN baru).

4. Pandemi Covid-19 di Tahun Anggaran 2020 juga menyebabkan realisasi belanja barang (52) pada satker STMM Yogyakarta hanya mampu mencapai angka 73,48% dibandingkan pagu anggaran. Proses peralihan perkuliahan tatap muka (termasuk masa orientasi perkuliahan, proses ujian, dan perayaan wisuda kelulusan mahasiswa) berubah menjadi system online, mengakibatkan beberapa pos anggaran tidak dapat terserap secara optimal.

5. Pusbang Proserti yang menjadi satuan kerja penyelenggara kegiatan DTS (Digital Talent Scholarship) yang juga tidak dapat memberikan kinerja yang optimal, dengan tingkat penyerapan anggaran belanja barang hanya mencapai 75,51% dari pagu.

6. Alasan secara umum adalah perubahan dari sistem pelatihan offline menjadi online menyebabkan target-target penganggaran tidak terealisasi pada masa pandemi Covid-19. Perubahan pola offline menjadi online mengurangi banyak porsi biaya perjalanan dinas panitia pengajar dan peserta, honor pengajar dan belanja bahan, bahkan khusus Online Academy (OA) hampir dapat dikatakan tidak mengeluarkan biaya hanya pengalokasi jasa profesi untuk pengajar dari Global Tech Company. Alasan lainnya adalah alokasi biaya sosialisasi dan publikasi DTS 2021 ke daerah 99% tidak terpakai sama sekali. Selama masa pandemi Covid-19 ini, jumlah peminat peserta pelatihan dan juga untuk mengikuti sertifikasi dalam program DTS rendah apabila dibandingkan dalam situasi normal.



- Selama Tahun Anggaran 2020, satker Instansi Pusat BLSDM untuk unit Pusbang Proserti telah menerima 2 (dua) MP dari satker penghasil Ditjen SDPPI untuk dukungan anggaran sumber PNBPN di kegiatan DTS, dengan perincian sebagai berikut :

Gambar 10
MP dari satker penghasil Ditjen SDPPI untuk dukungan
anggaran sumber PNBPN di kegiatan DTS

01

MP Pertama adalah atas dasar Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-64/PB/2020 tanggal 31 Agustus 2020 senilai :

Rp 7.665.700.000,-

02

MP kedua adalah atas dasar Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor : SE-84/PB/2020 tanggal 08 Oktober 2020 senilai :

Rp 63.598.300.000,-

Secara umum kinerja dan capaian kinerja Badan Litbang SDM tahun 2020 yang dihasilkan telah diimplementasikan secara maksimal dan dilaksanakan secara optimal. Namun demikian masih tetap diperlukan optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada T-1 atau selambat-lambatnya di awal tahun berjalan.
- Perlunya pengambilan keputusan yang bijaksana dan strategis dan puncak pimpinan dan level pengambil keputusan untuk metode pelatihan online, sebagai adaptasi keharusan peralihan dalam menghadapi situasi pandemi ini. Karena perubahan pola pelatihan dari tatap muka menjadi daring menghasilkan banyak perubahan dalam mekanisme dan struktur pembiayaan, serta fleksibilitas bentuk anggaran yang bisa dilakukan.

3.

Pola pencairan dana program/kegiatan yang bersumber dari dana PNB unit kerja Ditjen SDPPI sebagai satu-satunya satker Penghasil pada kegiatan DTS di TA 2020 dapat dikatakan telah berjalan optimal, karena MP terbit pada semester ketiga (31 Agustus 2020) lalu pada awal semester keempat (08 Oktober 2020). Sehingga dapat dikatakan tidak ada permasalahan dalam metode penyiapan dana.

4.

Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-447/PB/2020 tanggal 20 Mei 2020 perihal Pengaturan Pengajuan SPM ke KPPN pada Masa Darurat Covid-19, mekanisme pengajuan pencairan diutamakan dengan mekanisme TUP (Tambah Uang Persediaan) rutin bulanan, berimplikasi pada metode kerja para pengelola keuangan yang harus bertanggung jawab dan bekerja sama dengan melihat satuan kerja sebagai "Tim Besar" dalam proses pengajuan SPM sampai tahapan penyerahan dokumen pertanggungjawaban keuangan. Dalam situasi pola kerja *Flexible Working Space* (FWS) di Tahun 2020, masih perlu banyak pembenahan.

5.

Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat pada tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor : S-864/PB/2020 perihal Digitalisasi Dokumen Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Dalam Rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2020, yang berimplikasi pada perubahan pola kerja alur dokumen keuangan menjadi versi digital sesuai dengan permintaan/surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI Nomor 236/S/XV/11/2020. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan selama Tahun Anggaran 2020, sampai dengan tahapan penyusunan Laporan Keuangan Unaudited, partisipasi PPK dalam penyelesaian digitalisasi dokumen pertanggungjawaban keuangan masih perlu ditingkatkan kesadarannya.

6.

Kinerja Keuangan bilamana hanya melihat di tataran angka nilai persentase penyerapan memang sudah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan baik, tetapi alangkah lebih arifnya apabila tingkat keberhasilan pencapaian suatu satuan kerja juga turut mempertimbangkan nilai perangkat ASN-nya selaku sumber daya manusia yang terlindungi dari resiko pandemi



Berikut kinerja anggaran Badan Litbang SDM dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020:

Tabel 6
Kinerja Anggaran Badan Litbang SDM dari Tahun 2015
Sampai Dengan Tahun 2020

| KINERJA | TAHUN | | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Pagu Awal (Rp) | 199.752.100.000 | 19.713.480.000 | 261.466.700.000 | 220.358.878.000 | 263.470.629.000 | 522.287.750.000 |
| Pagu Revisi (Rp) | 272.071.383.000 | 193.132.363.000 | 246.005.068.000 | 223.414.117.000 | 385.488.751.000 | 304.801.530.000 |
| Realisasi (Rp) | 240.825.191.629 | 177.338.522.514 | 234.963.182.466 | 212.708.473.582 | 354.473.239.980 | 271.407.492.196 |
| Realisasi (%) | 88,52% | 91,82% | 95,51% | 95,21% | 91,95% | 89,04% |

SARANA PRASARANA



Gambar 11
Ilustrasi Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Litbang SDM yang berupa Barang Milik Negara sampai dengan 31 Desember 2020 mempunyai nilai total perolehan sebesar Rp. 1.890.165.395.733,-. Sarana dan prasarana tersebut terdiri dari:

1. Tanah sebanyak 90.930 m2 dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 1.479.406.438.000,-.
2. Gedung dan Bangunan sebanyak 92 unit dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 177.692.808.406,-.
3. Peralatan dan Mesin sebanyak 31.840 buah dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 218.394.434.945,-. Peralatan dan Mesin ini merupakan perlengkapan kantor baik berupa alat pengolah data maupun inventaris kantor yang menunjang kegiatan Badan Litbang SDM.
4. Jalan dan Jembatan sebanyak 5.790 m2 dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 775.135.000,- yang berupa Jalan Khusus Komplek yang terdapat di BPPTIK Cikarang.
5. Irigasi sebanyak 8 unit dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 512.116.820,- yang berupa Bak Penyimpanan/Tower Air Baku yang terdapat di STMM Yogyakarta dan Pusdiklat.
6. Jaringan sebanyak 14 unit dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 1.957.518.355,- yang berupa Instalasi Gardu Listrik Lainnya, Jaringan Listrik Lainnya, Jaringan Telepon Lainnya, Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA, Instalasi Lain-Lain, Jaringan Rumah Tangga, Susur Gali, Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedang, Instalasi Gardu Listrik Induk Lainnya dan Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang yang terdapat di Sekretariat Badan Litbang SDM, BBPSDMP Kominfo Makassar, BPSDMP Kominfo Banjarmasin, BPSDMP Kominfo Manado, BPSDMP Kominfo Yogyakarta, STMM Yogyakarta dan BPPTIK Cikarang.
7. Aset Tetap Lainnya sebanyak 41.436 buah dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 4.588.735.621,-. Aset Tetap Lainnya ini berupa Monografi, Referensi, Laporan, CD/VCD/DVD/LD dan Bahan Kartografi Lainnya.
8. Aset Tak Berwujud sebanyak 863 buah dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 4.629.239.832,-. Aset Tak Berwujud ini terdiri dari Software Komputer, Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya.
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan nilai perolehan sebesar Rp. 74.800.000,- yang terdapat di BPPTIK Cikarang.
10. Barang Persediaan dengan nilai total sebesar Rp. 1.782.112.767,-.

Tabel 7
Distribusi Kendaraan Dinas Badan Litbang SDM

| No | Satuan Kerja | Kendaraan Dinas | |
|----|----------------------------|-----------------|---------------|
| | | Roda 4 (Unit) | Roda 2 (Unit) |
| 1 | Badan Litbang SDM Pusat | 20 | 21 |
| 2 | BPSDMP Kominfo Bandung | 2 | 1 |
| 3 | BPSDMP Kominfo Jakarta | 1 | 2 |
| 4 | BPSDMP Kominfo Yogyakarta | 2 | 2 |
| 5 | STMM Yogyakarta | 20 | 4 |
| 6 | BPPTIK Cikarang | 6 | 4 |
| 7 | BPSDMP Kominfo Surabaya | 2 | 3 |
| 8 | BPSDMP Kominfo Banjarmasin | 3 | 4 |
| 9 | BPSDMP Kominfo Manado | 1 | 4 |
| 10 | BBPSDMP Kominfo Makassar | 2 | 2 |
| 11 | BBPSDMP Kominfo Medan | 4 | 6 |



AKREDITASI KELEMBAGAAN

Akreditasi adalah suatu pengakuan formal yang diberikan oleh badan akreditasi terhadap kompetensi suatu lembaga atau organisasi. KBBI mengartikan akreditasi sebagai pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya.

Mendapat akreditasi dari Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP) merupakan pengakuan formal atas kemampuan melaksanakan litbang sesuai tugas dan fungsi, visi dan misi, mutu keluaran hasil litbang, efisiensi dan kinerja. Akreditasi KNAPP adalah akreditasi yang khusus diberikan kepada lembaga litbang. Tujuan akreditasi pranata penelitian dan pengembangan adalah sebagai evaluasi instrument pranata litbang, koordinasi kegiatan litbang, instrumen pembinaan pranata litbang, instrumen pengakuan pranata litbang yang kompeten dibidangnya, dan instrumen memberikan kepercayaan kepada masyarakat atas kompetensi pranata litbang. Satker dan UPT di lingkungan Badan Litbang SDM berusaha semaksimal mungkin memenuhi persyaratan akreditasi kelembagaan yang ditetapkan KNAPPP untuk mendapat akreditasi.

Selain akreditasi pranata litbang, akreditasi lembaga diklat juga perlu mendapatkan pengakuan dari instansi pembina seperti Pusdiklat dan BPPTIK Cikarang sebagai satker yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mendapatkan akreditasi dari LAN, dan STMM Yogyakarta mendapatkan akreditasi dari BAN-PT.



Gambar 12
Ilustrasi Akreditasi Kelembagaan



Berikut rincian akreditasi kelembagaan satker/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM:

Tabel 8
Rincian Akreditasi Kelembagaan Satker/UPT di Lingkungan
Badan Litbang SDM

| No | Satuan Kerja | Akreditasi |
|----|------------------------|---|
| 1 | Pustlitbang APTIKA IKP | Terakreditasi KNAPPP mulai 26 September 2020 s.d 25 September 2022 SK Ketua KNAPPP Nomor: 18/Kp/KA-KNAPPP/IX/2020, dengan ruang lingkup 14.04 (TIK: Teknik Sistem Informasi) dan 34.04 (Ilmu Komunikasi: Komunikasi Media) |
| 2 | Pustlitbang SDPPPI | Terakreditasi KNAPPP (memenuhi Pedoman KNAPPP 02:2017) SK Ketua KNAPPP No. 17/Kp/KA-KNAPPP/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 |
| 3 | STMM Yogyakarta | Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 27 Desember 2018 s.d 27 Desember 2021 Prodi : - Manajemen Pemberitaan : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 30 Mei 2015 s.d 30 Mei 2020 - Manajemen Produksi Siaran : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 6 April 2015 s.d 6 April 2020 - Manajemen Studio Produksi Siaran : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 22 Juni 2015 s.d 22 Juni 2020 - Animasi : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 24 Juli 2015 s.d 24 Juli 2020 - Teknologi Permainan : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 22 Juni 2015 s.d 24 Juni 2020 - Manajemen Informasi Komunikasi : Terkreditasi B oleh BAN-PT sejak 22 Agustus 2017 s.d 22 Agustus 2022 |

| No | Satuan Kerja | Akreditasi |
|----|-------------------|---|
| 4 | Pusdiklat | Terakreditasi LAN : - Akreditasi Diklat Kepemimpinan Tingkat III, IV dan Pelatihan Dasar CPNS dengan kategori "C" dari 7 November 2020 s.d November 2021 - Akreditasi Pelatihan Fungsional Bidang Komunikasi dan Informatika dengan status "Pendelegasian Wewenang" dari 10 Juli 2020 s.d Juli 2024 |
| 5 | BPPTIK | Terkreditasi A oleh LAN, berlaku selama 5 tahun dr TA 2016-2020 Pendelegasian Kewenangan Pengakreditasi Diklat Teknis TIK: Pengakreditasi: Balitbang SDM Masa akreditasi: 2 tahun (C) 3 tahun (B) 5 tahun (A) |
| 6 | BBPSDMP Medan | Terakreditasi KNAPPP mulai 29 Nov 2018 s.d 28 Nov 2021 |
| 7 | BBPSDMP Makassar | Terakreditasi KNAPPP mulai 29 Nov 2018 s.d 28 Nov 2021 |
| 8 | BPSDMP Jakarta | Terakreditasi KNAPPP |
| 9 | BPSDMP Bandung | Terakreditasi KNAPPP mulai 22 Agustus 2020 s.d 21 Agustus 2022 |
| 10 | BPSDMP Yogyakarta | Terakreditasi KNAPPP mulai 12 April 2018 s.d 11 April 2021 Terakreditasi ISO 9001:2015 |
| 11 | BPSDMP Surabaya | Terakreditasi KNAPPP mulai 14 Maret 2020 s.d 13 Maret 2022 |
| 12 | BPSDMP Manado | Terakreditasi KNAPPP mulai 16 Mei 2020 s.d 15 Mei 2022 |



PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Kebijakan pemerintah yang berdasarkan hasil riset dan kajian adalah penting dimana kebijakan tersebut memiliki pondasi kontekstual yang kokoh untuk menjawab tantangan kekinian dan masa depan. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo berupaya menumbuhkembangkan iklim penelitian dan pengembangan di bidang kominfo dan menghasilkan kebijakan/regulasi yang berlandaskan pada hasil kajian/riset. Oleh karena itu, tidak hanya melakukan penelitian *long-term* dan *short-term*, kami juga berusaha *catch up* dengan isu terkini dengan menghadirkan *policy brief* yang diharapkan dapat menjadi pijakan pengambilan keputusan/kebijakan.

Berikut adalah daftar judul penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Litbang SDM pada tahun 2020.

Gambar 13
Judul Penelitian yang Dilaksanakan oleh Badan Litbang
SDM pada Tahun 2020



Puslitbang SDPPPI

1. Penyusunan Standar Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos.
2. Grand Design Penomoran Televisi Digital Free-to-Air Indonesia.
3. Studi Kebijakan Penomoran Internet of Things/Machine to Machine Communications di Indonesia.

Puslitbang APTIKA IKP

1. Kesiapan Implementasi Big Data Pemerintah.
2. Pengembangan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Implementasi, Nilai-nilai Pancasila.
3. Efektivitas Multi Kanal dalam Diseminasi Informasi Kebijakan Publik.



Tabel 9
Penelitian Aspirasi Daerah

| No | UPT | Akreditasi |
|----|--------------------|--|
| 1 | BBPSDMP Makassar | <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Literasi TIK ASN Kabupaten Wajo • Survei tingkat literasi ASN pengelola TIK Kota Palopo • Penelitian Strategi Humas Sebagai Mediator Pemerintah dan Masyarakat |
| 2 | BBPSDMP Medan | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Analisis Strategi TIK SUMUT Smart Province menggunakan kerangka Kerja COBIT • Manajemen Komunikasi PEMPROPSU untuk Meningkatkan partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola SUMUT Smart Province |
| 3 | BPSDMP Jakarta | <ul style="list-style-type: none"> • Studi Efektivitas Kegiatan Pengembangan SDM di BPSDMP Kominfo Jakarta |
| 4 | BPSDMP Bandung | <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengetahuan Smart City di Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu • Literasi digital penyandang disabilitas di kota Bandung |
| 5 | BPSDMP Yogyakarta | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Implementasi Smart City yang berkelanjutan di Kabupaten Tegal |
| 6 | BPSDMP Surabaya | <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Tata Kelola Start Up Pasar di Kabupaten Jember |
| 7 | BPSDMP Banjarmasin | <ul style="list-style-type: none"> • Survey kepercayaan, keamanan, dan <i>privacy</i> aplikasi meeting (review laporan akhir, selesai target Desember) • Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung E-commerce di Kalimantan Selatan |
| 8 | BPSDMP Manado | <ul style="list-style-type: none"> • Survei Preferensi Masyarakat Mengakses Informasi Program Pemerintah Sulawesi Utara dalam rangka Penyusunan Strategi Komunikasi Diseminasi Informasi |

Untuk memastikan hasil Penelitian tepat sasaran, bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti oleh *stakeholders*, Badan Litbang SDM telah mendapatkan masukan judul Penelitian dari satker *user* yang akan menggunakan hasil Penelitian agar hasil penelitian tepat guna dan tepat sasaran serta dapat langsung digunakan menjadi landasan kebijakan. Dengan target 60% Penelitian bermanfaat untuk menjadi kebijakan, maka minimal 4 (empat) Penelitian harus dinilai Bermanfaat oleh *stakeholders*.

Setelah Penelitian selesai di penghujung tahun 2020, Laporan Penelitian diedarkan ke *stakeholders* untuk menilai kebermanfaatannya hasil penelitian apakah dapat menjadi acuan pengambilan keputusan/kebijakan. Berikut merupakan rekap kuesioner *feedback* Penelitian:

Tabel 10
Feedback Penelitian Badan Litbang SDM Tahun 2020

| No | Judul | Stakeholder | Bermanfaat (√) Tidak (x) |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | Penyusunan Standar Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos (Long Study) | <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Direktorat Pos (Ditjen PPI) | √ |
| 2. | Grand Design Penomoran Televisi Digital Free-to-Air Indonesia (Short Study) | <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Pos (Ditjen PPI) Direktorat Telekomunikasi (Ditjen PPI) | √ |
| 3. | Studi Kebijakan Penomoran Internet of Things/Machine to Machine Communications di Indonesia (Short Study) | Direktorat Telekomunikasi (Ditjen PPI) | √ |
| 4. | Kesiapan Implementasi Big Data Pemerintah (Long Study) | Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Ditjen Aptika) | √ |

| No | Judul | Stakeholder | Bermanfaat (√) Tidak (x) |
|----|---|---|-----------------------------|
| 5. | Pengembangan Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Implementasi, Nilai-nilai Pancasila (Long Study) | <ul style="list-style-type: none"> Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK, Ditjen IKP) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) | √ |
| 6. | Efektivitas Multi Kanal dalam Diseminasi Informasi Kebijakan Publik (Long Study) | Direktorat Pengelolaan Media (Ditjen IKP) | √ |

Gambar 14
Kebermanfaatan Hasil 6
Penelitian Tahun 2020



Dari rekap di atas, dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) Penelitian dinilai Bermanfaat oleh *stakeholders* sehingga capaian kebermanfaatan hasil Penelitian tahun 2020 adalah sebesar **100%**.

Berikut simpulan dari *Executive Summary* Penelitian dimaksud:

1

Kebijakan Penomoran *Internet of Things* dan *Machine to Machine Communications* pada Jaringan Seluler Di Indonesia

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan penomoran perangkat IoT/M2M di dalam upaya mengantisipasi perkembangan IoT/M2M di masa mendatang. Studi fokus pada penomoran IoT/M2M pada jaringan seluler dengan sistem penomoran berbasis rekomendasi ITU seperti yang digunakan saat ini. Analisis dilakukan dengan *fuzzy-analytical hierarchical process* (F-AHP) dan kuantitatif deskriptif. Hasil ekstrapolasi menunjukkan dengan asumsi CAGR 18%-28%, kapasitas sistem penomoran seluler saat ini masih sangat mencukupi kebutuhan sampai tahun 2030. Hasil analisis AHP menemukan perlunya aturan yang berbeda dalam hal struktur, jumlah digit, dan prefiks antara sistem penomoran IoT/M2M dengan penomoran konvensional, perlunya melakukan migrasi terhadap nomor-nomor IoT/M2M yang telah dialokasikan jika tidak sesuai ketentuan, dan perlunya peningkatan persyaratan nomor aktif untuk setiap permohonan NDC tambahan. Hasil analisis kuantitatif deskriptif menunjukkan mayoritas responden menolak penggunaan penomoran *extra-territorial* dan penomoran global. Sebagian besar responden juga menganggap aturan registrasi nomor seluler saat ini masih relevan untuk diterapkan pada IoT/M2M. Namun untuk meminimalisasi penyalahgunaan, aturan registrasi dapat menambahkan biometrik untuk proses verifikasi.

Studi dilakukan dengan melibatkan beberapa panelis yang berasal dari regulator, operator seluler, dan pakar dibidang telekomunikasi, dengan jumlah panelis 17 orang. Analisis data dilakukan dengan *fuzzy-analytical hierarchical process* (F-AHP) dan kuantitatif deskriptif. Sebelum pengumpulan data dilakukan, tim studi menyusun draf kuesioner dan mengirimkannya kepada beberapa narasumber terpilih yang mewakili ketiga kelompok panelis. Berikut adalah temuan-temuan yang diperoleh:

1. Sistem pengalamanan IP masih memiliki beberapa kekurangan sehingga tidak bisa diaplikasikan pada semua layanan IoT/M2M. Namun pemerintah tetap dapat mendorong penggunaan IP untuk layanan yang sudah memungkinkan menggunakannya.
2. Dengan melakukan ekstrapolasi terhadap hasil proyeksi Ericsson yang dirilis pada bulan juni 2020 dan didukung data-data dari BPS, Bank Dunia, dan ITU, asumsi CAGR perangkat IoT/M2M antara 18% sampai 28%, serta rentang waktu sampai 2030, sistem penomoran seluler saat ini memiliki kapasitas yang sangat mencukupi kebutuhan, baik untuk nomor layanan konvensional maupun IoT/M2M.

3. Hasil analisis dengan *fuzzy-AHP* diperoleh preferensi umum dari para panelis sebagai berikut:

- a. aturan terkait nomor pelanggan untuk layanan IoT/M2M: memiliki panjang 15 digit, memasukkan kode sektor ke dalam struktur penomoran, dan memiliki *national destination code* (NDC) yang berbeda dengan layanan konvensional.
- b. aturan terkait IMSI untuk layanan IoT/M2M: panjang *mobile country code* (MNC) 2 digit (status quo) dan memiliki MNC yang berbeda dengan MNC layanan konvensional.
- c. perlunya melakukan migrasi nomor-nomor IoT/M2M yang telah dialokasikan jika tidak sesuai ketentuan. Namun perlu pertimbangan mendalam untuk nomor-nomor yang proses migrasinya dapat mengganggu proses produksi, aksesnya membahayakan, atau menyebabkan terganggunya layanan-layanan yang bersifat darurat.
- d. perlunya peningkatan persyaratan nomor aktif untuk setiap permohonan NDC tambahan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi penomoran

4. Hasil analisis kuantitatif deskriptif menemukan persentase tertinggi dari jawaban responden:

- a. Menolak penggunaan penomoran *extra-territorial* dan penomoran global. Namun dapat dipertimbangkan jika ditemukan aplikasi tertentu yang belum dapat dipenuhi perusahaan lokal, tetapi sifatnya hanya sementara dan perlu dialihkan ke nomor lokal setelah periode tertentu.
- b. Menganggap aturan registrasi nomor seluler saat ini masih relevan untuk diterapkan pada IoT/M2M. Namun untuk meminimalisasi penyalahgunaan, aturan registrasi dapat menambahkan penggunaan biometrik untuk proses verifikasi.

5. Upaya-upaya untuk mendorong persaingan yang sehat di antara para operator perlu dilakukan, salah satunya dengan meminimalisasi biaya peralihan (*switching cost*) antar operator. Berikut adalah beberapa alternatif untuk meminimalisasi biaya peralihan (bersifat komplementer):

- a. Mendorong penggunaan e-SIM. Penggunaan e-SIM memungkinkan peralihan operator tanpa harus mengganti fisik kartu SIM yang akan sangat menyulitkan/membahayakan dan mahal terutama jika perangkat-perangkat IoT/M2M sudah diakses dan jumlahnya masif.
- b. Mewajibkan operator untuk meng-*unlock* perangkat pada paket *bundling* layanan konektivitas dan perangkat, setidaknya ketika masa kontrak berakhir
- c. Model *shared-MNC*. Opsi ini juga dapat dipilih, namun kehati-hatian di dalam implementasinya karena masih sedikit informasi terkait model ini sehingga tingkat keberhasilan dan keberlanjutannya masih perlu kajian yang lebih mendalam.
- d. *Mobile number portability* (MNP). Opsi ini tidak relevan dengan karakteristik IoT/M2M, namun tetap dapat dijalankan sejalan dengan pemberlakuan MNP pada layanan konvensional.

2

Studi Penyusunan Standar Indeks Kepatuhan Penyelenggara Pos

Studi ini bertujuan untuk menyusun standar indeks kepatuhan penyelenggara pos yang menjadi indikator pembinaan terhadap penyelenggara pos oleh pemerintah. Penyusunan indeks kepatuhan penyelenggara pos mengidentifikasi unsur-unsur kepatuhan penyelenggara pos terhadap : (1) pemenuhan prinsip dan asas penyelenggaraan pos, (2) kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan nasional, serta (3) kepatuhan terhadap Standar Layanan Pos Komersial. Studi dilaksanakan pendekatan *mixed method* dengan pendekatan kualitatif untuk menggali variabel dan indikator yang akan digunakan dalam penyusunan indeks kepatuhan serta mengidentifikasi kendala atau hambatan pemenuhan kewajiban penyelenggara pos. Variabel dan indikator tersebut kemudian disusun dalam kuesioner untuk diujikan secara kuantitatif kepada responden penyelenggara pos. Survei dilaksanakan secara online karena keterbatasan akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan faktor hambatan penyelenggara pos dalam melakukan pemenuhan kewajiban dan komitmen berasal dari eksternal maupun internal penyelenggara pos. Sedangkan hasil pengukuran indeks kepatuhan penyelenggara pos secara agregat menunjukkan nilai cukup memenuhi. Asas penyelenggaraan pos merupakan dimensi yang mendapat predikat telah memenuhi kepatuhan (zona hijau), sementara dua dimensi lainnya yakni regulasi dan kebijakan, serta standar layanan pos komersial mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan (zona kuning).

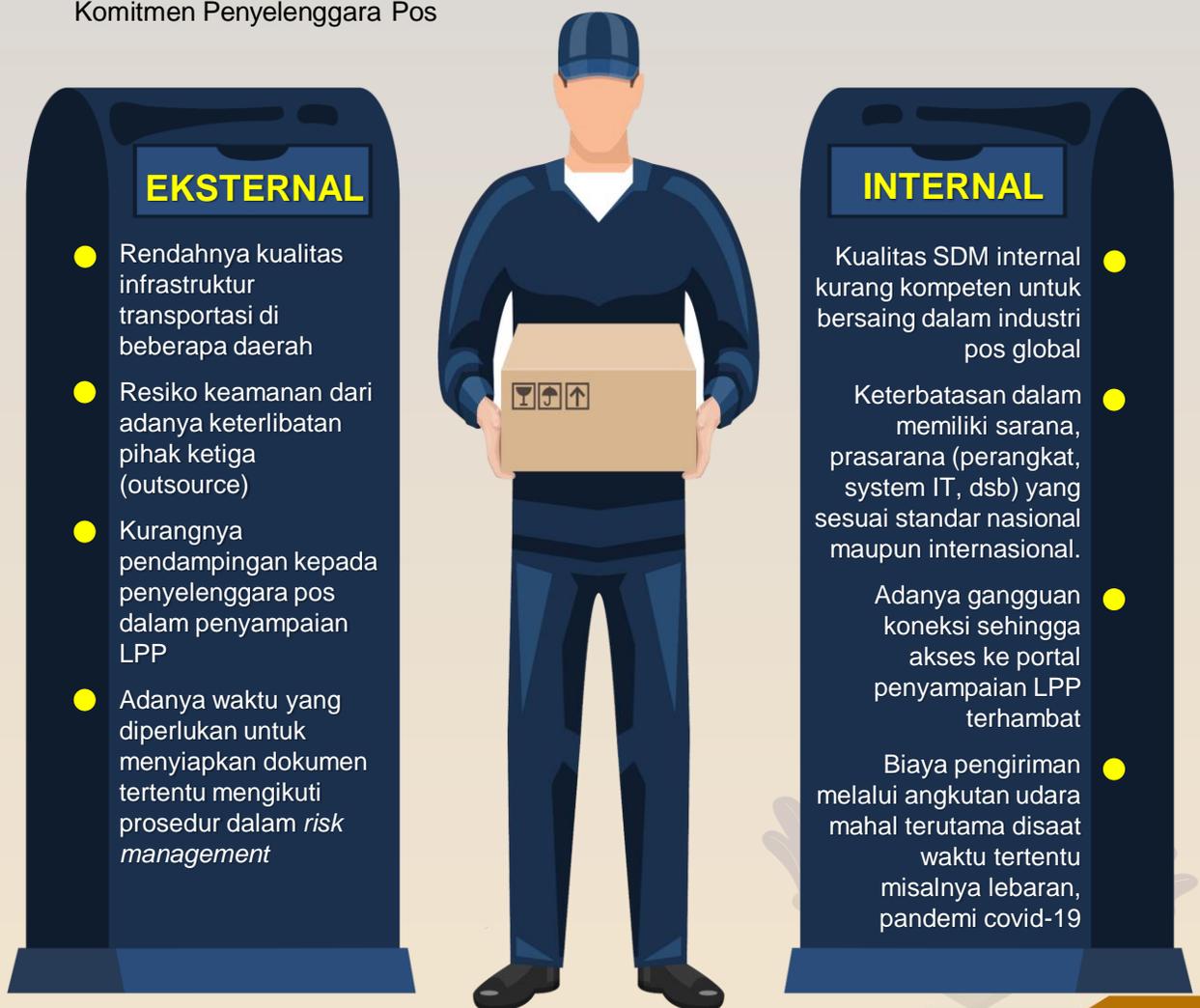
Penelitian dilakukan dalam dua tahapan yaitu penyusunan standar indeks kepatuhan penyelenggara pos dengan FGD pakar untuk dapat merumuskan variable dan indicator indeks kepatuhan, dan pengujian kerangka indeks yang telah disusun melalui kuesioner secara online kepada penyelenggara pos.

Penyusunan penilaian kepatuhan penyelenggara pos dapat dilihat berdasarkan aturan atau regulasi terkait kewajiban dan komitmen yang dipetakan dalam 3 dimensi : Asas Penyelenggaraan Pos (Kecepatan & Keamanan, Kerahasiaan, Perlindungan, Kemandirian, dan Kemitraan), Regulasi dan Kebijakan (Perizinan Pos, Bea/Cukai/Pajak, Karantina, Perlindungan Konsumen) dan Standar Layanan Pos Komersial (Keamanan dan Kerahasiaan, Pengaduan, Saran dan Informasi, Sarana, Prasarana, dan/ Fasilitas, Ganti Rugi, Informasi Layanan).

Dimensi dan indikator penilaian tersebut diujikan secara profiling melalui kuesioner secara online (dikarenakan pandemi covid-19) kepada penyelenggara pos. Responden dalam penelitian adalah penyelenggara pos yang memiliki ijin pos dan diklasifikasi berdasar skala usaha besar, sedang dan kecil. Dari hasil survei, diketahui secara agregat indeks kepatuhan penyelenggara pos menunjukkan nilai cukup memenuhi kepatuhan. Asas penyelenggaraan pos merupakan dimensi yang mendapat predikat telah memenuhi kepatuhan (zona hijau). Sementara itu dua dimensi lainnya yakni regulasi & kebijakan, dan Standar Layanan Pos Komersial mendapatkan predikat cukup memenuhi kepatuhan (zona kuning). Hasil self assessment tersebut ke depannya perlu divalidasi dengan observasi/ monitoring kepada penyelenggara pos.

Hambatan penyelenggara pos dalam melakukan pemenuhan kewajiban dan komitmen telah diidentifikasi dalam penelitian ini. Hambatan berdasarkan dari pengaruh eksternal dan internal dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 15
Hambatan Pemenuhan Kewajiban dan
Komitmen Penyelenggara Pos



EKSTERNAL

- Rendahnya kualitas infrastruktur transportasi di beberapa daerah
- Resiko keamanan dari adanya keterlibatan pihak ketiga (outsorce)
- Kurangnya pendampingan kepada penyelenggara pos dalam penyampaian LPP
- Adanya waktu yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen tertentu mengikuti prosedur dalam *risk management*

INTERNAL

- Kualitas SDM internal kurang kompeten untuk bersaing dalam industri pos global
- Keterbatasan dalam memiliki sarana, prasarana (perangkat, system IT, dsb) yang sesuai standar nasional maupun internasional.
- Adanya gangguan koneksi sehingga akses ke portal penyampaian LPP terhambat
- Biaya pengiriman melalui angkutan udara mahal terutama disaat waktu tertentu misalnya lebaran, pandemi covid-19

Sebagai upaya untuk merealisasikan penilaian kepatuhan terhadap penyelenggara pos maka terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan berikut:

1. Mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial sebagai dasar pengukuran penilaian kepatuhan penyelenggara pos.
2. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap penyelenggara pos secara berkala. Pemantauan ini dilakukan terhadap semua penyelenggara pos dengan cara melakukan *self assessment* tiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan ini melekat pada suatu sistem tertentu sehingga memiliki daya tekan terhadap penyelenggara pos (menjadi syarat perpanjangan ijin atau syarat mengikuti tender pemerintah dsb)
3. Memberikan apresiasi (*award*) kepada penyelenggara pos yang mendapatkan Predikat Kepatuhan Tinggi serta memberikan teguran dan pembinaan pemenuhan komitmen atau kewajiban kepada penyelenggara pos dengan tingkat Kepatuhan Sedang dan Kepatuhan Rendah.
4. Klusterisasi penyelenggara pos berdasarkan skala usahanya untuk pemisahan kategori kewajiban
5. Berdasarkan hasil survey terkait kepemilikan sarana, prasarana, dan atau fasilitas bahwa tidak semua penyelenggara memiliki sendiri sarana, prasarana dan/fasilitas, melainkan sewa bahkan tidak memiliki. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan diksi “harus memiliki” dalam RPM Standar Pelayanan untuk Layanan Pos Komersial pasal 11 :

“Penyelenggara Layanan Pos Komersial harus memiliki sarana, prasarana dan/atau fasilitas sebagai penunjang utama untuk dapat menyelenggarakan Layanan Pos Komersial agar tercapai layanan prima. “



3

Studi Grand Design Penomoran Televisi Digital *free-to-air* Indonesia

Studi ini bertujuan memberikan rekomendasi pengaturan penomoran Televisi Digital *free-to-air* Indonesia agar tidak terjadi duplikasi identitas siaran dan mengharmonisasikan alokasi *Service Information* di Indonesia dengan alokasi dan penetapan yang telah ditentukan oleh *DVB Project*. Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data Delphi (*expert judgment*), sedangkan metode pengolahan data untuk mencapai konsensus dilakukan dengan *analytical hierarchical process* (AHP). Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada pengaturan penomoran televisi digital *free-to-air* Indonesia berbasis Digital Video Broadcasting v.1.3.1 yang meliputi pengaturan penomoran umum, penomoran identitas, penomoran topologi jaringan, penomoran virtual, penomoran bersiaran, dan pengaturan penomoran kebencanaan. Berdasarkan hasil penelitian, tercapai konsensus pakar terkait pertanyaan kuesioner pengaturan penomoran TV digital *free to air* di Indonesia. Kesepakatan yang tercapai dalam penelitian ini di antaranya Direktorat Penyiaran sebagai otoritas penomoran, alokasi LCN secara nasional dan lokal dengan mekanisme pemilihan LCN *first come first serve*, serta perlunya penetapan standar khusus EWS (*early warning system*) TV digital di Indonesia.

Penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data Delphi (*expert judgment*), di mana para panelis/informan diminta untuk menilai *item-item* tentang pengaturan penomoran televisi digital. Konsensus dinilai menggunakan metode *analytical hierarchical process*, sedangkan isian pendapat akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari konsensus terhadap *item-item* tersebut diolah untuk memberikan gambaran faktor-faktor apa saja yang diperlukan dalam pengaturan penomoran televisi digital. Responden dalam penelitian terdiri atas 3 cluster yaitu penyelenggara siaran dan manufaktur receiver. Sebanyak 20 stakeholder/ekspert memberikan pendapat melalui kuesioner online dalam penelitian ini yang terdiri atas 4 penyelenggara siaran, 4 manufaktur receiver dan 12 regulator.

Ruang lingkup penelitian ini berfokus kepada pengaturan penomoran televisi digital *free-to-air* Indonesia berbasis Digital Video Broadcasting v.1.3.1 yang meliputi pengaturan penomoran umum, penomoran identitas, penomoran topologi jaringan, penomoran virtual, penomoran bersiaran, pengaturan penomoran kebencanaan. Kuesioner penelitian mencakup pertanyaan tentang profil demografis (yaitu posisi stakeholder pada organisasi, dan bidang pekerjaan) dan pendapat stakeholder tentang *item-item* pengaturan penomoran televisi digital yang telah kami kembangkan dari *benchmark* terhadap negara-negara yang mengadopsi teknologi DVB dan telah mengatur penomorannya.

Berdasarkan hasil Delphi dengan dua putaran survei, dicapai konsensus untuk 3 bagian besar dalam pertanyaan kuesioner yaitu pengaturan umum, *logical channel number* dan *receiver behaviour*. Hasil dari masing-masing konsensus dijabarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 11
Konsensus Pengaturan Umum

| No | Pengaturan Umum | Konsensus |
|----|--|----------------------------|
| 1 | Otoritas Penomoran: | Direktorat Penyiaran |
| 2 | Biaya Administrasi: | Sampai nomor kadaluarsa* |
| 3 | Jangka Waktu Kepemilikan Nomor: | s.d. izin terkait berakhir |
| 4 | Lembaga yang memancarkan Emergency Broadcast System: | Multi-channel EBS |
| 5 | Alokasi Network_ID: | Alokasi nasional dan lokal |
| 6 | Penetapan Network_ID: | 1 induk SSJ = 1 NID |
| 7 | Pengaturan Service_ID: | [Penjatahan] 60 service_id |
| 8 | Pengaturan Country_Region_ID: | Zona waktu* |

* dilakukan pertanyaan ulang di Round 2.

Tabel 12
Konsensus Pengaturan LCN

| No | Pengaturan LCN | Konsensus |
|----|--|---------------------------------|
| 1 | Alokasi LCN: | Nasional dan lokal |
| 2 | Sharing LCN: | Dengan afiliasi yang sama* |
| 3 | Mekanisme Perolehan LCN: | <i>first come, first serve</i> |
| 4 | Biaya Administrasi: | dikenakan biaya hanya satu kali |
| 5 | Perlakuan nomor yang tidak digunakan (<i>Vacated LCN</i>): | segera dikosongkan |

*dilakukan pertanyaan ulang di Round 2

Tabel 13
Konsensus Receiver Behaviour

| No | Receiver Behavior | Konsensus |
|----|---|---|
| 1 | Filtering Content | Mayoritas stakeholder setuju agar dilakukan filtering konten, di mana konten yang tidak memiliki country code 360 diabaikan |
| 2 | Receiver Behaviour LCN | |
| | LCN di Wilayah Beririsan: | mayoritas stakeholder setuju jika terdapat 2 LCN yang sama maka dimasukkan ke LCN 800 - 999 |
| | LCN di Wilayah Perbatasan | mayoritas stakeholder setuju jika LCN dari luar negeri tidak diproses oleh receiver |
| 3 | Receiver Behaviour untuk Siaran Kebencanaan (Emergency Broadcast System) | |
| | Deteksi Bencana | mayoritas responden setuju agar filtering bencana dari sisi cell_id |
| | Pesan Kebencanaan | mayoritas stakeholder menyepakati format siaran video-audio |
| | Penomoran Siaran Kebencanaan | mayoritas stakeholder setuju terhadap perubahan penomoran bencana |

| No | Receiver Behavior | Konsensus |
|----|---|---|
| 4 | <i>Receiver Behaviour</i> untuk <i>Electronic Program Guide</i> | |
| | <i>Parental Lock</i> | <i>parental lock</i> perlu didiskusikan dengan KPI |
| | Menu dan Bahasa | semua stakeholder menyetujui untuk ada 2 menu bahasa |
| 5 | <i>Manufacturer Identity</i> (manufacture_id): | mayoritas stakeholder menganggap bahwa <i>Manufacturer Identity</i> perlu dibuat dan diatur oleh Direktorat Standardisasi |

*dilakukan pertanyaan ulang di *Round 2*

Untuk mencapai target ASO di 2020, hasil penelitian terkait penomoran perlu ditindaklanjuti dengan implementasi dan mempersiapkan regulasi yang sejalan sebagai payung hukum. Selain itu beberapa hal yang perlu dibahas lebih mendetail seperti EWS (*Early Warning System*) perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Sistem Siaran Kebencanaan melalui TV digital perlu keterlibatan berbagai pihak seperti BMKG dan BNPB sebagai domain informasi kebencanaan.

4

Optimalisasi Media Online Kominfo Untuk Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Komunikasi Publik

Saat ini pemerintah tengah menghadapi krisis komunikasi publik. Bahkan Presiden Jokowi, melalui Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, mengatakan komunikasi publik buruk (Detiknews, 21 Okt 2020). Tentu ini menjadi tugas Kemkominfo sebagai penanggungjawab pengelolaan komunikasi publik, walaupun bukan merupakan satu-satunya lembaga pelaksana komunikasi publik.

Kualitas komunikasi publik dipengaruhi oleh 5 elemen komunikasi: komunikator, pesan, saluran, komunikan dan efek. Terkait dengan saluran, ada beberapa kanal media yang dikelola oleh Kemkominfo untuk diseminasi informasi publik, diantaranya media cetak, media tatap muka, maupun media online. Keberadaan kanal-kanal tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi lengkap tentang kebijakan pemerintah, menjadi referensi utama informasi yang valid, meraih kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan citra pemerintah (paparan Dirjen IKP, 15 Oktober 2020). Maka efektivitas dari beberapa kanal media yang dikelola Kemkominfo, khususnya media online, dilihat dari sudut pandang netizen penting untuk dilakukan. Sebab media online semakin populer di masyarakat seiring dengan peningkatan akses terhadap internet, dan mengelola media online memiliki tantangan sendiri, seiring dengan perkembangan teknologi digital yang telah meleburkan batas antara produsen dan konsumen informasi. Sehingga penyajian konten di media online tidak hanya memperhatikan format yang menarik seperti infografis, tetapi juga prinsip *searchable* dan *shareable*.

Sehingga penyajian konten di media online tidak hanya memperhatikan format yang menarik seperti infografis, tetapi juga prinsip *searchable* dan *shareable*. Kelima media online yang menjadi objek survei yaitu: 1) indonesia.go.id; 2) infopublik.id; 3) indonesiabaik.id; 4) Gprtv.id; dan 5) kominfo.go.id. Data survei persepsi netizen ini dianalisis menggunakan konsep AISAS, yang dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik responden.

Gambar 16
Data Survei Persepsi Netizen



Tabel 14
Survey Online Focus Group Discussion
Selama Bulan Juni 2020

| NO | MEDIA | MENGAKSES | SKOR | | | | |
|----|------------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-------|
| | | MEDIA | (A) | (I) | (S) | (A) | (S) |
| | | | Attention | Interest | Search | Action | Share |
| 1 | indonesia.go.id | 51,9% | 73 | 80 | 73 | 69 | 73 |
| 2 | indonesiabaik.id | 62,6% | 88 | 91 | 84 | 84 | 82 |
| 3 | infopublik.id | 54,2% | 80 | 82 | 81 | 78 | 76 |
| 4 | gprtv.id | 46,6% | 84 | 85 | 82 | 79 | 81 |
| 5 | kominfo.go.id | 88,6% | 88 | 88 | 87 | 85 | 84 |

Keterangan: *Attention* dan *Interest* termasuk dalam dimensi psikologis, sementara *Search-Action-Share* merupakan dimensi tindakan.

Secara keseluruhan, banyak responden (>50%) telah mengetahui dan pernah mengakses media online yang dikelola Kominfo. Kanal *indonesiabaik.id* dan *kominfo.go.id* lebih populer dibandingkan dengan kanal-kanal lainnya. Kanal *indonesiabaik.id* sangat tinggi untuk *interest*, sejalan dengan konten di kanal ini yang mayoritas disajikan dalam bentuk infografis. Sementara, nilai *search* (penelusuran) untuk kanal *kominfo.go.id* tertinggi dibandingkan dengan kanal-kanal yang lain, sejalan dengan posisinya sebagai kanal atas nama institusi. Hasil survei juga menunjukkan bahwa dimensi psikologis di kelima media lebih tinggi daripada dimensi tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa media online Kominfo memiliki potensi untuk dikembangkan ke depan.

Namun, jangkauan dari media online Kominfo masih sangat terbatas. Terlihat dari data sekunder *similarweb.com* diketahui bahwa total *visits* untuk kelima media *online* Kominfo sebanyak 3,5 juta pengunjung, atau hanya berkisar 1,9% dari total pengguna internet Indonesia yang mencapai 175,4 juta pengguna.

Secara umum, platform yang paling banyak digunakan untuk mengakses media *online* Kominfo adalah *website* dan media sosial Instagram. Namun masing-masing media, memiliki platform unggulan seperti indonesia.go.id dan infopublik.id yang paling banyak diakses melalui *website*, sementara indonesiabaik.id paling banyak diakses di Instagram.

Selain hasil survei, analisis dari *similarweb.com* juga dapat menunjukkan akses masyarakat terhadap kelima media online Kominfo.

Tabel 15
Survei Analisis Media Online Kominfo
Sumber: analisis similarweb.com (15 Oktober 2020)

| NO | Kanal | Direct | Referral | Search | Social | Daily Unique Visitors | Average Time On Sites (minutes) |
|----|------------------|--------|----------|--------|--------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | indonesia.go.id | 16,4% | 0,7% | 82,5% | 0,4% | 4200 | 2:22 |
| 2 | indonesiabaik.id | 7,5% | 0,1% | 92,1% | 0,3% | 20 | 1:24 |
| 3 | infopublik.id | 22,8% | 0% | 58,1% | 9,7% | 3800 | 8:03 |
| 4 | gprtv.id | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 | N/A |
| 5 | kominfo.go.id | 38,1% | 2,9% | 52,5% | 2,4% | 16.906 | 4:09 |

Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah *daily unique visitors* kanal kominfo.go.id rata-rata 16.906 pengunjung unik setiap harinya. Sementara itu, rata-rata waktu yang dihabiskan pengunjung untuk mengakses masing-masing kanal berada pada rentang 1-8 menit. Diketahui pula bahwa media online yang dikelola Kominfo diakses berdasarkan hasil pencarian di *search engine*, bukan diakses secara langsung (*direct*). Hal ini selaras dengan hasil FGD dengan beberapa responden yang menyatakan bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk melakukan pencarian informasi melalui *search engine* dibandingkan langsung mengakses laman website tertentu.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah, penggunaan media sosial oleh pemerintah perlu diukur dengan mempertimbangkan aspek jangkauan, frekuensi dan lalu-lintas, pengaruh, percakapan dan keberhasilan, serta keberlanjutan. Kelima aspek ini perlu menjadi target dari pengembangan media online Kominfo untuk mengoptimalkan penggunaannya.

Rekomendasi penelitian ini adalah:

1. Media-media yang dikelola oleh Kominfo khususnya media online harus dapat lebih dikenal dan populer di kalangan masyarakat dan menjadi acuan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi yang benar. Pengelola kanal dapat secara berkala mengevaluasi apakah media tersebut memiliki dampak terhadap penggunaannya dan kembali mengakses, sesuai dengan parameter-parameter yang tertera pada Permenpan RB Nomor 83 Tahun 2012. Media online tersebut perlu didorong untuk mampu bersaing dengan media online mainstream, sehingga kinerja dan fungsinya tidak hanya untuk diseminasi informasi, namun juga dapat menjadi pembentuk opini dan melakukan *counter* isu di pihak pemerintah.
2. Optimalisasi kanal diseminasi informasi publik yang berbasis website dengan memanfaatkan *search engine optimization* dan Google AMP untuk meningkatkan visibilitas kanal dan membuat laman kanal lebih mudah diakses publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jangkauan dan *traffic* pengunjung website.
3. Dalam hal konten, media online Kominfo perlu antisipatif terhadap isu yang akan marak di masyarakat. Ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan mesin pengais yang dimiliki oleh Kominfo, untuk dapat *crawling* data dan melakukan analisis sentimen terhadap isu-isu terbaru secara harian sehingga dapat membuat konten yang 'update' dan tidak kalah cepat dari media mainstream untuk penangkalan isu negatif, konten hoax, pemberian informasi yang benar dan komunikasi publik yang baik.
4. Dilihat dari akses netizen terhadap media-media online Kominfo, terdapat platform yang lebih banyak digunakan untuk media tertentu sehingga sebaiknya media online tersebut dapat fokus/spesifik di 1-2 platform saja, tidak perlu masuk ke semua platform seperti indonesiabaik yang bisa fokus ke Instagram saja.
5. Membentuk tim khusus (ad-hoc) untuk mengelola kanal secara khusus tanpa dibebani tanggung jawab lain di luar pengelolaan kanal. Tim ini dapat terdiri dari orang-orang yang berkecimpung di media, seperti jurnalis, reporter, redaktur, produksi berita dan sebagainya.

6. Meningkatkan skill pengelola kanal dengan memberikan pelatihan khusus kepada pegawai dari expert langsung di bidang ini atau mengadakan kegiatan *sharing knowledge best practice* dengan media mainstream.
7. Memangkas prosedur birokrasi atau mempercepat proses produksi konten agar prinsip cepat, tepat dan akurat dapat tercapai sehingga media pemerintah mampu bersaing dengan media mainstream.
8. Produksi konten di media online Kominfo sangat mungkin diintegrasikan dengan sistem otomatisasi konten menggunakan infrastruktur dan aplikasi tertentu sehingga update berita, foto, video, televisi, bisa dikerjakan secara cepat dan tepat. Konsep ini tidak memerlukan lagi banyak ragam kanal, dan sangat efisien.
9. Penguatan kelembagaan komunikasi publik dapat dilakukan dengan melakukan revitalisasi personil dan manajemen komunikasi yang adaptif terhadap perubahan, namun untuk jangka panjang ke depan pembentukan lembaga komunikasi publik sendiri yang independen, dipandang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik. Namun, dibutuhkan kajian khusus untuk mendukung hipotesis ini.

5

Studi Kesiapan Kementerian/Lembaga Dalam Mengimplementasikan Sistem Big Data Nasional

Semakin masifnya penggunaan perangkat TIK dan internet di era industri 4.0 telah menghasilkan data yang sangat besar, beragam, dan dalam rentang waktu yang sangat cepat. Data-data tersebut sangat berpeluang menghasilkan informasi yang berharga apabila diolah dengan menggunakan teknologi *Big Data Analytics*.

Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, ingin melihat kesiapan instansi pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), menuju terwujudnya sistem big data nasional 5 tahun ke depan. Studi melibatkan 62 instansi, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, melalui pengisian kuesioner terstruktur (kuantitatif) dan kegiatan Webinar (kualitatif) dengan narasumber/informan Kepala/perwakilan dari setiap Pusat Data (Pusdatin) K/L.

Walaupun mayoritas Kementerian/Lembaga belum menerapkan *big data analytics* secara menyeluruh di satuan kerja, tetapi beberapa K/L sudah memiliki *use case-use case* penggunaan teknologi big data di pemerintahan, seperti penggunaan text mining di beberapa K/L, analisis data media sosial, profiling untuk mendeteksi tindakan penyelundupan, analisis harga dengan data yang bersumber dari *marketplace*, analisis data historis dari kegiatan longitudinal, serta analisis data tingkat lanjut lainnya.

Sementara kesiapan K/L dalam mengimplementasikan big data akan dilihat dari 3 variabel, yaitu Kesesuaian Organisasi (*Organization Alignment*), Kematangan Organisasi (*Organization Maturity*), dan Kemampuan Organisasi (*Organization Capabilities*).

Dari hasil survei dan pemaparan dalam webinar, diketahui potret kesiapan K/L dalam mengimplementasikan sistem *big data*, antara lain:

1) Dilihat dari dimensi pertama yaitu *Organizational Alignment (OA)* atau keselarasan organisasi, dengan nilai mediannya dari secara keseluruhan adalah **64 dari skala 100**. Dari hasil studi pada dimensi ini diketahui:

- Dari 53 K/L terdapat 28 K/L (53%) belum merencanakan Big Data, dalam hal ini belum ada Big Data di dalam resntra atau belum ada roadmap terkait dengan Big Data.
- Kemudian, bila dilihat dari struktur organisasi, baru terdapat 17 K/L (32%) yang memiliki struktur organisasi khusus yang mengawal implementasi Big Data, dari 17 K/L tersebut sebagian besar strukturnya bersifat task force/ad hoc setara eselon 3 dan/atau 4.

2) Dilihat dari dimensi kedua yaitu *Organizational Maturity (OM)* atau kematangan organisasi, dengan nilai mediannya secara keseluruhan adalah **70 dari skala 100**. Dari dimensi ini, terdapat catatan antara lain:

- Dari aspek berbagi pakai data, diketahui sebanyak 32 K/L (60%) masih belum ada kebijakan untuk membuka akses *raw data*-nya bahkan untuk akses dalam lingkup antar eselon 1 (internal) hanya sedikit K/L yang memberikan kebijakan akses *raw-data* tersebut.
- Kemudian dari aspek pengelolaan data secara terpusat terdapat 24 K/L (46%) yang masih belum melakukan.

3) Dilihat dari dimensi ketiga yaitu *Organizational Capabilities (OC)* atau kapabilitas organisasi, dengan nilai mediannya secara keseluruhan adalah **57 dari skala 100**. Dari hasil studi pada dimensi ini diketahui:

- Pada aspek kepatuhan kebijakan, mayoritas K/L belum ada kebijakan internal yang terkait dengan Big Data, dan belum menerapkan standar keamanan
- Aspek SDM masih menjadi kendala klasik, 53% K/L belum memiliki SDM dengan keahlian yang mendukung implementasi big data, baik *Big Data Analytic*, *Data Warehouse*, dan *Data Engineering*. Hanya 4-5 K/L yang sudah memiliki SDM tersertifikasi keahlian tersebut.

Dari nilai ketiga dimensi tersebut, dilakukan *confirmatory factor analysis* untuk melakukan pembobotan dari setiap dimensi, dan didapatkan untuk dimensi OA sebesar 0.32, OM sebesar 0.346, dan OC sebesar 0.334 untuk menganalisis tingkat kesiapan dari seluruh K/L. Kemudian, dilakukan juga *expert judgement* untuk melakukan pengelompokan kesiapan K/L. Dari hasil analisis, secara keseluruhan didapatkan K/L yang tingkat kesiapannya terkait dengan implementasi Big Data, antara lain:

- Tidak ada K/L yang sangat tidak siap (nilai ≤ 30)
- Terdapat 8 K/L atau 15% yang tidak siap (nilai $>30-50$) dengan nilai rata-rata 43
- Terdapat 35 K/L atau 66% yang moderat (nilai $>50-75$) dengan nilai rata-rata 62.7
- Terdapat 10 K/L atau 19% yang siap (nilai $>75-85$) dengan nilai rata-rata 78.6
- Tidak ada K/L yang sangat siap (nilai >85) dengan nilai rata-rata 81.6.
- Secara keseluruhan, nilai rata-rata tingkat kesiapan dari 53 K/L adalah 62.71

Gambar 17
10 K/L yang Memiliki Nilai Sudah Siap



Dukungan K/L Saat Ini Terkait dengan Big Data

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan *Focus Group Discussion* dengan beberapa K/L, didapatkan beberapa dukungan terkait dengan implementasi sistem Big Data Nasional, antara lain:

1. Bappenas dan BPS sudah menyediakan Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) yang akan memuat seluruh data pemerintah dan data instansi lain dan dapat diakses secara terbuka.
2. BPS sudah menyusun beberapa kebijakan terkait dengan standar data dan metadata yang diharapkan dapat memperbaiki kualitas data dan metadata yang terdapat di setiap K/L dan Pemerintah Daerah.
3. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sedang membangun Pusat Data Nasional yang nantinya akan direncanakan untuk dilengkapi dengan layanan Big Data (*Big Data as a Service*) berbasis *cloud*. Layanan ini diharapkan agar K/L dan Pemerintah Daerah ke depannya bisa saling berkolaborasi dan bisa mengoptimalkan infrastruktur Pusat Data tersebut apabila ingin melakukan *Big Data Analytic* tanpa harus membangun dan mengelola infrastruktur sendiri.
4. BPPT saat ini sedang mempersiapkan teknologi Big Data yang nantinya diharapkan bisa mengisi Pusat Data Nasional dengan aplikasi-aplikasi Big Data yang sedang dikembangkan.

Dari hasil studi ini, tim peneliti menyusun beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat memperkuat implementasi big data di lingkungan pemerintahan, diantaranya:

- Diperlukan adanya dukungan manajemen dalam bentuk dokumen formal seperti Renstra/Roadmap yang terkait dengan Big Data, sehingga implementasi Big Data pada suatu instansi menjadi lebih terarah dan memiliki target yang jelas.
- Mengembangkan kebutuhan analisis prediktif dan preskriptif dalam organisasi, sehingga mendorong penggunaan teknologi big data untuk memenuhinya.
- Menyiapkan pengelolaan data secara terpusat di masing-masing instansi.
- Adanya kebijakan untuk membuka akses raw data sehingga memperluas kesempatan kolaborasi big data analytics lintas Kementerian/Lembaga dengan berbagi raw data.
- Menyiapkan regulasi internal mengacu pada standar nasional/internasional sebagai landasan kerangka kerja pelaksanaan Big Data di instansi.
- Menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian yang dibutuhkan terkait dengan data yaitu *Data Analytic*, *Data Warehouse*, dan *Data Engineering*.

6

Strategi Diseminasi Nilai-nilai Pancasila pada Generasi Milenial

Mencuatnya masalah transnasional yang ditonjolkan pihak Barat terutama AS dengan propoganda terorisme pasca tragedi WTC 11 September 2001 mengakibatkan bermunculan ideologi baru sebagai perlawanan atas ketidakadilan yang terjadi. Hal ini rawan dimanfaatkan oleh masuknya ideologi asing ke bumi Nusantara. Dikhawatirkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dan mengancam ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sebagai dasar negara sejak Indonesia berdiri, dinilai semakin terdegradasi nilai-nilainya di masyarakat, khususnya di kalangan generasi millennial. Salah satunya pengaruh teknologi informasi dan internet yang menjadi media penting bagi penyebaran doktrin radikalisme dan intoleransi yang sering menysasar mahasiswa dan pelajar.

Generasi muda tahun 1990-an dan 2000-an banyak yang tidak mengenal Pancasila ataupun maknanya. Sejumlah survei mengungkapkan potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila diantaranya: Survei Alvara Research Center (2018) menunjukkan ada 17,8 % mahasiswa dan 18,4 % pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal, sementara Survei Riset Mandiri Tirto (2018) menunjukkan bahwa pemahaman dan preferensi generasi muda mengenai Pancasila cukup baik meskipun ada 14,8 % responden yang tidak hafal dengan urutan Pancasila, dan hasil Survei CSIS (2017) menunjukkan bahwa dukungan terhadap Pancasila masih kuat di kalangan generasi milenial yaitu 90,5 %, namun terdapat 9,5 % yang sepakat mengganti Pancasila. Upaya komunikasi, diseminasi informasi dan edukasi telah dilakukan oleh Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo bersama dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), namun dampak dan penerimaannya di kalangan generasi millennial masih belum optimal.

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan diseminasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Ditjen IKP tahun 2019-2020 diketahui bahwa:

- Program kegiatan diseminasi nilai-nilai Pancasila hanya dilakukan oleh satu Direktorat di Ditjen IKP, belum diharmonisasi dalam kegiatan diseminasi di Direktorat lainnya.
- Komunikator yang dipilih oleh Ditjen IKP telah melibatkan influencer. Namun content creator atau influencer yang dipilih, ternyata belum secara aktif mendiseminasikan nilai-nilai Pancasila dalam media sosial pribadinya, masih terbatas dalam event-event yang diselenggarakan oleh Ditjen IKP. Contohnya pada akun 2 content creator yang diajak bekerjasama yaitu Cindy Gulla dan Rio Ardhillah.

- Konten di akun Youtube GNFI (Good News from Indonesia) sebagai mitra Ditjen IKP dalam sosialisasi nilai-nilai Pancasila hanya mendapat viewer < 100, karena acara yang dikemas hanya berupa talk show sehingga kurang menarik bagi generasi millennial.
- Saluran yang digunakan oleh Ditjen IKP untuk diseminasi nilai-nilai Pancasila telah menggunakan media sosial, melalui akun Pendekar (Pendidikan Karakter) Pancasila. Berdasarkan "Laporan Konten Media Sosial Pendekar Pancasila" diketahui konten yang diposting di akun tersebut masih sangat terbatas, dari periode Maret sampai Juni 2020, rata-rata jumlah konten di setiap platform media sosial (Instagram, Twitter, Facebook) sebanyak 5-7 konten per bulan, dan lebih sedikit lagi melalui Youtube.
- Dari beragam kegiatan yang dapat dilakukan untuk komunikasi/diseminasi informasi, kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen IKP dapat diklasifikasikan menjadi: sosialisasi, talkshow dan special events. Beberapa kegiatan yang tampaknya belum dilakukan seperti kampanye, penyiaran, dan melalui perfilman.

Rekomendasi dari penelitian ini adalah:

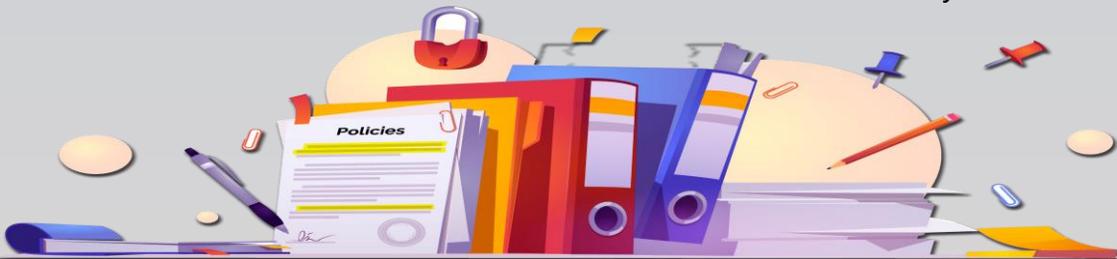
- Menggalakkan kembali pendidikan Pancasila dan budi pekerti mulai dari keluarga sejak usia dini dan sekolah (PAUD) hingga perguruan tinggi sehingga nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan sikap empati benar-benar dipraktikkan dalam hidup dan kehidupan generasi penerus bangsa.
- Mengoptimalkan kinerja dari tiap-tiap direktorat di Ditjen IKP melalui sinergi program ketika melakukan diseminasi informasi, dimana di semua direktorat ketika melakukan sosialisasi ke masyarakat wajib mencantumkan logo Pancasila atau memasukkan nilai Pancasila, sehingga tidak terkesan bahwa hanya satu direktorat saja yang bekerja dan bertanggungjawab menyebarkan nilai Pancasila.
- Melibatkan partisipasi publik khususnya milenial sebagai komunikator, pembuat konten pesan, melalui aplikasi, film, kartun, game, platform Media Sosial yang sebaiknya juga didukung Big Data, & kecerdasan buatan (Artificial Intelligence-AI). Untuk menggugah partisipasi publik tersebut dapat dilakukan bentuk kompetisi, quiz, festival, kampanye, maupun gerakan nasional.

- Memperluas Literasi Digital tentang nilai-nilai luhur Pancasila dengan konten dikemas kekinian yang berisikan praksis Pancasila secara nyata di masyarakat secara terstruktur, masif, dan sistematis sebagai contoh dengan menayangkan content berisikan keteladanan nilai Pancasila di ruang public, di sekolah, dan media sosial seperti tentang budaya antri, menghormati orang tua, tidak melakukan perilaku bullying, dsb.
- Memperkuat kerjasama dengan *content creators* supaya mereka lebih aktif memberikan pesan-pesan Pancasila melalui *hashtag-hashtag* yang menarik bagi kalangan generasi milenial. Perlu juga menggandeng lebih banyak content creator yang terkenal dengan banyak follower, memiliki reputasi untuk menjadi teladan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, dan memiliki visi nasionalis.
- Bekerjasama dengan komunitas-komunitas penggiat Pancasila seperti Rumah Pancasila dan Kampung Pancasila sebagai upaya melibatkan partisipasi publik dalam pembumih Pancasila.
- Menggunakan komunikator ulama yang moderat tentang nilai-nilai Pancasila ke sekolah-sekolah yang terindikasi ada perekrutan pengikut ideologi asing.



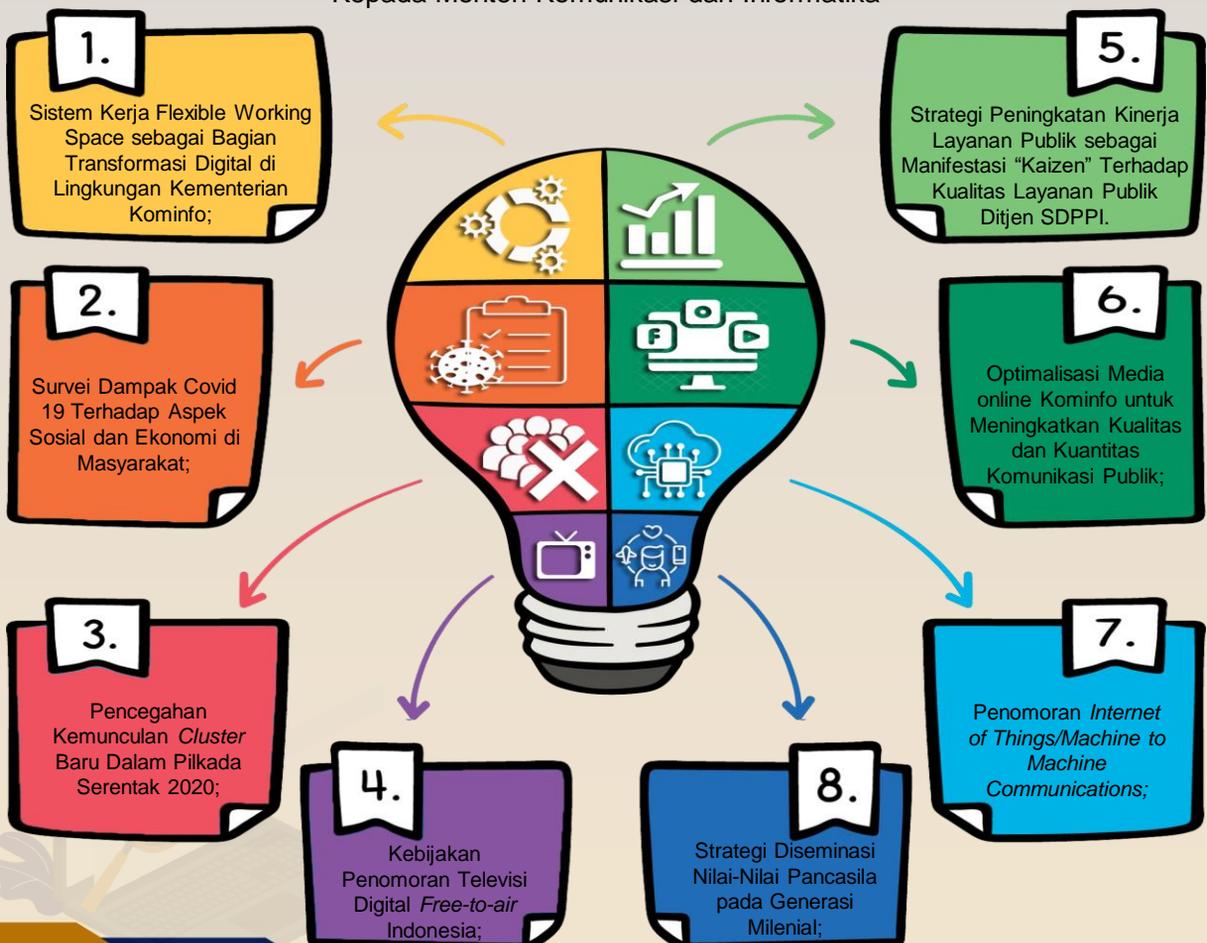
POLICY BRIEF

Gambar 18
Ilustrasi *Policy Brief*



Dalam rangka menyediakan rumusan yang menguraikan alternatif kebijakan atau rangkaian tindakan dalam sebuah kebijakan, Badan Litbang SDM secara berkala menyusun *Policy Brief* untuk menyediakan gambaran singkat untuk pengambilan kebijakan bagi *decision maker* atau pembuat kebijakan sebagai regulator pada isu-isu terkini yang tengah mencuat di masyarakat. Hasil penelitian yang ada diharapkan mampu memberi masukan bagi *decision maker* dalam menginisiasi kebijakan yang lebih efektif.

Gambar 19
Badan Litbang SDM Melaporkan 8 (Delapan) Judul *Policy Brief*
Kepada Menteri Komunikasi dan Informatika



JURNAL ILMIAH DAN PUBLIKASI



Gambar 20
Ilustrasi Jurnal Ilmiah dan Publikasi

Selain melaksanakan penelitian yang berorientasi pada pemberian rekomendasi bagi kebijakan pemerintah, khususnya satuan kerja di lingkungan Kementerian Kominfo, perhatian utama dari framework penelitian di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah diseminasi informasi baik melalui jurnal penelitian maupun melalui media lainnya.

Berikut daftar jurnal yang terbit tahun 2020 pada satker/UPT di lingkungan Badan Litbang SDM:

Tabel 16
Daftar Jurnal yang Terbit Tahun 2020 Pada Satker/UPT
di Lingkungan Badan Litbang SDM

| SATKER/UPT | Judul Jurnal Tahun 2020 | Terbit |
|-----------------------|---|---|
| Puslitbang SDPPPI | - Buletin Pos dan Telekomunikasi Vol. 18 - Jurnal Penelitian Pos dan Informatika Vol. 10 | - 2 edisi - 2 edisi |
| Puslitbang APTIKA IKP | - Jurnal Media dan Komunikasi/DIAKOM - Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi/MTI | - 2 edisi - 2 edisi: Oktober, Desember |
| BBPSDMP Medan | Jurnal Penelitian Komunikasi dan Pembangunan/PIKOM Vol. 21 (e-journal) | 2 edisi: Mei, Desember |

| SATKER/UPT | Judul Jurnal Tahun 2020 | Terbit |
|--------------------|---|---|
| BPSDMP Bandung | Jurnal penelitian komunikasi Vol. 23 nomor 1 dan 2 (e-Journal) | 2 edisi: Juli, Desember |
| BPSDMP Yogyakarta | - E-Jurnal IPTEK-KOM - Majalah Gagasan | - 2 edisi: Juni - 1 edisi: April |
| BPSDMP Surabaya | - Jurnal KOMUNIKA Volume 8 - Majalah Semi Ilmiah ISSUE SENTRAL | - 2 edisi: Juli, Desember - 2 edisi: Maret, November |
| BPSDMP Banjarmasin | Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan | 2 edisi: Juni Oktober |
| BPSDMP Manado | Jurnal PKOP vol 24 Nomor 1 dan 2 | 2 edisi: Juli, Desember |
| BBPSDMP Makassar | - Jurnal Penelitian Komunikasi dan Media Massa/PEKOMMAS (SINTA-2) - JITU/Journal of Information Technology and Its Utilization | - 2 edisi: April, Oktober - 2 edisi: Juni, Desember |
| BPSDMP Jakarta | - Jurnal Studi Komunikasi dan Media (SINTA 2) - Majalah Semi Populer Komunikasi Massa (belum akreditasi) | - 2 edisi: Juli, Desember - 2 edisi: Juli, Desember |

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP

Era Digitalisasi pada Industri 4.0 di Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan hadirnya permintaan dan penawaran talenta digital dalam mendukung perkembangan ekosistem industri teknologi. Tantangan tersebut perlu dihadapi salah satunya melalui kegiatan inovasi dan inisiasi dari berbagai pihak dalam memajukan talenta digital Indonesia, baik dari pemerintah maupun mitra kerja pemerintah yang dapat menyiapkan angkatan kerja muda sebagai talenta digital Indonesia.



Gambar 21
Logo *Digital Talent Scholarship*

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2018-2019, telah menginisiasi Program Digital Talent Scholarship yang telah berhasil dianugerahkan kepada lebih dari 26.000 penerima pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Program Digital Talent Scholarship ini ditujukan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi tema-tema bidang teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan menjadi bagian untuk memenuhi permintaan dan penawaran talenta digital Indonesia.

Gambar 22
Pelaksanaan DTS Daring



Untuk memenuhi tenaga terampil dalam bidang *digital*, Kementerian Kominfo turut berperan dengan cara menyelenggarakan program *Digital Talent Scholarship*. Program ini berangkat dari pemikiran bahwa berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia dan McKinsey, dalam kurun waktu 2015-2030, Indonesia membutuhkan 9 juta *digital talent* atau sekitar 600 ribu orang setiap tahun.

Gambar 23
Kebutuhan Tenaga Terampil Bidang Digital di Indonesia



Tujuan utama program ini adalah mengurangi kesenjangan kemampuan *digital* di Indonesia baik dari Indonesia bagian Barat sampai dengan bagian Timur. Indonesia perlu menyelaraskan pasokan keterampilan dengan permintaan industri yang terus berkembang dan tidak hanya terpusat di kota-kota besar serta wilayah Indonesia bagian Barat namun juga melebarkan manfaat program ini ke wilayah Timur dan daerah 3T. Selain itu, kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Pandemi Covid19 mengubah rancangan Program *Digital Talent Scholarship* 2020. Beasiswa pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi untuk menciptakan talenta digital, dirumuskan ulang sebagai program stimulan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak pandemi. Menkominfo Johnny G. Plate mengambil keputusan itu setelah mencermati kondisi yang berlangsung. Bahkan, untuk menjamin kesehatan pelaksana dan peserta, pelaksanaan pelatihan berlangsung dalam jaringan (*daring*). Jika pun berlangsung di luar jaringan (*luring*), tentu dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

Tahun ini, Program Digital Talent Scholarship menargetkan pelatihan peningkatan kompetensi bagi lebih dari 45.000 peserta yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional. Program pelatihan DTS 2020 ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum dan aparatur sipil negara (ASN) di bidang teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era Industri 4.0. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini berupaya untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran *triple helix* (instansi pemerintahan, sektor swasta, dan institusi pendidikan) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital.

Dengan dukungan mitra kerja dan pelaksana, perumusan ulang skema dan adaptasi di masa pandemi, membuat DTS 2020 dapat dilaksanakan dengan pembukaan 6 (enam) akademi, yaitu:

1. Fresh Graduate Academy (FGA)

Fresh Graduate Academy (FGA), Program pelatihan berbasis kompetensi bersama GlobalTech yang ditujukan kepada peserta pelatihan bagi lulusan S1 bidang TIK dan MIPA, dan terbuka bagi penyandang disabilitas.



FGA merupakan program pelatihan peningkatan kompetensi bidang TIK yang berfokus pada 7 (tujuh) tema pelatihan yakni CCNA Network Engineer, CCNA Cyberoperation Specialist, Cloud Computing, Core System Administration, Java Programming, Database Design and Programming with SQL, dan Data Science. Penyelenggaraan pelatihan ini bermitra dengan 5 global tech companies yakni Amazon Web Service (AWS) Educate, Cisco Networking Academy, IBM Indonesia, Oracle Academy, dan Red Hat Academy.

Pelatihan ini terselenggara di 55 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelatihan ini ditujukan bagi lulusan D3/D4/S1 bidang TIK, MIPA, dan Teknik lainnya dibuktikan dengan ijazah/SKL serta belum atau tidak sedang bekerja agar memiliki kompetensi profesional yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0. Pelatihan FGA ini diselenggarakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 ini dengan berbagai tema pelatihan. Penyelenggaraan program FGA pada tahun 2020 ini akan berlangsung selama 210 Jam Pelatihan (JP) secara daring. Di akhir pelatihan, peserta akan diberikan pembekalan pasca pelatihan berupa pengembangan *soft-skill* selama 12 JP.

Perguruan tinggi dalam program ini berperan menjadi penyedia sarana dan prasarana serta instruktur pelatihan sesuai dengan skema pelatihan. Di akhir pelatihan, peserta yang memenuhi ketentuan akan mendapatkan kesempatan mengikuti program sertifikasi industri sesuai dengan tema pelatihan yang diambil.

Diharapkan, dengan terselenggaranya program FGA ini, dapat memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan S1 dan D3/D4 yang akan berdampak untuk mengurangi angka pengangguran, serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

2. Vocational School Graduate Academy (VSGA)

Program pelatihan berbasis kompetensi nasional yang ditujukan kepada peserta pelatihan bagi lulusan SMK dan Pendidikan Vokasi bidang TI, Telekomunikasi, Desain, dan Multimedia. VSGA adalah program pelatihan intensif berbasis kompetensi nasional yang ditujukan bagi lulusan Pendidikan Vokasi (SMK, D3, D4) bidang TIK, Elektro, Telekomunikasi, Desain Komunikasi Visual, Animasi, Multimedia yang belum bekerja.



Program VSGA bertujuan untuk mencetak talenta/SDM level teknisi dalam bidang digital. Penyelenggaraan program VSGA 2020 berlangsung selama 102 jam pelajaran secara daring yang meliputi pelatihan technical skills, soft skills development dan uji kompetensi/sertifikasi. Dalam penyelenggaraan program VSGA, Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan 37 mitra Perguruan Tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSP). Pada akhir pelatihan, peserta pelatihan akan disertifikasi kompetensi berbasis SKKNI oleh LSP.

Dengan terselenggaranya program VSGA ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan vokasi yang akan berdampak dalam upaya pengurangan angka pengangguran serta mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang teknologi.

Gambar 24
Pelatihan Vocational School Graduate Academy (VSGA)



3. Online Academy (OA)

Program pelatihan OA merupakan program pelatihan Online di bidang Teknologi Informasi yang ditujukan kepada peserta pelatihan bagi Masyarakat umum, ASN, mahasiswa, dan pelaku industri.

OA memberikan beasiswa pelatihan dan sertifikasi kepada peserta terpilih untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang IT. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan beberapa Global Technology Company seperti Cisco, Redhat, Google, Progate dan Asosiasi Digital Marketing Indonesia serta mitra lainnya.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang IT untuk dapat bersaing di ranah global. Peserta belajar mandiri secara daring dan dapat mengikuti *live session* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

4. Thematic Academy (TA)

Program pelatihan TA merupakan program pelatihan multisektor bagi pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan kepada peserta pelatihan dari jenjang dan multidisiplin yang berbeda. TA ditujukan spesifik pada sektor industri/kalangan tertentu, dimana kurikulumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan industri yang bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja terampil di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di era industri 4.0 seperti saat ini. Pada pelaksanaannya, Kementerian Kominfo melibatkan beberapa pihak terkait mulai dari akademisi, industri, hingga beberapa komunitas sesuai masing-masing tema.

Program Thematic Academy 2020 berfokus pada lima (5) tema pelatihan yang diharapkan dapat menjangkau seluruh aspek dan golongan masyarakat. Tema pelatihan tersebut antara lain adalah Digital Marketing, IT Project Management, Big Data (for social science), IT Perbankan, dan tema spesifik untuk eks Buruh Migran. Secara umum pelatihan ini ditujukan bagi lulusan D3/D4 dan S1 yang ingin meningkatkan keterampilan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan industri. Diharapkan, dengan terselenggaranya program TA ini, dapat memberikan kemampuan siap pakai bagi lulusan D3/D4 dan S1, serta dapat berdampak langsung dalam mengurangi angka pengangguran, sekaligus mampu memenuhi kebutuhan tenaga terampil di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Gambar 25
Program Pelatihan *Thematic Academy* (TA)



5. Regional Development Academy (RDA)

Program pelatihan RDA merupakan program pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi ASN di Kawasan Prioritas Pariwisata dan 122 Kabupaten Prioritas Pembangunan.

RDA merupakan program pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi ASN di Kawasan Pariwisata dan 122 Kabupaten Prioritas. Pelatihan ini berfokus pada 5 (lima) tema yaitu Analisis Media Sosial, Big Data Analytics, Junior Graphic Designer, Junior Network Administrator dan Smart City. Penyelenggaraan Program RDA berlangsung secara daring (online) dengan durasi yang berbeda-beda sesuai dengan tema pelatihan. Diharapkan, dengan terselenggaranya Program RDA ini para peserta mendapatkan pengetahuan dan kompetensi dari sisi *soft-skill* dan *hard-skill* di tema pelatihan yang diikuti. Hasil dari pelatihan akan dikemas dalam bentuk laporan yang ditujukan kepada pimpinan pemerintah daerah.

6. Digital Entrepreneurship Academy (DEA)

Program pelatihan DEA merupakan program pelatihan pengembangan sumber daya manusia yang ditujukan kepada talenta digital di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

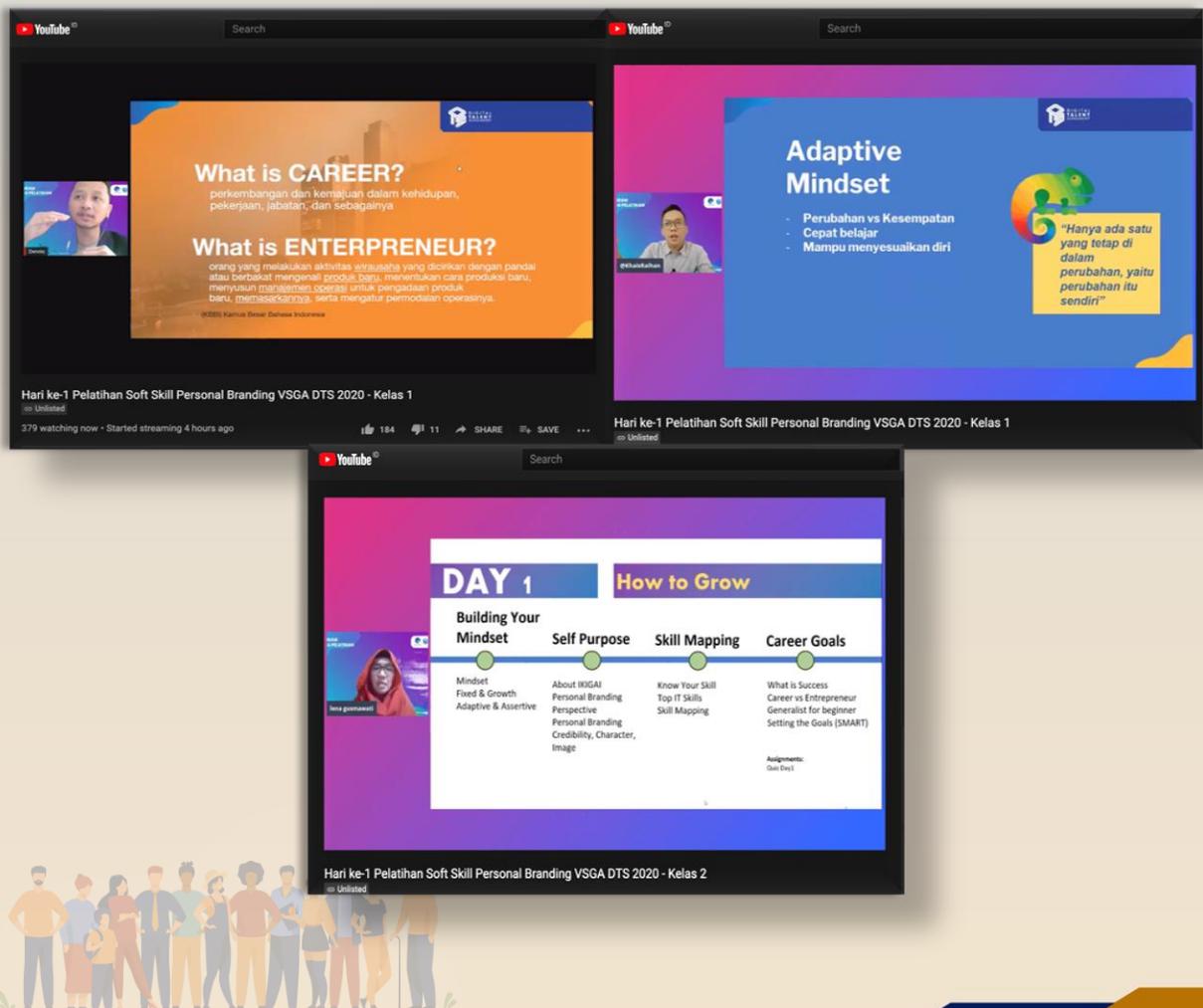
DEA merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Mitra Global Tech Company dan Start-up Lokal. Sasaran program ini adalah mencetak talenta digital di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul untuk menghadapi era revolusi industri 4.0.

Seperti tahun sebelumnya, DTS 2020 juga melibatkan mitra *global technology* untuk memberikan sertifikasi internasional kepada peserta yang memenuhi syarat. Selain itu di tahun 2020, DTS bekerjasama dengan BUMN ternama untuk melakukan pemagangan setelah mengikuti salah satu tema pelatihan.



Beberapa akademi yang diminati oleh peserta, pada akhirnya dibuka dalam beberapa *batch* pelatihan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka *upgrading* dan *upskilling* selama masa pandemi. Pandemi bukan hambatan agar tetap #MakinJagoDigital. Meski berlangsung secara daring, setiap peserta dapat berpartisipasi aktif. Tercatat sebanyak 102.313 orang mendaftarkan akun pada laman digitalent.kominfo.go.id. Dari jumlah tersebut, 70.660 di antaranya lanjut mendaftarkan diri pada akademi yang diminati dan mengikuti tahapan seleksi sebagai peserta. Dan pada akhir pelatihan, peserta juga didampingi melalui kegiatan pasca pelatihan dengan memberikan bekal pelatihan membangun *personal branding*, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, belajar menyusun *Curriculum Vitae*, trik menghadapi *interview* pekerjaan, tes psikologi untuk menemukan minat dan bakat. Program pasca pelatihan hanya ditujukan bagi alumni *Fresh Graduate Academy*, *Vocational School Graduate Academy* dan *Thematic Academy*.

Gambar 26
Program Pasca Pelatihan



Alumni DTS merasa sangat terbantu dengan adanya pelatihan dan program pasca pelatihan tersebut terutama bagi peserta yang pernah mengalami PHK untuk mengisi waktu dengan kegiatan bermanfaat sekaligus menambah portofolio pada CV dan juga bagi *fresh graduate* yang mempersiapkan diri untuk *interview* pekerjaan pertamanya. Dengan kondisi tahun 2020 yang membawa penduduk di seluruh dunia memasuki tatanan normal baru, pandemi tidak melumpuhkan minat masyarakat untuk #MakinJagoDigital.

Tidak berhenti sampai disitu, DTS juga sekaligus memfasilitasi pertemuan dengan penyedia kerja melalui aplikasi SIMONAS. SIMONAS adalah *platform job portal* yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang diluncurkan pada September 2019. Database peserta Simonas adalah peserta lulusan dari program Digital Talent Scholarship (DTS) yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Balitbang SDM) Kominfo RI.

Sampai dengan 31 Desember 2020, sebanyak 58.116 Peserta telah mengikuti program *Digital Talent Scholarship* (DTS). Sehingga, perhitungan persentase capaian yang didapatkan pada tahun 2020 didapatkan dengan cara membandingkan antara realisasi 58.116 Peserta DTS dengan target awal sebanyak 45.000 Peserta DTS. Rincian peserta dari setiap akademi adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Rincian Peserta DTS dari Setiap Akademi

| Akademi | Peserta | Certified |
|--------------|---------------|---------------|
| OA | 22.345 | 11.035 |
| VSGA | 4.003 | 2.815 |
| FGA | 4.081 | 3.149 |
| TA | 1.536 | 1.081 |
| RDA | 957 | 697 |
| DEA | 25.194 | 16.982 |
| Total | 58.116 | 35.759 |

Dari jumlah total peserta yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan dan sertifikasi dalam Program *Digital Talent Scholarship* (DTS), jumlah tersebut terdiri atas peserta dari masyarakat umum dan ASN. Peserta yang berasal dari ASN tercatat dapat berpartisipasi pada 2 (dua) akademi yakni *Regional Development Academy* (RDA) dan *Online Academy* (OA).

Untuk rincian peserta ASN dari RDA dapat dilihat pada tabel di atas karena seluruh peserta RDA adalah ASN. Sementara itu, peserta dari kalangan ASN pada OA adalah 4.261 peserta dengan 2.344 peserta di antaranya *certified* (55%). Dari jumlah tersebut, 142 orang dinyatakan berhak sertifikasi global (tidak seluruh skema pelatihan pada OA memungkinkan berlanjut ke sertifikasi global). Namun hanya sekitar 30 peserta yang bersedia melanjutkan sertifikasi global. Sebanyak 16 peserta yang bersedia melanjutkan, berhasil mendapatkan sertifikasi global.

Selain itu, pelatihan SDM Vokasi bidang Kominfo juga turut berkontribusi pada peningkatan kompetensi talenta digital pada level menengah bagi peserta dengan latar belakang pendidikan SMK dengan pemberian pelatihan SKKNI dengan KKNi level 3 dan 4. Perbedaan tingkat KKNi ini yang membedakan dengan akademi VSGA yang memberikan pelatihan *level up* dengan level KKNi 4 dan 5. Dari target 2.500 peserta dengan penyelenggaraan di 10 UPT Badan Litbang SDM bagi peserta di wilayah kerja masing-masing, capaian pelatihan SDM Vokasi adalah sebanyak 3.071 peserta dengan realisasi peserta tersertifikat sebanyak 1.802 dari total 2.566 peserta yang mengikuti sertifikasi. Sehingga, persentase tingkat kelulusan/kompetensi pelatihan SDM Vokasi bidang Kominfo adalah sebesar 70,22%. Target awal persentase kompetensi/kelulusan adalah 70%. Oleh karena itu, capaian ini juga melampaui target dengan persentase sebesar 102,97%. Capaian ini patut diapresiasi lebih karena baru mulai dilaksanakan bulan September 2020 mengingat tidak semua tema pelatihan dapat diselenggarakan secara daring.



PELATIHAN DAN SERTIFIKASI SKKNI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Gambar 27

Ilustrasi Pelatihan dan Sertifikasi SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika

Salah satu agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan adalah percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan yang strategis juga menjadi kebijakan pasar tenaga kerja tahun 2025. Untuk mempersiapkan hal tersebut, peningkatan jumlah tenaga terampil untuk menghadapi keterbukaan pasar merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindarkan.

Pengembangan SDM Nasional bidang komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing bangsa telah diupayakan Kementerian Kominfo sejak didirikan pada tahun 2005 diantaranya melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional pada Pasal 14 yang menyatakan tentang pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja dan lembaga sertifikasi profesi dalam sistem pelatihan kerja nasional. Berdasarkan PP tersebut, Kementerian Kominfo bertugas sebagai instansi pembina teknis standardisasi profesi tenaga kerja nasional sektor kominfo dimana kompetensi SDM dilakukan melalui uji sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bidang Kominfo pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang menjadi mitra dan dibuktikan melalui Sertifikat kompetensi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dari target 2.500 peserta dengan penyelenggaraan di 10 UPT Badan Litbang SDM bagi peserta di wilayah kerja masing-masing, capaian pelatihan SDM Vokasi adalah sebanyak 3.071 peserta dengan realisasi peserta tersertifikat sebanyak 1.802 dari total 2.566 peserta yang mengikuti sertifikasi. Sehingga, persentase tingkat kelulusan/kompetensi pelatihan SDM Vokasi bidang Kominfo adalah sebesar 70,22%. Target awal persentase kompetensi/kelulusan adalah 70%. Oleh karena itu, capaian ini juga melampaui target dengan persentase sebesar 102,97%.

Jumlah ini merupakan akumulasi dari capaian satuan kerja dan UPT penyelenggara sertifikasi SKKNI yakni Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, STMM Yogyakarta, BBPSDMP Kominfo Medan, BBPSDMP Kominfo Makassar, BPSDMP Kominfo Jakarta, BPSDMP Kominfo Bandung, BPSDMP Kominfo Yogyakarta, BPSDMP Kominfo Surabaya, BPSDMP Kominfo Banjarmasin, BPSDMP Kominfo Manado, dan BPPTIK Cikarang.

Gambar 28
Tema – Tema Pelatihan SKKNI Tahun 2020

Tema-tema pelatihan SKKNI yang diberikan pada tahun 2020 meliputi:

Media Relation Officer;

Junior Programming;

Video Editor;

Junior Web Developer;

Basic Office Operator;

Junior Office Operator;

Junior Graphic Designer;

Junior Network Administrator;

Junior Networking;

Junior Graphic Design.



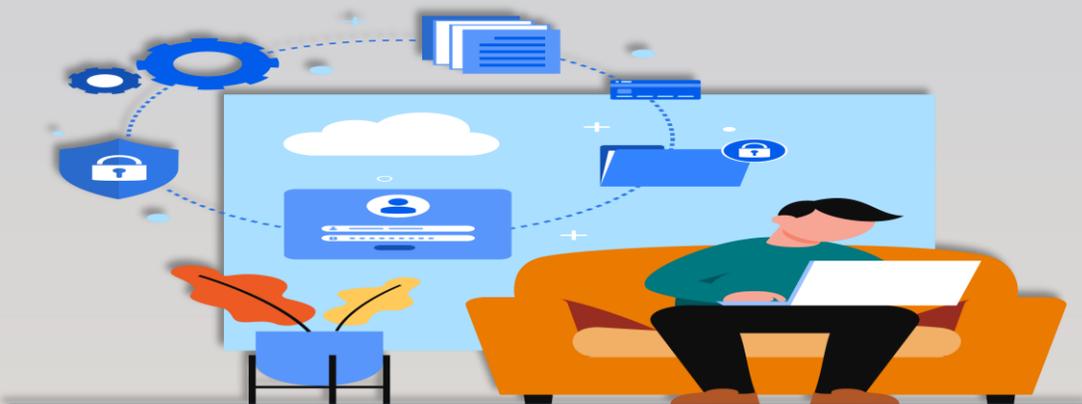
Berikut gambaran capaian pengembangan SDM yang profesional di bidang komunikasi dan informatika melalui pelatihan dan sertifikasi dalam rangka mendukung *digital economy* dari tahun ke tahun :

Tabel 18
Capaian Pengembangan SDM Yang Profesional di Bidang Komunikasi dan Informatika Melalui Pelatihan dan Sertifikasi

| Persentase (%) Peserta Pelatihan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika yang Tersertifikasi dari Total Peserta Pelatihan SKKNI | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Target | 7.575 orang | 70% (dari 1600 peserta) | 70% (dari 10.650 peserta) | 70% (dari 6.000 peserta) | 70% (dari 12.000 peserta) | 70% (dari 2.500 peserta) |
| Realisasi | 63,53% (7.488 kompeten dari 11.785 peserta) | 76,9% (1.398 kompeten dari 1.817 peserta) | 81,58% (9.407 kompeten dari 11.531 peserta) | 81,05% (5.129 kompeten dari 6.328 peserta) | 82% (10.121 kompeten dari 12.309 peserta) | 70,22% (1.802 kompeten dari 2.566 peserta yang mengikuti sertifikasi) |



PELATIHAN GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE COMMUNICATIONS ASSOCIATION (GSMA)



Gambar 29
Ilustrasi Pelatihan Global System For Mobile
Communications Association (GSMA)

GSMA merupakan perkumpulan dari operator seluler seluruh dunia yang beranggotakan lebih dari 750 operator telekomunikasi dan hampir dari 400 perusahaan yang bergerak di ekosistem telekomunikasi meliputi produsen perangkat, perusahaan piranti lunak dan internet.

Pada tahun perdana pelaksanaan secara daring, pelatihan ini dibuka sebanyak 4 (empat) *batch* dengan total peserta 1.191 yang turut mendaftarkan diri ke Sekretariat Badan Litbang SDM. Namun, ASN Kemenkominfo dapat mendaftarkan diri langsung ke laman GSMA dengan menggunakan alamat surel Kemenkominfo sehingga jumlah tersebut belum tentu menggambarkan keseluruhan peserta ASN Kemenkominfo yang mengikuti pelatihan dengan mendaftarkan diri langsung ke laman GSMA.

Pelatihan dilaksanakan secara daring dibagi ke dalam 7 (tujuh) sesi *online training* lengkap dengan kuis pada tiap sesi agar peserta dapat melanjutkan ke sesi setelahnya. Selain itu juga terdapat 2 (dua) *live chat sessions* dengan peserta dari berbagai belahan dunia dan *Final Project* yang bersifat tentatif. Peserta yang mengerjakan *final project* akan otomatis mendapatkan tambahan 2 jam pelajaran (2 JP) yang akan diakumulasi dan dicantumkan pada sertifikat.



Berikut detail peserta dan tema pelatihan yang dipilih:

Tabel 19
Detail Peserta dan Tema Pelatihan

| NO | Tema Pelatihan | Jumlah |
|--------------|--|--------------|
| 1. | <i>Big Data Analytics and Artificial Intelligence</i> | 103 |
| 2. | <i>Bridging the Mobile Gender Gap</i> | 29 |
| 3. | <i>5G – the Path to the Next Generation</i> | 141 |
| 4. | <i>Unlocking Rural Mobile Coverage</i> | 54 |
| 5. | <i>Spectrum Management for Mobile Telecommunications</i> | 124 |
| 6. | <i>Competition Policy in the Digital Age</i> | 88 |
| 7. | <i>Digital Identity for the Underserved</i> | 69 |
| 8. | <i>Responding to Disasters and Humanitarian Crises</i> | 101 |
| 9. | <i>Internet of Things</i> | 167 |
| 10. | <i>Mobile Sector Taxation</i> | 64 |
| 11. | <i>Principles of Mobile Privacy</i> | 155 |
| 12. | <i>Radio Signals and Health</i> | 30 |
| 13. | <i>Leveraging Mobile to Achieve the SDG Targets</i> | 66 |
| Total | | 1.191 |



PENYELENGGARAAN BEASISWA BIDANG KOMINFO



Gambar 30
Logo Beasiswa Kominfo

Dalam rangka memajukan taraf kehidupan bangsa melalui penciptaan SDM Indonesia yang handal dan profesional serta berdaya saing tinggi, Kementerian Kominfo meluncurkan program Beasiswa Dalam dan Luar Negeri di bidang komunikasi dan informatika sejak tahun 2007.

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi diharapkan juga dapat membantu percepatan pelaksanaan transformasi digital yang sedang menjadi prioritas nasional saat ini. Pada tahun 2020, Indonesia masih berada pada posisi 56 dari 63 negara berdasarkan *IMD World Digital Competitiveness ranking*. Meskipun demikian, peningkatan posisi Indonesia dibanding tahun 2018 didukung oleh peningkatan ranking pada faktor “*knowledge*” yang didukung oleh sub-faktor “*talent, training and education and scientific concentration*”. Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, yang merupakan strategi pertama dalam Transformasi Ekonomi Indonesia pasca COVID19, diharapkan menjadi pilar utama yang dapat mendorong peningkatan Indeks Daya Saing Digital Indonesia.

Beasiswa ditujukan bagi aparatur pemerintah, industri dan masyarakat umum yang bekerja di bidang komunikasi dan informatika, serta bagi pegawai internal Kementerian Kominfo. Program beasiswa diharapkan dapat menciptakan SDM nasional bidang kominfo yang kompeten melalui pendidikan formal sehingga sesuai dengan standar kompetensi profesi. Program ini juga bertujuan meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung penguatan ekonomi digital di Indonesia. Diharapkan program Beasiswa dapat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM profesional di bidang TIK sebagai agen-agen perubahan dalam pengembangan industri informasi serta ekonomi digital. Program Studi disesuaikan dengan kebutuhan khusus birokrasi pemerintah pusat dan daerah (*tailor-made programme*) serta perkembangan TIK secara nasional.

Pelaksanaan beasiswa ini merupakan salah satu bentuk peningkatan daya saing Indonesia dengan pembangunan SDM melalui pendidikan/pelatihan TIK. Menurut riset Oxford Business Group 2018, jenis keterampilan yang paling dibutuhkan di Indonesia adalah kepemimpinan, keteknikan, dan teknologi komputer. Pemberian beasiswa luar negeri juga merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas SDM tingkat *Advanced Digital Skill*.

Pada mulanya, penyelenggaraan Beasiswa Pascasarjana dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi sesuai amanat Permenkominfo mengenai SOTK. Namun mengantisipasi perubahan struktur organisasi yang kerap terjadi dan perubahan kebijakan yang berlangsung cepat, Sekretariat Badan Litbang SDM sejak tahun 2017 menjadi pelaksana program Beasiswa Luar Negeri. Tahun 2020 merupakan tahun kedua Beasiswa Dalam Negeri juga dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Litbang SDM sehingga Sekretariat Badan Litbang SDM mengerjakan Beasiswa Dalam dan Luar Negeri. Namun, pandemi Covid19 yang melanda tanah air menyebabkan penyelenggaraan beasiswa luar negeri tahun 2020 terpaksa ditiadakan.

Program beasiswa magister dalam negeri diselenggarakan bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia untuk jurusan Informatika dan komunikasi, diantaranya UI, UGM, ITB, ITS, UNAIR, USU, UNHAS, UNS, dan UNAND dengan jurusan sebagai berikut:

Tabel 20
Program Beasiswa Magister Dalam Negeri

| KOMUNIKASI | |
|---|---|
| Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara |
| Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas |
| Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia |
| Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada |
| Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret |
| Ilmu Media dan Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga |
| INFORMATIKA | |
| e-Government | Fakultas Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada |
| Layanan Teknologi Informasi (LTI) | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung |
| Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi (RMKI) | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung |
| Pengelola TIK Pemerintahan (Jurusan Teknik) | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |

| | |
|--|---|
| MTI <i>e-Government</i> | Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia |
| Manajemen Keamanan Jaringan Informasi (MKJI) | Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia |
| BIDANG TERKAIT | |
| Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada |

Universitas Gadjah Mada



Gambar 31
Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan mitra perguruan tinggi negeri berakreditasi A yang menjadi salah satu mitra awal Program Beasiswa S2 Dalam Negeri. Hingga saat ini terdapat 3 (tiga) program studi yang menjadi mitra pengelola Program Beasiswa Kementerian Kominfo yaitu Magister Ilmu Komunikasi, Magister Teknologi Informasi Konsentrasi *e-Government*, serta Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MKIK) konsentrasi transformasi digital sektor publik.

Program studi magister Teknologi Informasi konsentrasi *e-Government* yang berada di bawah Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi telah bergabung menjadi mitra beasiswa sejak tahun 2007. Dengan status akreditasi A, program studi ini menawarkan beberapa mata kuliah wajib konsentrasi di antaranya *IT Project Management*, layanan elektronik (*e-Services*), Keselarasan Teknologi Informasi dan Kecerdasan Bisnis. Pada tahun 2011, Program studi Ilmu Komunikasi yang terakreditasi A bergabung menjadi mitra Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi yang mulai ditawarkan pada tahun yang sama.

Program studi yang terakhir bergabung sebagai mitra beasiswa pada tahun 2020 adalah Program studi Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MKIK) konsentrasi Transformasi Digital Sektor Publik yang berada di bawah Sekolah Pascasarjana UGM. Dengan status terakreditasi A, Program Beasiswa ini diselenggarakan dengan tujuan untuk dapat memberikan perubahan paradigma dan pembuatan kebijakan aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah yang mempertimbangkan isu-isu dinamika transformasi digital sektor publik, serta meningkatkan kapasitas berpikir kritis dan kemampuan analisis yang kuat dalam kajian dan pengembangan kepemimpinan.

Institut Teknologi Bandung



Gambar 32
Institut Teknologi Bandung

Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan perguruan tinggi negeri terakreditasi A yang juga menjadi mitra Program Beasiswa sejak awal pendirian Program tahun 2007. Program Magister Teknik Elektro Jalur Pilihan Layanan Teknologi Informasi berada di bawah Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) menawarkan beberapa mata kuliah pilihan di antaranya Manajemen Keamanan Informasi, *Business Intelligent & Data Warehouse*, *e-Business* dan Etika dan Hukum TI.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember



Gambar 33
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Perguruan tinggi negeri terakreditasi A yang berlokasi di Jawa Timur ini juga salah satu mitra awal Program Beasiswa S2 Informatika yang bergabung sejak tahun 2007. Program studi Magister Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang berada di bawah Departemen Teknik Elektro menawarkan beberapa mata kuliah pilihan dengan isu terkini di antaranya Big Data dan Komputasi Awan, Sistem Cerdas, *e-Commerce* dan *e-Health*.

Universitas Indonesia



Gambar 34
Universitas Indonesia

Universitas Indonesia (UI) merupakan perguruan tinggi negeri terakreditasi A yang mulai menjadi mitra Program Beasiswa S2 Dalam Negeri sejak tahun 2011. Hingga tahun 2020, terdapat 3 (tiga) program studi yang menjadi mitra Program Beasiswa yaitu Program Magister Ilmu Komunikasi, Program Magister Teknologi Informasi, serta Program Magister Manajemen Keamanan Jaringan Informasi.

Program Magister Ilmu Komunikasi telah menjadi mitra Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi sejak tahun 2011 dan memiliki akreditasi A. Program Magister Teknologi Informasi (*e-Government*) yang berada di bawah Fakultas Ilmu Komputer juga bergabung menjadi mitra beasiswa sejak tahun 2007. Program Magister ini menawarkan mata kuliah pilihan diantaranya Manajemen Resiko TI, Pengelolaan Data Besar dan Kriptografi Terapan. Selain 2 Program Studi tersebut, pada tahun 2017 Departemen Teknik Elektro - Fakultas Teknik bergabung menjadi mitra beasiswa dengan menawarkan Program Magister Teknik kekhususan Manajemen Keamanan Jaringan Informasi (MKJI). Pembentukan Program Beasiswa dan Program Studi ini didasarkan atas pertimbangan minimnya institusi akademik yang memiliki program untuk menghasilkan SDM di bidang Keamanan Jaringan Informasi.

Universitas Andalas



Gambar 35
Universitas Andalas

Universitas Andalas (Unand) merupakan perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A yang mulai bergabung menjadi mitra Program Beasiswa sejak tahun 2012. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Unand diharapkan dapat menysasar para PNS dan masyarakat umum di wilayah Pulau Sumatera untuk dapat meningkatkan kompetensi di bidang Ilmu Komunikasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan SDM di instansi pemerintah dan swasta di wilayah Pulau Sumatera. Program Studi ini di antaranya menawarkan Manajemen Reputasi, Krisis dan *Public Relations* dan Sistem Pelayanan Informasi dan Kehumasan Pemerintahan.

Universitas Airlangga



Gambar 36
Universitas Airlangga

Universitas Airlangga (Unair) merupakan perguruan tinggi negeri terakreditasi A yang menjadi mitra beasiswa sejak tahun 2013. Program Magister Media dan Komunikas menawarkan mata kuliah di antaranya Media, Teknologi dan Masyarakat, Media Ekonomi dan Manajemen Media Massa, dan Media dan Komunikasi Politik.

Universitas Sebelas Maret



Gambar 37
Universitas Sebelas Maret

Universitas Sebelas Maret (UNS) merupakan perguruan tinggi negeri terakreditasi A yang juga menjadi mitra beasiswa sejak 2013. Prodi Magister Ilmu Komunikasi menawarkan beberapa mata kuliah di antaranya Perencanaan Kebijakan Komunikasi, Manajemen Humas dan Komunikasi Organisasi.

Universitas Hasanuddin



Gambar 38
Universitas Hasanuddin

Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah mitra Program Beasiswa yang berlokasi di Sulawesi Selatan dan memiliki akreditasi A. Program Studi magister Ilmu Komunikasi yang menjadi mitra sejak 2013 menawarkan beberapa mata kuliah di antaranya Kelembagaan Negara dan Kebijakan Publik, Komunikasi Politik dan Opini Publik, Etika Perundang-undangan Komunikasi, Media Power dan Kebijakan Publik, dan Media Baru dan Kebebasan Berpendapat.

Universitas Sumatera Utara



Gambar 39
Universitas Sumatera Utara

Universitas Sumatera Utara (USU) saat ini berstatus sebagai perguruan tinggi negeri dengan akreditasi A yang juga bergabung menjadi mitra Program Beasiswa sejak 2013. Program studi Magister Ilmu Komunikasi diharapkan dapat membantu membangun kompetensi SDM komunikasi untuk instansi pemerintahan di wilayah Pulau Sumatera. Beberapa mata kuliah yang ditawarkan adalah Ekonomi Politik dan Media dan Globalisasi Perkembangan Teknologi Komunikasi.

PENERIMAAN BEASISWA

Gambar 40
Penerimaan Beasiswa



Dari target sebanyak 120 peserta, capaian penerimaan mahasiswa pascasarjana TA 2020 adalah 128 peserta atau sekitar 106,67%. Berikut gambaran penerimaan Beasiswa tahun anggaran 2020:

Grafik 5
Beasiswa Bidang Kominfo



Rincian realisasi penerima Beasiswa Dalam Negeri Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri Reguler Tahun 2020

| No. | Perguruan Tinggi | Fakultas | Jurusan | Program Studi | Konsentrasi /Ops | Kuota | Jumlah Penerima Beasiswa |
|--------------|-------------------------------------|---|---|--|---|------------|--------------------------|
| 1 | Universitas Indonesia | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Departemen Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | - | 5 | 6 |
| 2 | | Fakultas Teknik | Departemen Teknik Elektro | Magister Manajemen Keamanan Jaringan Informasi (MKJI)* | - | 8 | 11 |
| 3 | | Fakultas Ilmu Komputer | | Magister Teknologi Informasi | - | 13 | 14 |
| 4 | Universitas Gadjah Mada | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Departemen Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | Minat Studi Komunikasi, Kebijakan Komunikasi, Kajian Media dan Budaya, Manajemen Komunikasi | 10 | 10 |
| 5 | | Fakultas Teknik | Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi | Magister Teknologi Informasi | konsentrasi e-Government | 13 | 9 |
| 6 | | Sekolah Pascasarjana | | Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | Minat studi Transformasi Digital Sektor Publik | 0 | 15 |
| 7 | Institut Teknologi Bandung | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | | Magister Teknik Elektro | Opsi Layanan Teknologi Informasi | 13 | 9 |
| 8 | | Sekolah Teknik Elektro dan Informatika | | Magister Teknik Elektro | Opsi Rekayasa dan Manajemen Keamanan Informasi* | 0 | 0 |
| 9 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas | Departemen Teknik Elektro | Magister Teknik Elektro | Konsentrasi Telematika (Pengelola TIK Pemerintahan) | 13 | 7 |
| 10 | Universitas Negeri Sebelas Maret | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | | Magister Ilmu Komunikasi | Minat Studi Manajemen Komunikasi | 10 | 10 |
| 11 | Universitas Sumatera Utara | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | | Magister Ilmu Komunikasi | - | 10 | 7 |
| 12 | Universitas Andalas | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | | Magister Ilmu Komunikasi | Minat Studi Governance Public Relation | 10 | 10 |
| 13 | Universitas Hasanuddin | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Departemen Ilmu Komunikasi | Magister Ilmu Komunikasi | Minat Studi Manajemen Komunikasi | 10 | 10 |
| 14 | Universitas Airlangga | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Departemen Komunikasi | Magister Media dan Komunikasi | Minat Studi Media & Minat Studi Komunikasi | 5 | 4 |
| TOTAL | | | | | | 120 | 122 |

Grafik 6
Penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri Tahun 2021

Penerima Beasiswa S2 Dalam Negeri Tahun 2021



Dalam rangka peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Kemenkominfo, ASN yang memenuhi syarat tugas belajar juga dapat melanjutkan pendidikan tinggi di perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan Kemenkominfo dan bebas memilih jurusan termasuk jurusan-jurusan di luar dari skema regular tersebut di atas. Beasiswa internal dibuka untuk tingkat pendidikan S2 bagi ASN di lingkungan Kemenkominfo. Sementara beasiswa S3 hanya diperuntukkan bagi ASN di lingkungan Badan Litbang SDM dengan formasi JFT Dosen (STMM Yogyakarta) dan Peneliti (di pusat maupun UPT). Kemenkominfo juga membiayai pendidikan tingkat Strata 1/Sarjana bagi mahasiswa S1 disabilitas yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Berikut rekap beasiswa internal Kemenkominfo tahun 2020:

Tabel 22
Rekap Penerima Beasiswa Internal Tahun 2020

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|--------------|--------------------|----------|
| 1. | S1 | 1 |
| 2. | S2 | 3 |
| 3. | S3 | 2 |
| TOTAL | | 6 |

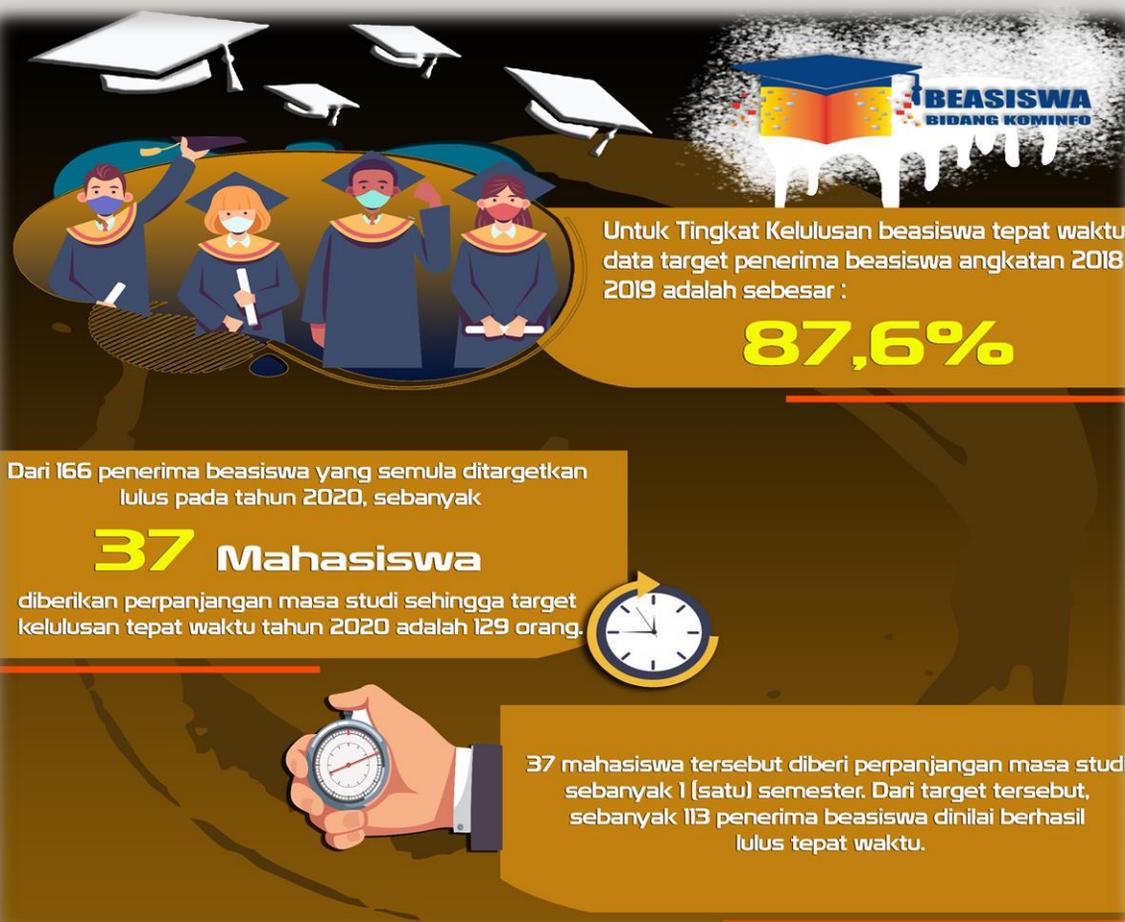
Tabel 23
Rekap Penerima Beasiswa Internal Tahun 2020 (2)

| Instansi | Program Studi | Perguruan Tinggi | Jenjang Akademik |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Inspektorat III – Inspektorat Jenderal Kominfo | Perencanaan dan Kebijakan Publik | UI | S2 |
| Direktorat Penyiaran Ditjen PPI | Ilmu Komunikasi | UI | S2 |
| Balai Monitor SFR Kelas II Palu | Teknik Elektro | UNHAS | S2 |
| Puslitbang Aptika IKP Badan Litbang SDM | Ilmu Hukum | UGM | S3 |
| Puslitbang SDPPPI | Ilmu Komputer | UI | S3 |
| YPAC | Ilmu Komunikasi | UGM | S1 |

TINGKAT KELULUSAN



Gambar 41
Ilustrasi Kelulusan



Gambar 42
Tingkat Kelulusan Beasiswa Tepat Waktu

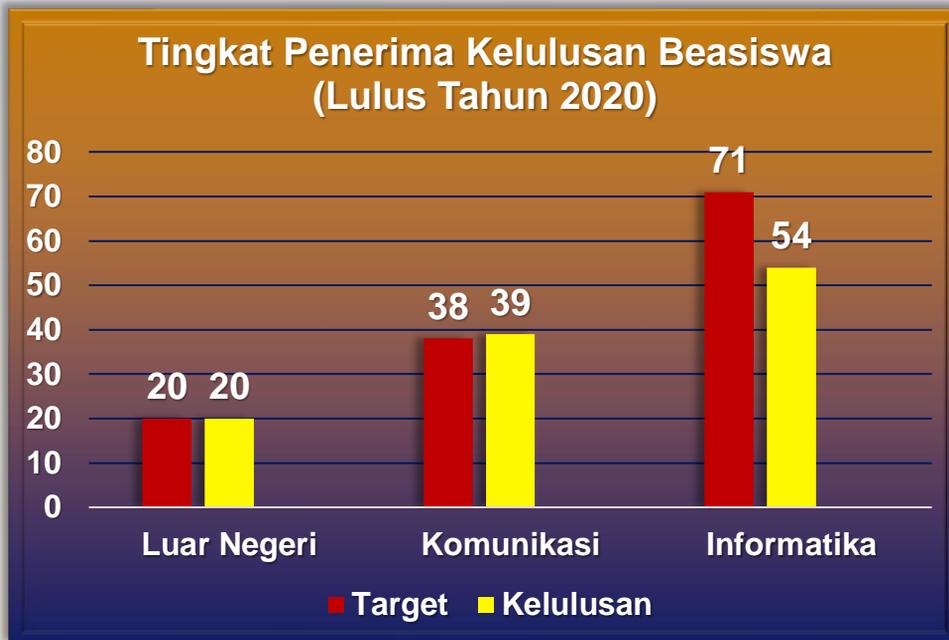
Banyak faktor penyebab melesetnya kelulusan penerima beasiswa. Di antaranya adalah: mahasiswa belum menyelesaikan tesis, pembimbing tesis yang kurang koordinatif, pergantian judul tesis mendekati habisnya masa aktif tugas belajar, tidak fokus karena harus mengerjakan tugas kantor/kedinasan di saat bersamaan, masa berlaku tugas belajar habis sehingga penerima beasiswa diwajibkan kembali ke instansi asal, alasan kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu, di tahun 2020 ini seluruh dunia dilanda pandemi global virus Covid-19 sehingga pembatasan pergerakan terpaksa diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus lebih jauh lagi. Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan drastis yang berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan termasuk pada bidang pendidikan. Pemberlakuan pembelajaran jarak jauh juga harus dilaksanakan di tingkat pendidikan tinggi. Metode pembelajaran yang baru ini cukup menyulitkan adaptasi bagi mahasiswa yang berada di semester akhir dan sedang menyusun tugas akhir/tesis. Kesulitan komunikasi dengan pembimbing menjadi pangkal kendala bagi sebagian besar mahasiswa. Namun kesulitan ini justru tidak dirasakan oleh penerima beasiswa yang baru masuk di tahun 2020 karena sejak awal mahasiswa penerima beasiswa 2020 telah menjalani pembelajaran jarak jauh sehingga tidak memerlukan penyesuaian diri yang berarti.

Oleh karena itu, Badan Litbang SDM memberikan perpanjangan masa studi sebanyak 1 (satu) semester dengan tetap membayarkan biaya kuliah dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Hak istimewa ini diberikan hanya bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan yakni di semester terakhir tengah menyusun tesis sampai bagian pengumpulan data penelitian. Bagi mahasiswa yang belum mencapai tahap pengumpulan data tidak berhak diberikan hak istimewa di atas sehingga mereka wajib melanjutkan studi dengan biaya sendiri apabila tidak dapat lulus tepat waktu. Selain itu, mahasiswa yang berhak mendapatkan perpanjangan masa studi adalah mahasiswa yang mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi tempat menempuh studi yang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi mencantumkan alasan rekomendasi perpanjangan masa studi dan status aktual tahap penulisan tugas akhir yang tengah ditempuh mahasiswa terkait. Total sebanyak 37 mahasiswa diberikan perpanjangan masa studi dengan rincian 35 mahasiswa Ilmu Komunikasi dan 2 mahasiswa MKJI UI.

Sementara itu, mahasiswa beasiswa luar negeri angkatan tahun 2018 dapat memenuhi target kelulusan tepat waktu di tahun 2020 baik dari RRT maupun India. Mahasiswa Tsinghua RRT telah kembali ke Indonesia pada Februari 2020 dan melanjutkan studi jarak jauh sampai kelulusannya. Namun tidak semua mahasiswa memilih untuk kembali ke Indonesia. Terdapat seorang mahasiswa yang tetap tinggal di RRT sampai kelulusannya. Sementara itu, mahasiswa India kembali ke tanah air melalui proses repatriasi bersama-sama dengan WNI yang berada di India lainnya pada Mei 2020 dan melanjutkan studi melalui pembelajaran jarak jauh hingga kelulusannya.

Detail angka target dan realisasi kelulusan penerima beasiswa dalam dan luar negeri dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 7
Tingkat Penerima Kelulusan Beasiswa (Lulus Tahun 2020)



PESERTA PENDIDIKAN DIPLOMA IV, STRATA I DAN PENDIDIKAN PELATIHAN TEKNIS DI STMM YOGYAKARTA



Gambar 43
STMM Yogyakarta

Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta (STMM “MMTC” Yogyakarta) adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri yang berada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Keberadaan STMM “MMTC” Yogyakarta diawali pada tahun 1985 dengan nama Diklat Ahli Multi Media yang berada di bawah Departemen Penerangan dan diresmikan oleh Presiden RI kala itu Soeharto, tepatnya pada tanggal 31 Juli 1985. Diklat Ahli Multi Media mendidik mahasiswa yang mereka adalah PNS perwakilan dari RRI dan TVRI seluruh Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan zaman Diklat Ahli Multi Media mengepakkan sayapnya, dan pada tahun 2001 mulai membuka penerimaan mahasiswa baru yang berasal dari PNS Pemerintah Daerah dan masyarakat umum lulusan SLTA.



Gambar 44
Kegiatan di STMM Yogyakarta

Setelah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan, akhirnya pada tanggal 21 April 2014 terbitlah Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media. Mengingat Sekolah Tinggi Multi Media berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI maka sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres tersebut, kemudian diterbitkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media dan Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media sebagai dasar operasional penyelenggaraan pendidikan pada STMM.



Gambar 45
Penyelenggaraan Pendidikan Pada STMM Yogyakarta

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta menyelenggarakan program pendidikan Diploma IV dan Strata I dengan 3 jurusan yaitu:



Gambar 46
Program Studi Penyiaran, Animasi dan Desain, serta
Komunikasi Informasi Publik di STMM Yogyakarta



Gambar 47
Program Pendidikan Diploma IV dan Strata
di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM)
Yogyakarta

Sesuai visi Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan bertaraf Internasional, STMM bertekad untuk mencetak tenaga-tenaga ahli dan profesional yang handal dan siap berkompetisi di bidang Komunikasi dan Informatika (Penyiaran dan Multimedia) dan mengembangkan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Berikut gambaran penyelenggaraan kegiatan akademik, mahasiswa serta diklat yang diselenggarakan di STMM selama 5 tahun terakhir:

Tabel 24
Peserta Pendidikan Diploma- IV, Strata I dan Pendidikan Pelatihan Teknis Tahun 2015-2020

| JENJANG | PROGRAM STUDI | TAHUN AKADEMIK | | | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| S-1 | Manajemen Informasi & Komunikasi | 174 | 229 | 279 | 348 | 415 | 455 |
| D-IV Swadana | Manajemen Produksi Siaran | 526 | 530 | 521 | 543 | 522 | 518 |
| | Manajemen Produksi Pemberitaan | 345 | 344 | 357 | 356 | 372 | 350 |
| | Manajemen Teknik Studio Produksi | 575 | 621 | 592 | 602 | 582 | 581 |
| | Animasi | 178 | 196 | 212 | 207 | 210 | 193 |
| | Desain Teknologi Permainan | 98 | 120 | 146 | 158 | 177 | 194 |
| D-IV Kedinasan | Hubungan Komunikasi Publik | 11 | | | | | |
| | Diseminasi Informasi Publik | 8 | | | | | |
| | Produksi Media Informasi Publik | 12 | | | | | |
| Diklat Kerjasama | Diklat Teknis | 79 | 104 | 106 | 91 | 78 | 99 |
| | TCTP | 14 | | | | | |
| Total | | 2.020 | 2.144 | 2.213 | 2.305 | 2.356 | 2.390 |

Dari target 2.379 mahasiswa, STMM berhasil mendapatkan 2.390 mahasiswa sehingga capaian mahasiswa tahun 2020 adalah sebesar 100,46%.

Untuk melihat tingkat kelulusan, rasio kelulusan dapat dilihat dari jumlah mahasiswa *intake* tahun 2016 dibandingkan dengan kelulusan tahun 2020 dengan asumsi mahasiswa lulus setelah menempuh 8 semester atau sekitar 4 tahun perkuliahan. Total mahasiswa tahun 2016 adalah sebanyak 453 orang. Target kelulusan tepat waktu adalah sebanyak 60% atau sekitar 271 orang. Sementara itu, capaian kelulusan mahasiswa tahun 2016 yang lulus pada tahun 2020 adalah sebanyak 211 orang atau sekitar 77,86%.

Menurut Surat Edaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1041/BAN-PT/LL/2020 tanggal 7 April 2020 perihal Revisi Mekanisme Perpanjangan Akreditasi yang ditujukan kepada seluruh Pimpinan Perguruan Tinggi di Indonesia, perpanjangan Keputusan Akreditasi perguruan tinggi diterbitkan apabila memenuhi salah satu ketentuan mengenai rasio dosen mahasiswa paling tinggi 1:60 untuk S1. Sementara itu, rasio dosen dibandingkan dengan mahasiswa STMM adalah 1:41. Maka, STMM memenuhi rasio dosen dan mahasiswa seperti yang dipersyaratkan BAN-PT. Berikut tergambar rasio jumlah mahasiswa, dosen, dan rata-rata kelulusan per tahun:

Tabel 25
Rasio Jumlah Mahasiswa, Pengajar, dan
Kelulusan Rata-rata per Tahun

| Jurusan/ Prodi/ Kompetensi Keahlian | Jumlah Siswa | Jumlah Pengajar/ Guru/ Dosen/ Instruktur | Lulusan Per Tahun (rata-rata) |
|---|--------------|--|----------------------------------|
| Desain Teknologi Permainan | 194 | 6 Dosen | 14 |
| Manajemen Informasi Komunikasi | 455 | 10 Dosen | 28 |
| Animasi | 193 | 8 Dosen | 19 |
| Manajemen Teknik Studio Produksi Siaran | 581 | 12 Dosen | 45 |
| Manajemen Prodi Pemberitaan | 350 | 10 Dosen | 35 |
| Manajemen Produksi Siaran | 518 | 10 Dosen | 43 |
| TOTAL | 2.291 | 56 Dosen | 184 |

PELATIHAN DAN SERTIFIKASI APARATUR BIDANG KOMINFO



Gambar 48
Pelatihan dan Sertifikasi
Aparatur Bidang Kominfo

Memasuki tahun 2020, fokus pemerintah masih berpusat pada penyiapan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif termasuk di dalamnya adalah pembangunan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). Telah terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pegawai ASN. Jika perspektif lama memandang pegawai hanya sebagai faktor produksi, maka dengan pendekatan *human capital* yang saat ini dianut, pegawai harus dipandang sebagai aset organisasi. Oleh karenanya setiap anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi ASN merupakan modal dalam upaya peningkatan organisasi. Hal ini sejalan dengan UU ASN yang mengamanahkan bahwa setiap ASN berhak untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran dalam satu tahun.

Sejak berlakunya Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 489/K.1/PDP.10.4 tahun 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka Badan Litbang SDM melalui BPPTIK Cikarang menyediakan layanan Diklat Teknis bidang TIK untuk ASN di seluruh Indonesia sebagai bagian dari pengembangan SDM ASN Bidang TIK.

Selain BPPTIK Cikarang, pelatihan aparatur juga diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan/Pusdiklat yang akan dijabarkan pada bagian selanjutnya. Pada tahun 2020, pelatihan aparatur berhasil melatih sebanyak 586 aparatur dari target awal sebesar 460 peserta (115%). Materi yang diberikan adalah Desain Grafis, Infografis, *Cloud Computing*, *Drive Test*, Pelatihan dan sertifikasi Barang Jasa Pemerintah, *Document Control Management* Bagi Aparatur Pemerintah, dan Administrasi Perkantoran Berbasis TIK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 547 peserta menyelesaikan pelatihan dan mendapatkan sertifikat.

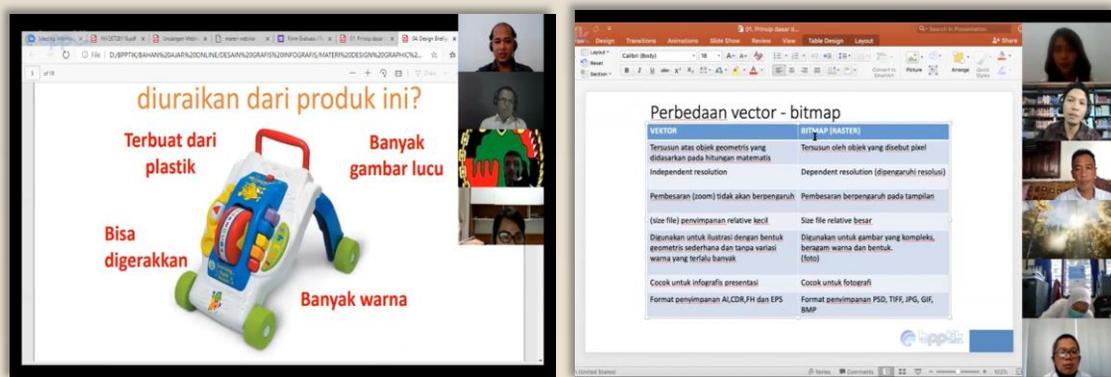
Sampai dengan Februari 2020, BPPTIK Cikarang berhasil menyelenggarakan pelatihan aparatur secara luring bagi 191 peserta yang berasal dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, BPPTIK berhasil melampaui target awal yakni 150 peserta sebelum pandemi Covid-19 memasuki tanah air.

Gambar 49
Pelatihan Aparatur di BPPTIK Cikarang (*Luring*)



Setelah itu, mulai bulan Juni pelatihan dilaksanakan juga secara daring melalui aplikasi rapat daring dan beberapa pelatihan masih dilakukan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan sampai akhir tahun anggaran 2020.

Gambar 50
Pelatihan Aparatur di BPPTIK Cikarang (*Daring*)



PENGENALAN TIK BAGI MASYARAKAT (WANITA, ANAK-ANAK, DAN DISABILITAS)



Gambar 51
Ilustrasi Pengenalan TIK

Pengenalan TIK Bagi Masyarakat (Wanita, Anak-anak, dan Disabilitas) dilaksanakan oleh 2 BBPSDMP Kominfo dan 6 BPSDMP Kominfo yang difokuskan pada pemanfaatan Galeri Internet yang tersedia di UPT masing-masing. Sehingga, idealnya kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan dengan memanfaatkan fasilitas yang terdapat di galeri internet (*facility based*). Namun, dengan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan pertemuan dilakukan secara luring, maka sebagian besar kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi rapat daring sejak diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di daerah masing-masing. Pelatihan luring hanya dilakukan di awal tahun 2020 sebelum kebijakan PSBB diberlakukan.

Gambar 52
Pengenalan TIK Bagi Masyarakat
(Wanita, Anak-anak, dan Disabilitas)



Dari pelatihan yang dilaksanakan secara daring, peserta yang mengikuti tidak hanya berasal dari kategori wanita/IRT, anak usia sekolah dan disabilitas namun juga diikuti oleh UMKM, guru, dan wali murid. Meluasnya target pelatihan ini juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan teknologi yang harus dikejar oleh guru dan wali murid dalam menghadapi pandemi yang memaksa hampir seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring sehingga terdampak teknologi sebagai dampak pandemi memerlukan solusi yang solutif dan adaptif.

Meskipun terjadi perubahan metode kegiatan pada tahun 2020, namun Badan Litbang SDM mampu menyelenggarakan kegiatan Pengenalan TIK untuk sebanyak 7.628 peserta. Jumlah ini melampaui target awal yakni 5.080 peserta sehingga capaian kegiatan ini adalah sebesar 150,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26
Rekap Realisasi Pengenalan TIK bagi Masyarakat Tahun 2020 per UPT

| Unit Pelaksana Teknis (UPT) | Target Fisik | Realisasi Fisik | % |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------|
| BBPSDMP Medan | 450 | 563 | 125% |
| BBPSDMP Makassar | 300 | 300 | 100% |
| BPSDMP Jakarta | 300 | 320 | 107% |
| BPSDMP Bandung | 400 | 578 | 145% |
| BPSDMP Yogyakarta | 330 | 369 | 112% |
| BPSDMP Surabaya | 2.500 | 4.575 | 183% |
| BPSDMP Banjarmasin | 600 | 665 | 111% |
| BPSDMP Manado | 200 | 258 | 129% |
| TOTAL | 5.080 | 7.628 | 150% |

Sasaran awal kegiatan ini adalah Ibu Rumah Tangga, anak usia sekolah dan disabilitas. Namun seiring dengan penyesuaian kebutuhan dan kondisi pandemi yang membuka luas pintu kesempatan mengikuti pelatihan yang disediakan sekaligus meningkatkan literasi digital para orang tua untuk dapat mendampingi anak dalam rangka pembelajaran jarak jauh (PJJ), maka peserta selain 3 kategori di atas juga banyak yang berminat mengikuti pelatihan. Berikut rekap peserta Pengenalan TIK bagi Masyarakat berdasarkan kategori peserta:

Tabel 27
Rekap Kategori Peserta Pengenalan TIK bagi Masyarakat Tahun 2020 (per Triwulan)

| Realisasi 2020 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TOTAL |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wanita (IRT) | 684 | 366 | 436 | 291 | 1.777 |
| Anak (Pelajar/Mahasiswa) | 566 | 88 | 77 | 278 | 1.009 |
| Disabilitas | 20 | 0 | 0 | 133 | 153 |
| Lain-lain | 440 | 1.153 | 2.389 | 707 | 4.689 |
| TOTAL | 1.710 | 1.607 | 2.902 | 1.409 | 7.628 |

PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI SESUAI DENGAN STANDAR KOMPETENSI



Gambar 53
Ilustrasi Peningkatan Kapasitas Pegawai

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) berupaya meningkatkan mutu/kualitas pesertanya dengan memberikan kurikulum, modul, dan bahan ajar yang bermutu, pengajar yang berkompeten, dan sarana prasarana yang mendukung proses belajar mengajar. Metode pengukurannya adalah dengan membandingkan peserta yang lulus diklat dengan jumlah peserta. Jumlah peserta yang mengikuti diklat manajerial, teknis, dan fungsional berjumlah 162 orang. Namun tidak semua jenis diklat menyertakan ujian untuk menentukan kelulusan/kompetensi peserta diklat. Terdapat juga diklat yang bersifat *completion*.

Dari data di atas, berikut rekap kelulusan Diklat Manajerial, Diklat Teknis, dan Diklat Fungsional:

Tabel 28
Persentase Kelulusan Diklat Manajerial

| Diklat | Peserta | Lulus | % Kelulusan |
|--------------------------|---------|-------|-------------|
| Pengiriman Diklat PIM II | 2 | 2 | 100% |
| Workshop PKP | 10 | 8 | 80% |
| Subtotal | 12 | 10 | 83% |

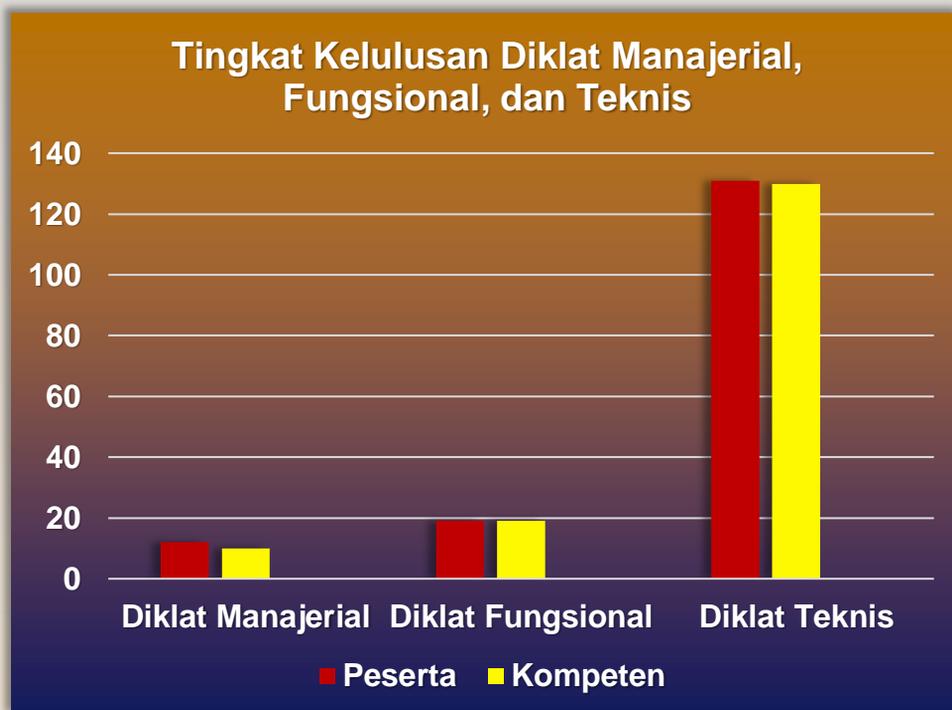
Tabel 29
Persentase Kelulusan Diklat Teknis

| Diklat | Peserta | Lulus | % Kelulusan |
|---|---------|-------|-------------|
| Diklat Teknis Analisis Media Sosial | 25 | 25 | 100% |
| Pengiriman TOT skema kompetensi IT Project Management | 8 | 8 | 100% |
| Diklat Teknis Analisis Media Sosial | 47 | 47 | 100% |
| Workshop Fasilitator PKA | 21 | 20 | 95,23% |
| Workshop Pengelola PKP PKA | 30 | 30 | 100% |
| Subtotal | 131 | 130 | 99,24% |

Tabel 30
 Persentase Kelulusan Diklat Fungsional

| Diklat | Peserta | Lulus | % Kelulusan |
|---|---------|-------|-------------|
| Diklat Fungsional Pranata Humas Tingkat Ahli Angkatan 1 | 19 | 19 | 100 |
| Subtotal | 19 | 19 | 100 |

Grafik 8
 Tingkat Kelulusan Diklat Manajerial, Fungsional, dan Teknis



Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana persentase kelulusan tahun 2020 yakni 99%, tingkat kelulusan tahun ini menurun sedikit menjadi 98,15%. Perhitungan tersebut diambil dari tingkat kelulusan peserta dari diklat yang mempersyaratkan ujian sebagai syarat kelulusan.

KILAS BALIK 2020



DISEMINASI INFORMASI BEASISWA S2 DALAM NEGERI KEMENKOMINFO

Upaya diseminasi informasi Program Beasiswa Pascasarjana Kemenkominfo tidak hanya terbatas pada publikasi media, laman dan akun sosial media *official* Kemenkominfo, serta korespondensi dengan Pemda dan K/L lain. Rantai birokrasi terkadang menjadi kendala penyampaian informasi penting dengan batas tenggat waktu yang singkat. Menyikapi hal tersebut, Badan Litbang SDM berusaha menjemput bola dengan mengadakan Sosialisasi Program Beasiswa S2 Dalam Negeri Tahun 2020 khususnya untuk wilayah Barat dan Timur Indonesia. Dengan pertimbangan wilayah sekaligus sebagai lokasi universitas mitra kerja sama Beasiswa S2 maka Sosialisasi dilaksanakan di Padang dan Kupang pada awal tahun 2020 sebelum adanya larangan pembatasan sosial berlaku.



Gambar 54
Sosialisasi di Padang

Bertempat di Hotel Mercure Padang, hadir sekitar 89 peserta berasal dari SKPD instansi pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang saat ini ditugaskan sebagai PPID atau Pengelola TIK, perwakilan dari BKD dan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, instansi swasta, wiraswasta, perguruan tinggi, serta masyarakat umum.

Narasumber Sosialisasi adalah pengelola program beasiswa S2 dalam negeri mitra kerja sama baik dari jurusan komunikasi maupun informatika. Sebelum Sosialisasi, kami mempublikasikan kegiatan ini secara *On Air* pada 13 Februari 2020 melalui radio Sushi FM (99.1 FM). Selain itu, parallel saat sosialisasi dilaksanakan, kami juga mengadakan *Live talkshow* melalui RRI Padang pada 14 Februari 2020 dari lokasi. Tidak hanya itu, Sosialisasi juga diliput oleh beberapa media cetak maupun daring lokal, yakni Harian Singgalang, Topsatu.com, Covesia.com, Prokabar.com, Harian Antara Sumbar, Harian Sumbar, Impiannews.com, antaranews, prokabar.com, dan Klikpositif.com.



Gambar 55
Sosialisasi Program
Beasiswa S2 di Padang



Gambar 56
Sosialisasi di Kupang

Sosialisasi digelar di Hotel Aston Kupang Hotel & Convention Center pada 11-13 Maret 2020 dihadiri 93 peserta dari SKPD instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini ditugaskan sebagai PPID atau Pengelola TIK, perwakilan dari BKD dan Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, instansi swasta, wiraswasta, perguruan tinggi, dan masyarakat umum.



Gambar 58
Sosialisasi Program
Beasiswa S2 di Kupang



Gambar 57
Iklan Program Beasiswa

Kepala Diskominfo Provinsi NTT, Drs. Abraham Maulaka turut hadir dan memberi sambutan hangat pada Pembukaan Sosialisasi. Untuk meningkatkan kehadiran peserta Sosialisasi dan menyebarkan informasi Sosialisasi Beasiswa secara merata terutama bagi kalangan masyarakat umum, kami telah mempersiapkan publikasi melalui beberapa kanal publikasi, di antaranya:

- Infografis ditayangkan akun sosmed official Kementerian Kominfo: @kemenkominfo
- Iklan Program Beasiswa ditayangkan di Radio Swara Timor (frekuensi 90,1 FM) sebanyak 4 kali sehari pada jam 11.10, 14.10, 17.10, dan 20.10 WIT dengan durasi 2 menit selama 10 hari yang mulai disiarkan sejak tanggal 2 Maret 2020.
- Adlibs di RRI 94,4 FM ditayangkan di sela-sela hiburan sejak H-3 (9 Maret 2020).
- Selain on air di Radio Swara Kupang pada H-1 dan talkshow di RRI pada hari H kegiatan, kami juga mengundang 10 (sepuluh) media online untuk hadir meliput pada saat Sosialisasi berlangsung.

KERJA SAMA BADAN LITBANG SDM



Gambar 59
Ilustrasi Kerja Sama

Kerja sama skema *quadruple helix* yakni sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kebutuhan untuk menyongsong tercapainya tujuan ekonomi kreatif dan digital pada 2035 sebagai tahapan dalam mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Kerja sama dilakukan sebagai upaya Indonesia untuk makin berdaya saing dalam Revolusi Industri 4.0 melalui inovasi di bidang sains dan teknologi, khususnya inovasi di bidang digital. Namun, industri dan inovasi di bidang digital tidak dapat berjalan tanpa pengembangan kompetensi SDM yang dipersiapkan untuk menghadapi disrupsi teknologi dalam rangka pembangunan ekosistem berbasis teknologi.

Badan Litbang SDM dalam menjalankan tugas fungsi dan memenuhi target prioritasnya berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak. Tercatat pada tahun 2020, Badan Litbang menjalin kerja sama dalam negeri dengan 21 mitra dan kerja sama luar negeri dengan 3 mitra, yakni:

Tabel 31
 Kerja Sama Badan Litbang SDM dengan
 21 Mitra Dalam Negeri

| No | Instansi | Tentang | Payung Hukum | Bentuk Kegiatan | Keterangan |
|---------------------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|
| DALAM NEGERI | | | | | |
| 1 | Universitas Brawijaya | Sinergisitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Komunikasi dan Informatika | MOU (September 2020 - September 2025) | Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship | |
| 2 | Universitas Indonesia | Sinergisitas Penyelenggaraan Program Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Komunikasi dan Informatika | MOU (April 2020 - April 2025) | - Program Beasiswa S2 Dalam Negeri - Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship | |
| 3 | Universitas Gadjah Mada | Sinergisitas dan Pengembangan Penyelenggaraan Program-Program di Bidang Komunikasi dan Informatika | MOU (April 2020 - April 2025) | - Program Beasiswa S2 Dalam Negeri - Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship | |
| 4 | Universitas Indonesia | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Teknologi Informasi E-Government | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 5 | Universitas Indonesia | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Teknik Kekhususan Manajemen Keamanan Jaringan Informasi | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |

| No | Instansi | Tentang | Payung Hukum | Bentuk Kegiatan | Keterangan |
|---------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| DALAM NEGERI | | | | | |
| 6 | Universitas Indonesia | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 7 | Universitas Gadjah Mada | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Teknologi Informasi E-Government | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 8 | Universitas Gadjah Mada | Penyelenggaraan Program Beasiswa Program Magister Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | PKS (Mei 2020 - Mei 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 9 | Universitas Gadjah Mada | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 10 | Universitas Sebelas Maret | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi | PKS (Agustus 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 11 | Universitas Airlangga | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Media dan Komunikasi | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |

| No | Instansi | Tentang | Payung Hukum | Bentuk Kegiatan | Keterangan |
|---------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------|
| DALAM NEGERI | | | | | |
| 12 | Universitas Sumatera Utara | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 13 | Universitas Andalas | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi | PKS (Agustus 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 14 | Universitas Hasanuddin | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Ilmu Komunikasi | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 15 | Institut Teknologi Bandung | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Studi Magister Teknik Elektro Jalur Pilihan Layanan Teknologi Informasi Tahun Ajaran 2020/2021 | PKS (Agustus 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |
| 16 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Pemberian Beasiswa Pendidikan Program Magister Departemen Teknik Elektro Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan | PKS (September 2020 - Agustus 2023) | Program Beasiswa S2 Dalam Negeri | |

| No | Instansi | Tentang | Payung Hukum | Bentuk Kegiatan | Keterangan |
|---------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|--|------------|
| DALAM NEGERI | | | | | |
| 17 | Bank BNI | Penyerapan Lulusan <i>Digital Talent Scholarship Thematic Academy</i> Pada Industri Perbankan | PKS (November 2020 - November 2021) | Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship | |
| 18 | Bank BRI | Penyerapan Lulusan <i>Digital Talent Scholarship Thematic Academy</i> Pada Industri Perbankan | PKS (November 2020 - November 2021) | Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship | |
| 19 | Asosiasi Fintech Indonesia | Penyerapan Lulusan <i>Digital Talent Scholarship Thematic Academy</i> Pada Industri Teknologi Finansial | PKS (November 2020 - November 2021) | Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship | |
| 20 | PT. IBM Indonesia | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | MOU (September 2020 - Desember 2020) | Penyelenggaraan Program Digital Talent Scholarship | |
| 21 | KOICA | Information Technology Management Support For Ict Training And Development Center | ROD (Januari 2020 - Maret 2021) | Hibah | |

Tabel 32
 Kerja Sama Badan Litbang SDM dengan
 3 Mitra Luar Negeri

| No | Instansi | Tentang | Payung Hukum | Bentuk Kegiatan | Keterangan |
|--------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
| LUAR NEGERI | | | | | |
| 1 | International Institute of Information Technology Bangalore | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi | MOU (Februari 2020 - Februari 2023) | Program Beasiswa S2 Luar Negeri | |
| 2 | Universitas Eötvös Loránd | Program Beasiswa | MOU (Agustus 2020 - Desember 2024) | Program Beasiswa S2 Luar Negeri | |
| 3 | Universitas Twente | Program Beasiswa | MOU (Agustus 2020 - Desember 2024) | Program Beasiswa S2 Luar Negeri | |

Payung kerja sama di atas, hanya mencakup kerja sama yang diinisiasi pada tahun 2020. Sementara itu, masih terdapat dokumen kerja sama lainnya yang masih berlaku sebagai payung hukum kerja sama dengan berbagai mitra.

RE-LAUNCHING SIMONAS: PLATFORM REKRUTMEN TALENTA DIGITAL

Gambar 60
Re-Launching SIMONAS



Dinamika globalisasi yang semakin dipermudah oleh revolusi industri jilid ke 4 semakin membuat persaingan tajam dan perang dagang memanas. Pemerintah berupaya mengambil peluang di tengah arus komunikasi dan interaksi yang semakin mudah dan terbuka. Badan Litbang SDM berupaya menghubungkan SDM yang tersedia di Indonesia dengan perusahaan atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Alumni Sertifikasi (SIMONAS) yang diluncurkan sejak September 2019 yang berfungsi untuk merekrut tenaga kerja sekaligus sebagai *national talent pool* yang dapat digunakan oleh kandidat pencari kerja dan perusahaan/instansi yang memerlukan tenaga kerja. Kehadiran SIMONAS, menjadi salah satu jawaban agar lulusan DTS terserap dengan cara kerja seperti *market place* gratis sebagai lokasi jual beli talenta bukan barang.

SIMONAS dirancang untuk mempertemukan *demand* dan *supply* talenta digital sekaligus melengkapi ekosistem yang sudah ada selama ini. Platform SIMONAS memungkinkan perusahaan untuk mengakses profil kandidat yang berisikan informasi pengalaman kerja, portfolio, *skills* yang dikuasai, hingga sertifikasi keahlian pencari kerja, sehingga memudahkan perusahaan untuk menyaring tenaga kerja kompeten. Selain itu, perusahaan dapat menggunakan SIMONAS untuk melakukan *talent scouting* berdasarkan *skills*, lokasi, sekolah atau universitas terakhir, tingkat pendidikan, tema pelatihan DTS yang diikuti, dan IPK. Terdapat fitur persuratan elektronik antara perusahaan dan kandidat untuk memudahkan komunikasi dalam proses rekrutmen.

SIMONAS merupakan bagian dari Program Digital Talent Scholarship yang dikembangkan Kementerian Kominfo untuk menyiapkan sumber daya manusia dengan kemampuan digital industri 4.0.

Platform SIMONAS dapat diakses di SIMONAS.kominfo.go.id diharapkan dapat memberikan pengakuan terhadap sertifikasi yang dimiliki oleh kandidat pencari kerja diharapkan dapat mendorong percepatan sertifikasi agar kompetensi SDM Indonesia dapat lebih diakui dan dipertanggungjawabkan, serta menjamin SDM yang lebih berkualitas unggul dimulai dari sekarang hingga minimal 5 tahun ke depan.

Untuk mempermudah *user*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menambahkan beberapa fitur terbaru di aplikasi SIMONAS yakni fitur pemutakhiran data pribadi, pencarian pekerjaan berdasarkan gaji, serta kemudahan akses melalui platform Android dan iOS. Pengkategorian jenis pekerjaan, bertujuan memudahkan pencari pekerja sesuai dengan bidang yang diinginkan sehingga lulusan program DTS dapat terbantu untuk menemukan profesi idaman. Program DTS yang mencetak talenta digital unggul, nantinya akan mendekatkan para talenta dengan industri digital. Program DTS tidak hanya memberikan pelatihan *hard-skill* tetapi juga *soft-skills* seperti *profiling* melalui DISC Test, *personal branding*, serta pemberian bahasa Inggris melalui kelompok kerja (Pokja) Pasca Pelatihan. Terhitung sejak dilakukan *re-launching* pada 15 Desember 2020, sudah sekitar 156 perusahaan yang telah bergabung di SIMONAS. Baik perusahaan rintisan atau startup hingga perusahaan profesional bergengsi. Setelah *re-launching platform job portal* SIMONAS 2020, para peserta Fresh Graduate Academy (FGA), Vocational School Graduate Academy (VSGA) dan Thematic Academy (TA) akan memanfaatkan dan merasakan SIMONAS untuk melamar pekerjaan maupun magang dari lowongan yang dibuka oleh mitra industri Kemkominfo.

PELANTIKAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Gambar 61
Pelantikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM



Di penghujung tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melantik dan mengambil sumpah jabatan dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Kominfo pada Rabu, 23 Desember 2020. Dalam sambutan usai pelantikan, Menteri Kominfo menegaskan agar kedua pejabat dapat mengembangkan SDM di lingkungan Kementerian Kominfo dan Talenta Digital Nasional. "Persoalan masalah sumber daya manusia atau SDM menjadi perhatian yang serius Bapak Presiden Joko Widodo dalam arahan beliau tentang Akselerasi Transformasi Digital," ujarnya dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Kominfo di Aula Anantakupa Kementerian Kominfo.



JOHNNY G. PLATE

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gambar 62
Menteri Komunikasi dan Informatika

Menteri Johnny mengingatkan kembali mandat dan tugas Kementerian Kominfo dalam mempercepat transformasi digital antara lain (1) percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital; (2) pembuatan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis secara khusus sektor kominfo, (3) percepatan integrasi pusat data nasional dalam satu data nasional, (4) penyiapan sumber daya manusia atau talenta digital; serta (5) percepatan penyiapan hal-hal yang terkait regulasi, skema pembiayaan dan pendanaan.

"Poin keempat ini yang menjadi perhatian saya dalam momentum pelantikan kali ini. Bagaimana Kementerian Kominfo menyiapkan pengembangan SDM atau talenta digital dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan berkelanjutan," uniknya.

Menurut Menteri Kominfo, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya untuk eksternal atau masyarakat luas, atau talenta digital andal dalam memasuki era transformasi digital menyongsong era teknologi 4.0. Hal yang perlu dipersiapkan juga sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kominfo.

"Yang nantinya memandu kebijakan dan menjadi *benchmark* talenta digital juga perlu di-*upgrade* dan *upskilling* keahlian dan kompetensinya. Adalah tugas kesekjenan untuk menyiapkan aparatur sipil negara memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjalankan beragam kebijakan dan program berkaitan dengan transformasi digital dimaksud. Sementara, Badan Penelitian dan Pengembangan SDM memiliki peran menyiapkan atau talenta digital andal dalam memasuki era transformasi digital menyongsong era teknologi 4.0," tandasnya.

Berkaitan dengan penyiapan talenta digital, Menteri Kominfo merujuk salah satu Visi Indonesia 2045 yakni Indonesia menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. "Kita bekerja keras untuk itu. Saat ini, Indonesia sedang bergerak maju untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi-teknologi baru, seperti *Big Data Analytics*, *Cybersecurity*, *Cloud Computing*, *Web Developer*, *Cyber Operations*, *Data Analyst*, *Digital Marketing*, *Graphic Designer*, *IT Perbankan*, *IT Project Management*, dan *Smart City* dan lainnya," paparnya.

Menteri Johnny menyatakan teknologi-teknologi itu bukan hanya sekadar istilah asing. Bahkan telah secara riil dimanfaatkan dalam berbagai sektor di Indonesia. Namun, untuk melakukan transformasi digital, Indonesia masih membutuhkan talenta digital sebanyak kurang lebih 9 juta orang untuk 15 tahun ke depan

"Atau kurang lebih setara dengan 600 ribu rerata per tahun. Ini membutuhkan sebuah persiapan yang matang dan serius untuk kita lakukan. Ini membutuhkan kerja keras luar biasa sehingga kita bisa membangun sebuah ekosistem yang baik bagi tumbuhnya talenta-talenta digital di Indonesia. Ini menjadi tugas yang akan diemban oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM yang baru Pak Hary," tandasnya.

Saat ini, Kementerian Kominfo berupaya menyiapkan dan mengembangkan talenta digital dengan berfokus pada aspek literasi dan pengembangan teknis kecakapan teknologi baru. Menurut Menteri Kominfo, literasi ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan rasa percaya akan pemanfaatan teknologi. Sedangkan, pengetahuan teknis dibutuhkan karena banyak pekerjaan yang diproyeksikan akan tergantikan dengan teknologi baru seiring pemanfaatannya yang semakin masif. "Kita sama-sama tahu *computer will take human jobs, but computer will also create another job for human*," tegasnya.

Upaya pengembangan talenta dilakukan Kementerian Kominfo dalam beberapa tahun terakhir melalui program stimulus pelatihan digital, melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, *Digital Talent Scholarship*, dan *Digital Leadership Academy*. "Hari ini secara khusus saya mintakan kepada Kepala Badan Litbang SDM yang baru untuk juga me-review dan menyiapkan peta jalan pengembangan STMM Sekolah Tinggi Multi Media Kominfo untuk menjadi *center of excellence* SDM digital Indonesia sesuai dengan kebutuhan transformasi digital nasional. Marilah kita melihat STMM baru untuk kebutuhan Indonesia masa kini dan masa depan," kata Menteri Johnny.

APRESIASI PEJABAT SEBELUMNYA



Gambar 63
Apresiasi Pejabat Sebelumnya

Menteri Kominfo mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada pejabat yang baru dilantik serta mendorong untuk melakukan perubahan. "Selamat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan terima kasih kepada Bapak Hary dan Ibu Mira. Saya selalu mendorong agar semua pejabat yang dilantik harus mampu menghadirkan perubahan," ujarnya.

Selain itu, Menteri Johnny juga mengharapkan agar dapat menyesuaikan diri agar dapat menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga mengajak berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan kekuatan kelancaran dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Mari bersama kita menatap hari esok dengan tekad, semangat dan memancang harapan baru untuk Indonesia. Harapan akan Indonesia Digital, Indonesia Towards Digital Nations, yang kita wujudkan bersama dengan kerja keras, kerja cerdas dan tentunya kerja ikhlas," ungkapnya.

Menteri Kominfo juga mengajak semua pihak mitra kerja dan *stakeholders* Kementerian Kominfo untuk membangun dan mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. "Untuk kesehatan pulih dan ekonomi bangkit menuju Indonesia Maju: Indonesia Sehat, Indonesia Kerja, Indonesia Tumbuh!" tegasnya.

Dalam akhir sambutan, Menteri Johnny menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat Sekjen dan Kepala Badan Litbang SDM sebelumnya. "Saya menyampaikan terima kepada Ibu Niken Sekjen yang lama dan Pak Ismail Plt Sekjen. Kepada Pak Basuki Kepala Badan Litbang SDM dan Pak Semmy Plt. Kepala Badan Litbang SDM, yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Dengan mengambil bagian dalam titik sambung dalam perjalanan sejarah Kominfo dan pengabdian kepada negeri kita yang tercinta Indonesia," ungkapnya.¹

¹ https://www.kominfo.go.id/content/detail/31671/siaran-pers-no-177hmkominfo122020-tentang-lantik-sekjen-dan-kepala-badan-litbang-sdm-menkominfo-tekankan-pengembangan-sdm-dan-talenta-digital/0/siaran_pers



LAPORAN TAHUNAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

2020

Kontak :

Badan Penelitian dan Pengembangan SDM
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Jalan Medan Merdeka Barat No. 9
Jakarta Pusat 10110
Telp. +62 21 381 0678
Fax. +62 21 381 0678
<http://balitbangsdm.kominfo.go.id>

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia